

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT DD) SEBAGAI PERLINDUNGAN SOSIAL
MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19
(Studi di Kabupaten Tuban)**

Tesis

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik



Disusun oleh:

Denny Iswanto

NIM. 196030100111018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
KEKHUSUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2021**

Lembar Pengesahan

TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT DD) SEBAGAI PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK
COVID-19
(Studi di Kabupaten Tuban)

Oleh:

DENNY ISWANTO
NIM. 196030100111018


Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 20 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

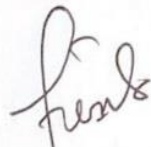
Ketua,

Anggota,

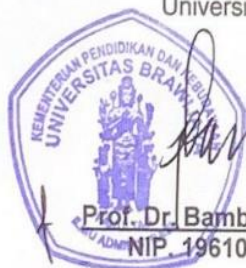

Prof. Dr. Samsiar Samsuddin
NIP. 20170545081721001


Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D
NIP. 196912052005011003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik


Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA
NIP. 19711013 200003 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
NIP. 196109051986011002

JUDUL TESIS:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
SEBAGAI PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19
(Studi di Kabupaten Tuban)

Nama Mahasiswa : Denny Iswanto
NIM : 196030100111018
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Minat : Kebijakan Publik

KOMISI PEMBIMBING:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Sjamsiar Sjamsuddin
Anggota : Dr. Fadillah Amin, M.AP.,Ph.D

TIM DOSEN PENGUJI:

Dosen Penguji 1 : Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA
Dosen Penguji 2 : Dr. Mohammad Nuh, S.IP, M.Si

Tanggal Ujian :
SK Penguji :

PERNYATAAN ORISIONALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplak, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S2) dibatalkan, serta diperoses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasa 70.

Malang, 18 Januari 2021

Denny Iswanto

196030100111018

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

ku persembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua orangtua ku tercinta

Bapak Kamari dan Ibu Masripah yang selalu
menuntun setiap langkahku, yang selalu senantiasa mendoakan
segala usahaku, yang selalu memberikan motivasi, pengorbanan
dan kasih sayang yang tiada hentinya untukku.

Para pendidiku yang ku hormati

Terimakasih atas seluruh ilmu yang diberikan.

RIWAYAT HIDUP

Denny Iswanto, Lahir di Tuban, 02 Mei 1996, anak dari Bapak Kamari dan Ibu Masripah, Memulai pendidikan pada MI Hidayatul Islam Mentoro, Tuban, SMPN 1 Soko Tuban, SMAN 1 Soko Tuban, setelah itu melanjutkan studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya lulus tahun 2018. Kemudian melanjutkan Program Magister dengan program studi yang sama di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada tahun 2019-2021.

Malang, 18 Januari 2021

Penulis,

Denny Iswanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkah atas segala karunia yang diberikan kepada penulis menyelesaikan laporan Tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) DANA DESA SEBAGAI PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak. Penulisan laporan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tesis sehingga peneliti dapat meraih gelar magister.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang membantu baik secara moril, materil, masukan, diskusi, dan saran dalam rangka menyelesaikan tesis ini. Penulis ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Yusri Abdillah S.Sos, M.Si, Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Hamidah Hayati Utami, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Mohammad Rozikin, M.Si. selaku wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA selaku ketua program studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin dan Bapak Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku dosen pembimbing tesis yang dengan sabar memberikan waktu, tenaga serta ilmunya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengetahuan.
8. Bapak dan Ibu informan dalam penelitian ini yang telah bersedia menjadi narasumber.

9. Teman-teman Magister Universitas Brawijaya angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih menjadi keluarga selama perkuliahan serta kenangan yang kalian berikan.
10. Terimakasih kepada semua pihak yang mendukung dan memberikan motivasi yang tak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan untuk menyelesaikan tesis ini.

Demikian laporan tesis ini penulis buat, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan kesempurnaan laporan tesis. Semoga laporan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, 18 Januari 2021

Denny Iswanto

RINGKASAN

DENNY ISWANTO, 2021. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin terdampak Covid-19 (Studi di Kabupaten Tuban). Komisi Pembimbing: Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, dan Fadillah Amin, M.AP., Ph.D.

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menangani permasalahan sosial ini. Sejumlah program jaring pengaman sosial telah diberikan kepada masyarakat salah satunya melalui BLT Dana Desa. BLT Dana Desa merupakan jenis bantuan sosial baru dimana pemerintah desa yang diberikan kewenangan untuk dapat mengelola teknis pelaksanaannya di masing-masing desa dengan melibatkan *stakeholders* untuk dapat melaksanakan kebijakan ini dengan penuh tanggungjawab. Kewenangan ini diberikan sebagai langkah terakhir pemerintah untuk dapat menjaring masyarakat miskin dan rentan yang belum tersentuh bantuan sosial manapun, baik dari pemerintah pusat maupun daerah di Kabupaten Tuban. Dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa diperlukan adanya suatu sistem pengawasan dari hulu hingga hilir untuk dapat memastikan bantuan yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi dan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Tuban dengan menarasikan data yang ada dengan menyandingkan regulasi dan teori dalam analisisnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi langsung ke lapangan, dan pengumpulan data secara tertulis. Data yang didapatkan dikompilasi dan dipetakan sehingga bisa diketahui bagaimana proses implementasi BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan BLT Dana Desa ini sangat dibutuhkan masyarakat selain karena adanya pandemi, hal ini juga disebabkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Tuban yang memang sudah tinggi. Implementasi kebijakan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan pemerintah, baik dari Permendes No.6 Tahun 2020 sampai dengan SE Bupati Tuban Nomor 140/2112 /414.106/2020 meliputi kegiatan pembentukan tim pendata, mekanisme pendataan, penetapan sasaran, metode dan mekanisme penyaluran, dan monitoring dan evaluasi. BLT Dana Desa menjaring 20 Kecamatan dan 310 Desa dari 311 Desa yang ada. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban adalah sebanyak 33.238 KPM. Faktor pendukung kebijakan ini adalah adanya komitmen pemerintah untuk dapat menyalurkan program ini dengan partisipatif, persyaratan calon KPM mudah, dan pendekatan modal sosial dalam proses pendataan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kualitas data yang belum mutakhir, SDM Aparatur Desa yang kurang berkompeten, dan adanya inkonsistensi kebijakan pusat dan daerah. Dengan permasalahan tersebut Peneliti memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Tuban untuk adanya pembenahan data secara berkala untuk menghasilkan data yang berkualitas dan memberikan pendampingan kepada pemerintah desa secara untuk dapat meningkatkan kompetensinya dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial di tingkat desa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Jaring Pengaman Sosial, BLT Dana Desa

SUMMARY

DENNY ISWANTO, 2021. Master of Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University. Implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Policy as Social Protection for the Poor affected by Covid-19 in Tuban Regency. Supervisory Commission: Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, and Fadillah Amin, M.AP., Ph.D

The Covid-19 pandemic which has an impact on the social lives of the poor and vulnerable in fulfilling their daily needs is the government's responsibility to be able to deal with these social problems. A number of social safety net programs have been provided to the community, one of which is through direct cash assistance to the Village Fund. Village Fund cash direct assistance is a new type of social assistance where the village government is given the authority to be able to manage the technical implementation in each village by involving stakeholders to be able to implement this policy with full responsibility. This authority was given as the government's last step to be able to capture the poor and vulnerable who have not been touched by any social assistance, both from the central and regional governments in Tuban Regency. In implementing the Village Fund cash direct assistance policy, it is necessary to have a system that supervises from upstream to downstream to ensure that the assistance provided is appropriate and right on target.

This research uses qualitative research methods with descriptive research type. This research was conducted by seeking information and analyzing the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Policy in Tuban Regency through the policy content and policy context. The method of data collection is done by interview, direct observation in the field, and collecting data in writing. The data obtained were compiled and mapped so that it could be known how the process of implementing the Village Fund cash direct assistance in Tuban Regency.

Based on the results of the study, it was found that this program was very much needed by the community apart from the pandemic, this was also due to the already high poverty conditions in Tuban Regency. Implementation of policies is carried out by referring to government legislation, from village minister regulation number 6 of 2020 to circular number of the Regent of Tuban Number 140/2112 /414.106/2020. The Village Fund cash direct assistance covered 20 Districts and 310 Villages from the existing 311 Villages. The number of Beneficiary Families of the Village Fund cash direct assistance in Tuban Regency was 33,238 beneficiaries. The supporting factors for this policy are the government's commitment to be able to distribute this program in a participatory manner, easy requirements for potential beneficiaries, and a social capital approach in the data collection process. Meanwhile, the servant factors are the quality of the data that is not up to date, the less competent human resources of the village apparatus, and the inconsistency of central and regional policies. With these problems, the researcher gave suggestions to the Tuban Regency government for regular data improvements to produce quality data and provide assistance to the village government in order to increase its competence in managing social welfare data at the village level.

Keywords: Implementation, Social Safety Net Policy, direct cash assistance for Village Funds

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS TESIS.....	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	17
PENDAHULUAN.....	17
1.1 Latar Belakang.....	17
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
KAJIAN TEORI	16
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Kajian Teori.....	36
2.2.1 Kebijakan Publik.....	36
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	42
2.2.4 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik.....	56
2.2.5 Perlindungan sosial.....	58
2.2.6 Bantuan Sosial.....	62
2.2.8 Kemiskinan	66
2.2.9 <i>Coronavirus Disease (COVID-19)</i>	74
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	76
BAB III	79
ANALISIS SOCIAL SETTING	79
3.1 Kondisi Kabupaten Tuban	79
3.1.1 Kondisi Geografis	79

3.1.2	Visi dan Misi	79
2.1.3	Kondisi Demografi	84
2.1.4	Kesejahteraan Masyarakat	85
BAB IV		96
METODE PENELITIAN.....		96
4.1	Jenis Penelitian	96
4.2	Fokus Penelitian	97
4.3	Lokasi dan Situs Penelitian	99
4.4	Jenis dan Sumber Data	100
4.4.1	Jenis Data.....	100
4.4.2	Sumber Data	104
4.5	Teknik Pengumpulan Data.....	107
5.6	Instrumen Penelitian	111
4.7	Keabsahan Data	113
4.8	Teknik Analisis Data.....	117
BAB V		123
HASIL DAN PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
5.1	Penyajian Data	123
5.1.1	Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban.	123
5.1.2	Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban.....	158
5.2	Analisis Data.....	169
5.2.1	Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban.....	169
5.2.2	Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban.	Error! Bookmark not defined.
BAB VI		251
PENUTUP		251

6.1 Kesimpulan	251
6.2 Saran.....	254
DAFTAR PUSTAKA.....	256
LAMPIRAN	264

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penyebaran COVID-19 di Dunia dan di Indonesia.....	2
Gambar 2. Lima Provinsi teratas persebaran COVID-19 di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	47
Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Grindle	49
Gambar 5. Model Implementasi kebijakan Baedhowi.....	50
Gambar 6. Model Interaktif Implementasi Kebijakan	50
Gambar 7. Model Implementasi Kesesuaian.....	54
Gambar 8. Arah Kebijakan Perlindungan Sosial yang Komprehensif di Indonesia ..	60
Gambar 9. Kerangka Pikir Penelitian	76
Gambar 10. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Nasional.	88
Gambar 11. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban.....	91
Gambar 12. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tuban tahun 2017-2018	92
Gambar 13. Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif	120
Gambar 14. sasaran BLT Dana Desa se-Jawa Timur 2020	133
Gambar 15. Kriteria Keluarga Miskin KPM BLT Dana Desa.....	137
Gambar 16. Kriteria Penerima BLT Dana Desa	138
Gambar 17. Pembentukan tim pendata BLT Dana Desa di Desa Kradenan Kec. Palang Kab. Tuban.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 18. Petunjuk Teknis Pelaksana pendataan Calon Keluarga Penerima BLT Dana Desa.....	139
Gambar 19. Form Pendataan BLT Dana Desa	140
Gambar 20. Kegiatan Musdesus Penetapan Calon KPM BLT Dana Desa di salah satu desa di Kabupaten Tuban	141
Gambar 21. Laman website DTKS Kementerian Sosial	143
Gambar 22. Pencarian salah satu KPM BLT Dana Desa di Desa Mentoro Kec. Soko Kab. Tuban	144
Gambar 23. Bimtek SIKS-NG Seluruh Operator Desa di Kabupaten Tuban	146
Gambar 24. Relaksasi penyederhanaan Kebijakan BLT Dana Desa	149
Gambar 25. Besaran Nominal BLT Dana Desa	151
Gambar 26. Kasus Korupsi Bantuan Sosial di Kabupaten Tuban	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Perlindungan Sosial di Indonesia	5
Tabel 2. Perbandingan Ratio/indeks Gini di perkotaan dan di pedesaan Januari-maret 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Tuban	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tuban lima tahun terakhir ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. Penelitian terdahulu	27
Tabel 6. Informan Penelitian	105
Tabel 7. Teknis Wawancara	110
Tabel 8. Jumlah KPM BLT Dana Desa berdasarkan pekerjaan	130
Tabel 9. Jumlah KPM BLT Dana Desa Per Kecamatan	133
Tabel 10. Angka Kemiskinan di Kabupaten Tuban.....	135
Tabel 11. Jumlah KPM Bantuan Sosial di masa pandemi di kab. Tuban.....	136
Tabel 12. Akumulasi BLT Dana Desa per-KPM di Kab. Tuban	151
Tabel 13. Pengawasan BLT Dana Desa	152
Tabel 14. Peran berbagai aktor dalam BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban	212

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir tahun 2019, dunia diguncangkan dengan adanya permasalahan kesehatan yaitu dengan munculnya wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020 sebagai pandemi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus secara global (Mckibbin Warwick dan Roshen Wernando, 2020). Permasalahan ini membawa dampak yang begitu besar bahkan turut mempengaruhi segala aspek kehidupan negara-negara di seluruh dunia. Menurut *United Nations, Departement of Economics and Social Affairs (UN DESA)* menyatakan bahwa adanya permasalahan ini paling berdampak pada aspek ekonomi di negara-negara berkembang dikarenakan krisis ekonomi yang cukup parah melalui perdagangan, keuangan dan harga komoditas (UN DESA, 2020). *United Nation* (2020) menyatakan bahwa diperlukan waktu 10 tahun bagi negara diseluruh dunia dapat pulih secara sosial dan ekonomi dikarenakan dampak dari pandemi ini. Pandemi ini juga sangat mengganggu kehidupan sosial masyarakat dengan meningkatnya permasalahan sosial diantara meningkatnya pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan dan meningkatnya kasus kriminalitas terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia (PwC,2020).

Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia, dengan demikian diperkirakan pandemi akan melanda pada frekuensi waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk kurang padat lainnya (*Asian*

Development Bank, 2020). Penyebaran COVID-19 semakin masif dalam bulan Maret sampai dengan Februari 2021 diseluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan data sebaran kasus sampai dengan 22 Februari 2021 jumlah kasus positif sebanyak 1.288.833 orang dengan angka kematian berkisar 34.691 orang yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.

Gambar 1. Penyebaran COVID-19 di Dunia dan di Indonesia



Sumber: <https://covid19.go.id/> (2021)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa data terkini mengenai perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah yang berdampak pada berbagai aspek, salah satunya sosial ekonomi. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan di Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro.

Untuk mengatasi adanya dampak lintas sektor tersebut, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi permasalahan ini yang dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Kebijakan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasi isu/permasalahan yang timbul di masyarakat. Menurut Islamy (2004:2) kebijakan publik adalah tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pada hakekatnya kebijakan publik mendasar pada paham kebijakan publik harus selalu mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Kebijakan ini harus dibuat baik dalam keadaan normal maupun genting untuk dapat mengatasi permasalahan dengan segera.

Langkah utama yang sudah dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Regulasi tersebut secara garis besar membahas tentang *refocusing/relokasi* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyisir anggaran yang dianggap tidak terlalu *urgent* untuk dapat dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Dana yang digelontorkan untuk penanganan COVID-19 mencapai Rp405,1 triliun. Anggaran itu dibagi untuk empat bidang, yaitu bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun, insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat Rp70,1 triliun, pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun dan program jaring pengaman sosial Rp100 triliun.

Program Jaring Pengaman sosial (JPS) sendiri diperlukan sebagai salah satu program perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan akibat adanya pandemi

Covid-19 ini. Menurut *International Labour Organization* (ILO) (1984) perlindungan sosial adalah sebuah sistem yang disediakan melalui rangkaian kebijakan publik untuk meminimalisir dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh hilangnya dan/atau berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari, penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian. Sedangkan menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) (2012) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai serangkaian kebijakan publik dan privat yang mempunyai tujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kerugian dan kemiskinan. Kebijakan ini diambil karena banyaknya masyarakat kelas menengah kebawah yang terdampak COVID-19 ini dikarenakan hilangnya mata pencaharian, berkurangnya pendapatan, dan meningkatnya angka pengangguran karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal yang dilakukan banyak perusahaan. Akibatnya permasalahan sosial ekonomi ini akan meningkatkan angka kemiskinan dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga nantinya akan semakin jauh dari tujuan pembangunan negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*).

Welfare state pernah diperkenalkan oleh Spicker (Suharto,2005) yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berupaya

untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggungjawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Dalam mewujudkan perkembangan kesejahteraan masyarakat tersebut, hal ini secara teoritis didukung dengan adanya perubahan paradigma administrasi publik dari *Old Public Administration*, *New Public Management*, dan *New Public Service* yang mewajibkan negara hadir dalam setiap permasalahannya terutama disini adalah permasalahan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu wujud nyata pelayanan publik dalam bidang sosial.

Aspek	<i>Old Public Administration</i>	<i>New Public Management</i>	<i>New Public Service</i>
Dasar teoritis dan fondasi epistemologi	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi
Konsep kepentingan public	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai
Responsivitas birokrasi public	<i>Clients dan constituent</i>	<i>Customer</i>	<i>Citizen's</i>
Peran pemerintah	<i>Rowing</i>	<i>Steering</i>	<i>Serving</i>
Akuntabilitas	Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas	Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)	Multiaspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional
Struktur organisasi	Birokratik yang ditandai dengan otoritas <i>top-down</i>	Desentralisasi organisasi dengan	Struktur kolaboratif dengan kepemilikan

		kontrol utama berada pada para agen	yang berbagi secara internal dan eksternal
Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator	Gaji dan keuntungan, proteksi	Semangat <i>entrepreneur</i>	Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat

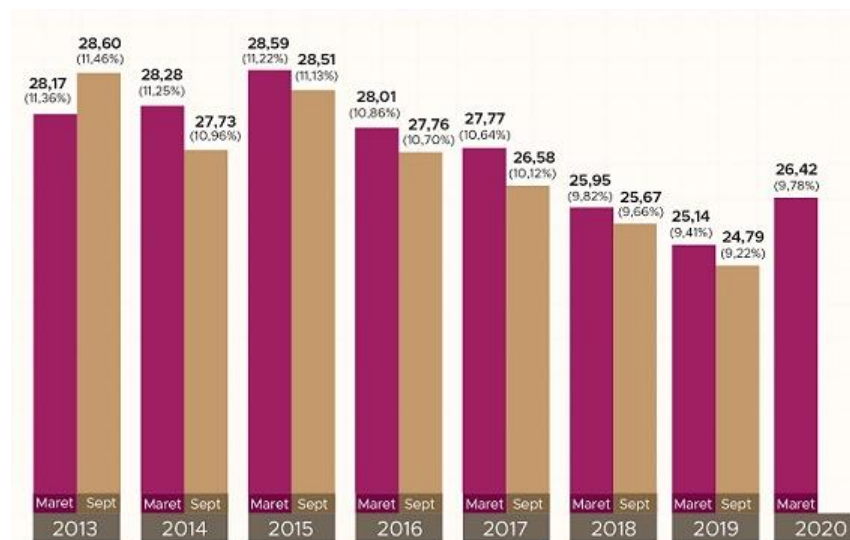
Sumber: Denhardt dan Denhardt (2003: 28-29)

Dasar teoritis paradigma *New Public Service* (NPS) ini dikembangkan dari teori tentang demokrasi, dengan lebih menghargai perbedaan, partisipasi dan pemenuhan hak asasi warga negara. Dalam NPS konsep kepentingan publik merupakan hasil dialog berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut seperti keadilan, transparansi dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Paradigma NPS berpandangan bahwa responsivitas pemerintah lebih diarahkan kepada warga negara (*citizen's*) untuk dapat memberikan pelayanan publik baik pelayanan secara administratif, pelayanan jasa dan pelayanan barang (*public goods*) yang didalamnya termasuk kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mengatasinya, terlebih adanya krisis seperti sekarang ini akibat pandemi sehingga meningkatkan angka kemiskinan.

Mowafi (2015) merumuskan empat konsep kemiskinan yang secara umum banyak digunakan dalam literatur akademik maupun institusi internasional, yaitu kemiskinan yang dilihat dari pendapatan (*income poverty*), kualitas sumber daya manusia (*human poverty*), kehilangan kemampuan (*capabilities deprivation*), dan konsep partisipatori dari orang miskin (*voice of the poor*). Ada beberapa program yang berusaha untuk mengatasi kemiskinan global tetapi belum menunjukkan hasil atau bahkan semakin meningkatkan kadar kemiskinan. Berdasarkan pernyataan dari Jim Young Kim (Presiden *World Bank*) mengungkapkan bahwa sebanyak 736 juta orang

di seluruh dunia masih mengalami kemiskinan parah. Adapun indikatornya ialah warga yang hidup dengan pendapatan di bawah 1,9 dolar AS per harinya. Selain itu, program pengentasan kemiskinan dinilai belum berdampak signifikan dan masih relatif lamban, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kemiskinan di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 9,78%, atau sebanyak 26.424.020 masyarakat Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Angka tersebut mengalami peningkatan 0,37% dari tahun 2019 yang angkanya sebesar 9.22% atau sebanyak 24.785.870 orang. Menurut Badan Pusat Statistik (2020) faktor utama yang memengaruhi adanya peningkatan jumlah masyarakat miskin tersebut adalah Pandemi COVID-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk akan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan.



Sumber: BPS, 2020

Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat

dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang membutuhkan penyelesaian secara tepat dan bilamana bisa, serempak. Selain itu, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut Yacou (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Menurut *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Untuk itu diperlukan kondisi sosial, ekonomi, politik dan kesehatan yang stabil untuk dapat mengurangi permasalahan dinamika sosial terutama permasalahan kemiskinan.

Kemiskinan sebagai salah satu isu global terutama dimasa krisis akibat pandemi COVID-19 menjadi tantangan dan tanggungjawab administrasi publik untuk

dapat memecahkannya. Menurut Frederickson dalam Yumarni (2005) menyatakan bahwa permasalahan kemiskinan menjadi tanggungjawab administrasi publik dalam memberikan pelayanan publik. Administrasi publik menurut Ibrahim dalam Revida (2020:3) adalah seluruh upaya penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah meliputi kegiatan manajemen pemerintah seperti merencanakan, megorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi terhadap suatu pembangunan dengan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat ditengah adanya crisis akibat pandemi yang sangat berdampak pada aspek sosial ekonomi masyarakat miskin.

Dalam rangka upaya perlindungan masyarakat yang miskin dan rentan terhadap dampak sosial ekonomi dari adanya wabah ini pemerintah memberikan sejumlah kebijakan bantuan kepada masyarakat miskin, salah satunya melalui pemberian bantuan sosial. Menurut Kementerian Sosial (2011:15) bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Dalam implementasinya, program bantuan sosial sering mengalami hambatan dilapangan. Hambatan tersebut peneliti simpulkan dari hasil penelitian terdahulu yaitu; (1) Tumpang tindih kebijakan bantuan sosial COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah antar kementerian sehingga mengakibatkan kebingungan dalam impelemntasi (Mufida: 2020); (2) Distribusi bantuan sosial kurang optimal dikarenakan ketidaksiapan pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat menyiapkan sistem pendukung keputusan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial (Hirawan:2020); (3) Ketersediaan data masyarakat miskin/penerima bantuan sosial, dimana data penerima bantuan sosial yang seharusnya setiap tahun dilakukan *update*

dan verifikasi data, sehingga jika terjadi bencana ataupun tidak terjadi bencana, Pemerintah sudah siap dengan data siapa saja yang harus diberikan bantuan sosial sesuai dengan kriteria pemberian bantuan sosial sesuai peraturan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Rahmansyah, 2020).

Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di tingkat bawah. Menurut Ubaidi Saleh (2020) selaku kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa program perlindungan sosial memiliki berbagai bentuk program yang telah diterapkan di Indonesia saat ini, diantaranya adalah jaminan sosial, bantuan sosial, jaring pengaman sosial dan bantuan pemerintah lainnya.

Tabel 1. Jenis Perlindungan Sosial di Indonesia

Jenis Perlindungan Sosial	Program
Jaminan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 2. Jaminan keselamatan kerja; 3. Jaminan pensiun.
Bantuan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan pangan; 2. Program Keluarga Harapan; 3. Kartu Indonesia Pintar.
Jaring Pengaman Sosial	Bantuan sosial insidental yang diberikan ketika krisis ekonomi dan bencana alam untuk menjaga masyarakat miskin yang rentan. Contoh program ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sembako Jabodetabek COVID-19.
Program pemerintah lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidi Listrik; 2. Subsidi LPG; 3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE); 4. Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sumber: Ubaidi Saleh (2020)

Selain itu, Pickens dkk (2009) membagi transfer sosial yang dilakukan di banyak negara di dunia meliputi: (1) *Conditional cash transfer (CCT)*, yaitu pembayaran yang diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dengan syarat penerima bantuan harus melakukan investasi kesehatan dan pendidikan, seperti mengirim anak bersekolah dan memberi imunisasi atau vaksin kepada anak; (2) *Unconditional cash transfer*, yaitu pembayaran yang diberikan kepada penerima manfaat yang ditargetkan tanpa syarat khusus; (3) *Workfare transfer*, yaitu pembayaran untuk program-program penciptaan lapangan kerja yang bertujuan mengurangi pengangguran dan membantu masyarakat agar memiliki pendapatan yang lebih stabil.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang bersifat *Unconditional Cash Transfer*. BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin dan rentan yang bersumber dari Dana Desa. Bantuan ini yang akan disalurkan kepada masyarakat dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa tercantum dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 dan didalam pasal 8A menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Selain kebijakan tersebut, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 32A ayat (3) menyatakan bahwa kriteria penerima bantuan adalah:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja.

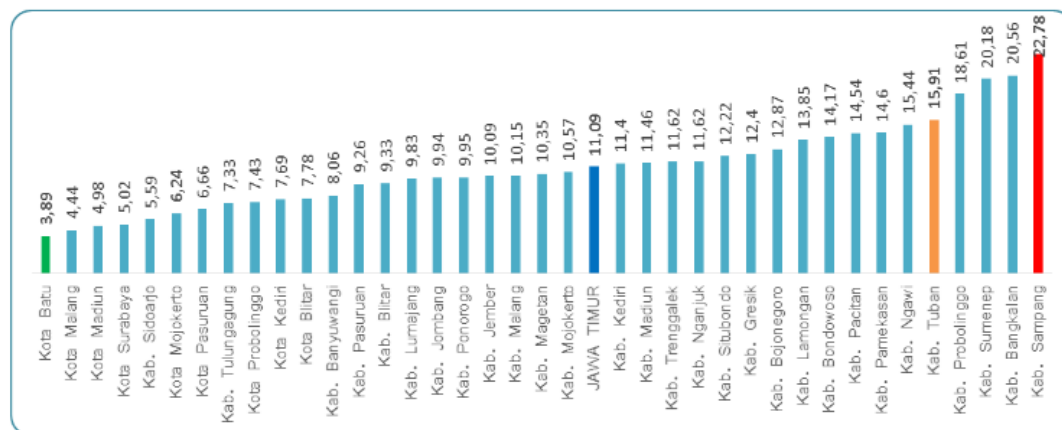
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah pemerintah dalam meminimalisir dampak yang terjadi, baik secara kesehatan, sosial, maupun perekonomian. Dalam penelitian ini Peneliti melihat kebijakan dari proses implementasinya. Menurut Nugroho (2004:158) mengemukakan bahwa perencanaan kebijakan memegang porsi yang penting dalam ketercapaian suatu kebijakan, yakni memegang 60% dari suatu keberhasilan kebijakan yang diambil. 40% lainnya yaitu pada proses implementasinya. Perencanaan yang terkonsep dengan bagus tidak akan berjalan tanpa adanya konsistensi dalam implementasinya. Selain itu, dari konsep-konsep perencanaan rata-rata konsistensi implementasinya hanyalah sebesar 10-20% saja, dari sini kita lihat adanya krusial dalam proses implementasi kebijakan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur menempati posisi pertama jumlah desa penerima BLT Dana Desa yaitu sebanyak 1.339 Desa. Hal ini didasarkan pada kondisi kemiskinan di Jawa Timur yang tinggi dan mengalami peningkatan. BPS Provinsi Jawa Timur mencatat pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tercatat 4.419.100 jiwa (11,09 persen). Bertambahan sebesar 363.100 jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang tercatat sebesar 4.056.000 jiwa (10,20 persen) dari total penduduk. Untuk itu Gubernur Jawa Timur menginstruksikan untuk dapat menyegerakan penyaluran BLT Dana Desa

melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 411.2/3300/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa.

Salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Tuban. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tuban merupakan salah satu dari 5 daerah termiskin di Jawa Timur setelah Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Probolinggo.

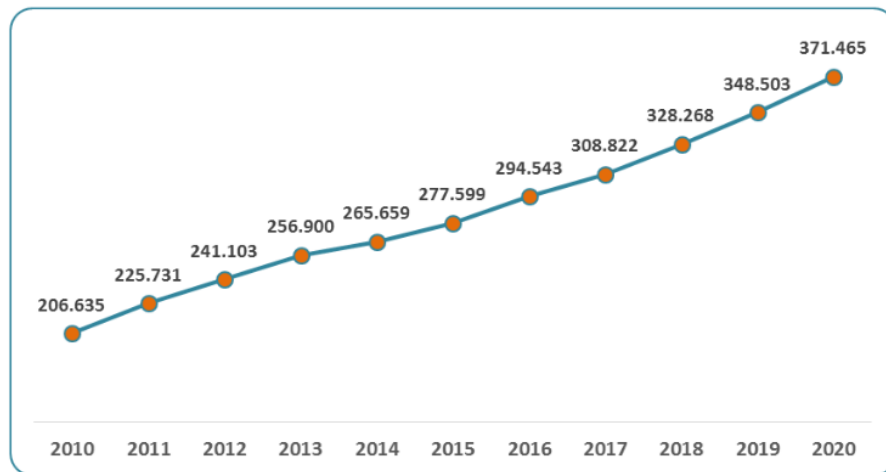
Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur, 2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas 2010-2020

Selain itu angka kemiskinan di Kabupaten Tuban tahun 2020 adalah sebesar 15,91% dan adanya tren peningkatan garis kemiskinan pada pada 10 tahun terakhir mengakibatkan permasalahan yang serius untuk dapat ditangani.

Gambar 3. Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban Maret 2010 – 2020



Sumber: BPS, diolah dari data Susenas 2010 - 2020

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami tren peningkatan selama 10 tahun terakhir. Hal ini diprediskikan akan naik dikarenakan adanya dampak pandemi COVID-19 ini yang sangat memengaruhi pada semua aspek kehidupan masyarakat, terutama kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, adanya bantuan sosial ini juga mengakibatkan rawannya praktek maladministrasi berupa korupsi oleh berbagai pihak. Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ashilly dkk (2020) yang berjudul Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT DD melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi diperlukan inovasi pengelolaan BLT DD secara inovatif dengan metode *cashless* untuk dapat meminimalisir praktek maladministrasi.

Disisi lain, implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Tuban tahun 2020 banyak terjadi permasalahan. Untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) misalnya, Nur Sholihin dalam situs <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/278420/hak-bansos-kemensos-ri-ditilap-dua-tahun-warga-tuban-lapor-polisi> menyatakan bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang pemerintah desa yang

menahan bantuan BPNT selama 2 tahun dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat terjadi karena minimnya sistem pengawasan yang dilakukan berbagai pihak untuk dapat melihat proses implementasi kebijakan BPNT agar tepat kepada warga yang membutuhkan dan tidak dicurangi. Selain itu, Plt Dinas Sosial Kabupaten Tuban dalam situs sumber: <http://bloktuban.com/2020/088/dinsos-akui-bpnt-bermasalah-pada-kualitasjuga> menyatakan bahwa kualitas BPNT yang diterima masyarakat dinilai kurang.

Tidak hanya pada program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH) juga mengalami permasalahan. Dinas Sosial Kabupaten Tuban dalam situs <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/dida-tenola/karut-marut-data-bantuan-bpntdan-pkh-ini-kata-dinsos-tuban-regional-jatim/4> menyebutkan bahwa mereka menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH yang melakukan pemutusan atau pencabutan bantuan kepada masyarakat secara sepihak dan menarik kartu penerima bantuan milik keluarga penerima manfaat yang diputus dan masih terdapat bukti transaksi bantuan uang dari Kementerian Sosial. Dengan demikian dalam implementasi haruslah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar masalah ini dapat diatasi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya adalah permasalahan data. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santoso, SH selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tuban menyatakan bahwa data yang ada di dinas sosial yang digunakan sebagai dasar awal penentuan calon KPM bukan merupakan data yang terbaru dikarenakan banyaknya pemerintah desa yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala sesuai dengan yang diinstruksikan. Hal ini terjadi dikarenakan

kurangnya kapasitas aparat pemerintah desa untuk dapat mengelola sistem kesejahteraan sosial ditingkat desa sehingga data yang ada tidak diperbarui, sehingga nantinya akan memengaruhi efektivitas dari implementasi BLT DD di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi BLT DD di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan di 311 Desa, 33.238 KPM dan mencakup anggaran sebesar Rp. 52.689.013.200.

No.	Jenis	Data Proyeksi	Data riil	Selisih
1.	Jumlah KPM	29.272 KK	33.238 KK	3.966 KK
2.	Anggaran	Rp.52.689.013.200	Rp.61.029.643.700	Rp.8.340.630.500

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa data yang diproyeksikan sebelumnya oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur untuk kabupaten Tuban melampaui batas yang telah ditetapkan. Berdasarkan data diatas, selisih data proyeksi dan data riil adalah sebesar 3.966 KPM dengan selisih anggaran sebesar Rp. 8.340.630.500.

Data tersebut menimbulkan permasalahan baru, dimana jumlah KPM tersebut melampaui batas yang ditetapkan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. Disamping permasalahan data, hal ini juga dinilai memberatkan keuangan desa di berbagai desa di Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anto Wahyudi, S.TP selaku kepala bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tuban menyatakan banyaknya pemerintah desa yang mengeluhkan adanya penambahan waktu penyaluran dari 3 Bulan, kemudian 6 bulan dan yang terakhir 9 bulan. Dalam pembedan Hal ini dinilai memberatkan keuangan desa dikarenakan banyaknya program pembangunan desa yang belum terlaksana dikarenakan adanya perubahan APBDes disetiap desa di Kabupaten Tuban.

Dari permasalahan tersebut dapat dilihat adanya pandemi ini mengakibatkan permasalahan sosial ekonomi di tengah masyarakat, khususnya masyarakat miskin desa. Bantuan sosial yang telah di diberikan pun mengalami berbagai permasalahan teknis dalam implementasinya. Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah dalam memberdayakan dan menjamin kebutuhan hidup masyarakat miskin melalui sejumlah bantuan sosial ditengah menurunnya daya beli masyarakat akibat pelemahan ekonomi nasional dan sehingga masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya dengan layak. Untuk itu penulis ingin mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan masalah bantuan sosial khususnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban?
- 2) Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban.
- 2) Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung, penghambat implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pembaca pada umumnya yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Indonesia.

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Indonesia dengan melihat variabel-variabel implementasi kebijakan, aktor-aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan dan melihat faktor pendukung dan penghambat dari proses implementasi kebijakan serta memberikan sumbangan pemikiran melalui rekomendasi yang diajukan peneliti yang bersumber dari hasil penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu diawali dengan:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri atas penjelasan latar belakang mengenai pokok-pokok permasalahan yang menjabarkan sejumlah kondisi atau situasi yang ditemui saat ini di lapangan, yang diteliti untuk mengantarkan kepada rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan literatur yang terdiri dari teori-teori atau temuan-temuan ilmiah dan buku ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan peneliti sebagai acuan untuk menganalisis data tentang tentang implementasi kebijakan perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 melalui program bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Tuban seperti penelitian terdahulu, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, perlindungan sosial masyarakat, Analisis Stakeholders, Bantuan sosial, Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Kemiskinan, dan Kerangka Konseptual Penelitian.

BAB III ANALISIS *SOCIAL SETTING* PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Kondisi masyarakat desa, Kondisi sosial ekonomi desa, Kondisi keuangan desa.

BAB IV METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan dijelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan uji keabsahan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil-hasil penelitian yang memuat data-data pada fokus penelitian, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan, teori, metodologi penelitian, serta analisis topik terkait serta fakta-fakta yang berhasil ditemukan oleh penulis selama penelitian berlangsung.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pada dasarnya dilakukan dalam rangka melihat masalah dan/atau fenomena yang terjadi dan mencari alternatif atau solusi dalam permasalahan yang diteliti. Salah satu manfaat dari penelitian adalah mampu menjadi sebagai referensi bagi suatu penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini juga tidak terlepas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mana pokok pembahasan berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini dari berbagai aspek. Penelitian tersebut antara lain:

Vinwanath Venkatesh. 2020. *The Impact of COVID-19: A research Agenda to Support People in Their Fight*. Penelitian ini menggunakan penelitian survei dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dampak dari adanya pandemi COVID-19 dari berbagai perspektif. Kajian dilakukan di negara Amerika Serikat sebagai studi kasus penelitian karena merupakan salah satu negara terbesar yang terdampak dari adanya pandemi ini. Pandemi COVID-19 telah menciptakan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada semua aspek, untuk itu sangat tertarik untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% angkatan kerja di Amerika Serikat bekerja di rumah dan/atau dirumahkan secara permanen. Dari tatanan dunia kerja yang mengalami dampak dari adanya pandemic ini mengakibatkan tiga hal, diantaranya adalah *job loss* (kehilangan pekerjaan/PHK), *Job Change* (Perubahan pekerjaan), dan *job outcomes* berupa kinerja berkurang. Dari segi kehidupan sehari-hari mengakibatkan timbulnya permasalahan baru dikarenakan segala aspek kehidupan mengalami ketidakpastian, baik secara ekonomi, sosial dan kesehatan. Kemudian dampak dari kehidupan sehari-hari adalah meningkatnya kasus perselisihan rumah

tangga yang berujung pada perceraian, tekanan karena stress dialami semua kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak yang tidak bisa belajar di sekolah. Di sisi lain, tenaga medis lah yang sangat mengalami tekanan kerja karena adanya masalah ini yang mengakibatkan beban kerja yang bertambah yang mengakibatkan stress karena harus mempertaruhkan nyawa untuk dapat menjalankan tugasnya. Disamping itu, permasalahan sosial juga menjadi fokus utama yang harus diselesaikan pemerintah, karena meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akan mengakibatkan permasalahan baru apabila tidak segera diatasi Untuk itu diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah untuk dapat menyelamatkan segala aspek yang terdampak untuk dapat meminimalisir permasalahan yang akan terjadi secara tepat guna, tepat fungsi dan tepat sasaran.

Muhtar, 2015. Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk masyarakat miskin di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis kebijakan terkait. Kajian dilakukan di Kota Jambi, karena termasuk salah satu daerah di Provinsi Jambi, di mana jumlah rumah tangga miskinnya terbanyak. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses implementasi kebijakan ini pada saat tahap pendataan didapatkan fakta bahwa pendataan masyarakat penerima bantuan ini belum lengkap, terkait keberadaan, jenis ketunaan sosial, dan identitas mereka. Untuk itu, verifikasi dan validasi data menjadi krusial dan harus dilakukan dalam upaya memperoleh identitas penerima bantuan. Selain itu, adanya perubahan data yang bersifat dinamis karena kematian, kelahiran dan sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan layanan kesehatan, sehingga dapat dialihkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam

proses validasi data Bappeda Kota Jambi melakukan inisiatif untuk menjadikan ketua RT/RW setempat sebagai petugas validasi data karena dari sosial ekonomi, ketua RT/RW lebih memahami kondisi warganya, sehingga data penerima yang dihasilkan tepat sasaran. Melihat data kemiskinan yang ada dan diverifikasi sesuai dengan pendekatan sosial sangat perlu dilakukan mengingat kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat yang selalu mengalami perubahan sehingga dapat diverifikasi dengan tepat dan cepat.

Edi Suharto, 2015. Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah “induksi analitik” (*analytic induction*), yakni suatu penelitian kualitatif yang berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi atau definisi yang bersifat umum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk dapat mengetahui peranan perlindungan sosial melalui bantuan sosial bersyarat dalam bentuk cash transfer untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat miskin untuk dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Program ini didukung oleh berbagai *stakeholders* diantaranya adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial, Kementerian Agama dan PT Pos Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa program ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dengan memberikan bantuan dibidang pendidikan dengan memberikan akses dan sarana pendidikan berupa baik buku sekolah dan peralatan. Kemudian pada aspek kesehatan didapat hasil bahwa program ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan

kesehatan terutama untuk Ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas dan anak-anak usia sekolah dan memberikan paket sembako untuk memastikan dan memperbaiki gizi anak-anak dan ibu mengandung dan menyusui. Selain itu dengan adanya bantuan ini juga meningkatkan daya beli masyarakat perkapita. Namun demikian, PKH perlu memperhatikan beberapa area implementasi yang perlu diperbaiki. Area tersebut antara lain evaluasi dan diseminasi, mekanisme pengaduan, serta koordinasi di antara pihak terkait. Kegiatan evaluasi dan diseminasi harus menjadi bagian yang integral pada keseluruhan program, yang dilaksanakan secara terus menerus agar dua aspek layanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Junaidi dan Kariono, 2013. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana suatu implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan ditingkat paling bawah yaitu untuk dapat melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari karena terkena dampak secara ekonomi mengenai kebijakan pencabutan subsidi BBM. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan bantuan sosial tanpa syarat yang diberikan pemerintah untuk dapat meminimalisir dampak sosial ekonomi masyarakat miskin karena adanya kebijakan penghapusan subsidi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa program ini berjalan di tingkat kabupaten melalui tahap-tahap Program Penyaluran BLT dimulai dengan sosialisasi, verifikasi, pembagian Kartu, pencairan dana, dan terakhir pelaporan kegiatan. Namun kenyataan di lapangan masih terdapat kendala yang dihadapi dikarenakan program ini berjalan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sesuai

dengan *Standart Operasional Prosedur* (SOP), sehingga menghambat proses pencairan dana program karena petugas yang kurang memahami prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, masalah pemutakhiran data juga kurang valid, dimana masih terdapat warga yang sudah meninggal terdata sebagai penerima bantuan sehingga pada tahap validasi data tidak semua desa benar-benar melakukannya. Pada proses sosialisasi ditingkat desa juga tidak dilaksanakan oleh semua desa secara formal, sehingga banyak masyarakat yang masih belum tahu mengenai bantuan sosial ini. Hal ini perlu dilakukan perbaikan secara terus-menerus untuk dapat meningkatkan efektivitas dari program ini sehingga dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Huck-ju Kwon dan Woo-rim Kim, 2015. *The Evolution of Cash Transfers in Indonesia: Policy Transfer and National Adaptation*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para pembuat kebijakan dengan menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur. Data sekunder diperoleh melalui data dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui evolusi kebijakan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, baik bantuan bersyarat maupun tidak untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan perlindungan sosial terutama bantuan sosial mampu nyai dua tujuan yang bersifat laten dan manifest. Tujuan laten dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi permasalahan sosial berupa kemiskinan, kesehatan, dan pengangguran. Sedangkan fungsi manifest dari kebijakan ini adalah untuk dapat memobilisasi dukungan politik dalam pemilihan yang dilakukan oleh calon Presiden untuk menarik perhatian public dan mendapatkan suara

dalam pemilihan umum (Pemilu). Politisasi bantuan sosial sering ditemukan terutama apabila mendekati masa Pemilu. Selain itu, kebijakan ini dinilai belum memberi dampak yang signifikan terhadap angka kemiskinan di Indonesia secara statistik. Untuk itu, perlu dilakukan kajian mendalam sebelum kebijakan ini diterapkan agar nantinya kebijakan ini dapat menjadi kebijakan yang tepat fungsi dan tepat sasaran untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang, sehingga perlu adanya evaluasi mendalam mengenai implementasi kebijakan ini untuk dapat menjadi rekomendasi kebijakan serupa di masa yang akan datang.

Muhammad Khalid Anser, dkk. (2020). *Does communicable diseases (including COVID-19) may increase global poverty risk? A cloud on the horizon*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *System dynamics* dengan melakukan pemodelan terhadap fenomena kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau literatur ilmiah tentang pengaruh penyakit mematikan terhadap kemiskinan dikarenakan perawatan kesehatan sangat mahal seiring dengan peningkatan intensitas penyebaran COVID-19. Berdasarkan hasil studi ini berpendapat bahwa populasi yang tinggi, daerah kepadatan, meningkatkan angka kemiskinan, dan pasien yang sudah sakit HIV, TB, dan penyakit parasit lainnya sebagian besar memengaruhi COVID-19. Perlunya kebijakan perawatan kesehatan yang efektif dan strategi pencegahan akan sangat membantu untuk meminimalkan timbulnya coronavirus di area daerah kumuh dengan kebijakan sosial yang menjauhkan dan kebijakan sanitasi lintas negara. Pengaruh COVID-19 sangat luar biasa mematikan dan itu mempengaruhi baik untuk negara yang sudah maju maupun yang sedang berkembang. Negara-negara maju dapat memiliki strategi layanan kesehatan yang lebih baik untuk mengatasi penyakit virus zoonosis termasuk COVID-19, sementara negara-negara berkembang, seperti negara-negara Asia, sulit untuk mengatasi dan

melakukannya. Karena kurangnya akses ke fasilitas dasar, yang menyebabkan tingkat kematian yang tinggi terlepas dari ketersediaan perawatan dan vaksinasi menjadikannya situasi yang lebih rentan di negara-negara berpenghasilan rendah. Faktor utama yang memengaruhinya adalah termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi, konflik politik dan ketidakstabilan, kekerasan, buta huruf, laboratorium diagnostik yang buruk, dan lainnya. Masalahnya sangat parah dan dampaknya bisa lebih ditekankan sumber daya ekonomi dan kesehatan negara yang perlu ditangani dan mengerti dalam waktu singkat. Studi ini menyajikan beberapa literatur umum terkait dengan kemiskinan dan penentu utama untuk menilai reformasi pemerintah ke arah pertumbuhan untuk negara-negara berkembang.

Antonio Devito, Juan Petro Gomez. 2020. *Estimating the COVID-19 cash crunch: Global evidence and policy*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *sistem Dynamics* dengan melakukan pemodelan terhadap fenomena yang dapat menghasilkan skenario kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan krisis kesehatan COVID-19 dapat memengaruhi likuiditas perusahaan terdaftar di 26 negara, salah satunya Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun distribusi observasi tidak merata di seluruh negara, akan tetapi negara-negara yang diteliti adalah berdasarkan sampel yang relevan dengan kombinasi berbagai kategori negara yang telah dipilih. Risiko likuiditas yang timbul dari pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kerugian yang besar dan berdampak pada pemutusan kerja karyawan diberbagai lini tingkatan dan perusahaan. Dengan demikian permasalahan ini menimbulkan permasalahan baru berupa permasalahan sosial seperti pengangguran meningkat dan berindikasi pada penurunan kesejahteraan masyarakat secara luas. Krisis ini menimbulkan permasalahan dibidang usaha yang sebaiknya pemerintah membuat

kebijakan stimulus ekonomi dan dunia usaha agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Irfan Ullah. 2020. *COVID-19 suicides in Pakistan, dying off not COVID-19 fear but poverty? – The forthcoming economic challenges for a developing country*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan mengumpulkan data-data sekunder yang dianalisis dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kematian akibat dari Pandemi penyakit COVID-19 telah menjadi penyebab utama tantangan kesehatan mental di seluruh dunia, termasuk Pakistan. Penderitaan mental yang tak terbayangkan seperti depresi, panik, ketakutan, kecemasan, stres, trauma, penyesuaian diri gangguan, dan lain-lain dilaporkan pada orang umum serta perawatan kesehatan professional. Selain itu, setiap adanya permasalahan global, kerusakan dalam siklus ekonomi mengarah ke produk domestik bruto yang lebih rendah dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi di suatu negara. Krisis COVID-19 juga mengancam dan memukul negara berkembang seperti Pakistan, tidak hanya sebagai krisis kesehatan masyarakat dalam jangka pendek tetapi sebagai krisis ekonomi dan sosial yang menghancurkan segala sendi kehidupan, mengingat saat ini, Pakistan menghadapi banyak tantangan termasuk kemiskinan, kerawanan pangan dan alam dan buatan manusia yang tak henti-hentinya. Negara ini memiliki 24% dari total populasi yang hidup di bawah Garis Kemiskinan Nasional dan 38,8% Miskin menurut Indeks Multidimensi Kemiskinan. Pada saat pandemi COVID-19, data statistik seperti diatas haeuslah dipandang sebagai alarm mengingat status pengangguran yang meningkat, kemiskinan dan kelaparan di bulan-bulan yang akan datang, yang merupakan penderitaan kesehatan mental (juga penyelesaian bunuh diri, dalam kasus ekstrim). Tapi, kami tidak ada perkiraan berapa periode pandemi COVID-19 akan terjadi bertahan, berapa banyak

orang yang harus kelaparan, berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan, dan apa yang akan menjadi akhir dari krisis ini. Hasil penelitian dan temuan ini diharapkan akan membantu dalam melindungi masyarakat yang tidak mampu baik secara nasional maupun internasional.

Baso Iping, 2020. Perlindungan Sosial melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi COVID-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis kebijakan perlindungan sosial melalui program bantuan langsung tunai di masa pandemi dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perspektif ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlindungan sosial telah berlangsung lama sejak masa orde baru, namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu adanya COVID-19 ini mengakibatkan adanya diperparah permasalahan kemiskinan sehingga pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan tersebut mengalami permasalahan dalam implementasinya, baik bersifat konflik vertikal maupun horizontal. Dampak vertikal yang dialami adalah adanya persepsi masyarakat bahwa pemerintah tidak adil dalam memberikan bantuan sosial COVID-19 ini, dikarenakan setiap program memberikan nominal yang berbeda. Dampak horizontal yang dirasakan adalah adanya kecemburuan dan sosial antar masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai banyak menimbulkan pelanggaran, salah satunya korupsi. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan yang matang dalam memutuskan kebijakan agar dapat meminimalisir permasalahan dan program bantuan ini agar tepat guna dan tepat sasaran.

Binar Dwiyanto Pamungkas, dkk. 2020. Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data-data sekunder dalam proses analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui alokasi dana desa di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2020 meliputi alokasi untuk pencegahan dan penanganan COVID-19; padat karya tunai desa; bantuan langsung tunai dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dana desa di 157 desa di kabupaten sumbawa adalah sebesar Rp.148.330.675.000 dari total anggaran tersebut sebanyak Rp. 28.141.939.407 dialokasikan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa, sebanyak Rp. 3.634.100.020 digunakan untuk pembentukan tim relawan dan peralatan pencegahan COVID-19, dan Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Dana Desa) di Kabupaten Sumbawa dengan jangka waktu penyaluran BLT dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020 sampai dengan Juni 2020, Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulan, dengan demikian total Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Dana Desa) dari 157 desa di Kabupaten Sumbawa mampu mengakomodir sebanyak 24.772 Kepala Keluarga penerima bantuan.

Ibraheem M. Karaye dkk, (2020). *The Impact of Social Vulnerability on COVID-19 in the U.S.: An Analysis of Spatially Varying Relationships*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan *Multiple Linear Regression*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak dari adanya pandemi COVID-19 dari perspektif sosial, terutama permasalahan kerentanan sosial masyarakat termarginalkan di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana dan keadaan darurat, baik itu alam maupun antropogenik, berdampak secara mendalam dan tidak adil terhadap kesehatan penduduk yang rentan secara

sosial. Peristiwa tersebut menggambarkan ketidakadilan di berbagai bidang termasuk akses ke perumahan dan pendidikan yang berkualitas serta masalah keadilan ekonomi dan lingkungan yang menciptakan kondisi yang membuat sulit untuk menjaga kesehatan. Kebijakan *The Families First Coronavirus Response Act* disahkan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terkait dengan COVID-19, membuat ketentuan untuk cuti sakit yang dibayar kepada beberapa karyawan serta untuk memberikan pengujian gratis, bantuan nutrisi, dan tunjangan pengangguran yang diperluas. Namun kebijakan tersebut tidak mengcover penduduk imigran yang jumlahnya sangat besar di Amerika. Untuk itu disituasi seperti ini harusnya ada program penjamin penduduk akan penyediaan perawatan kesehatan universal tanpa pertanyaan tentang kependudukan, melihat penyebaran yang begitu masif di Amerika Serikat.

Tabel 2. Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan
1.	Vinwanath Venkatesh, 2020. <i>The Impact of COVID-19: A research Agenda to Support People in Their Fight.</i>	Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19	penelitian survei dengan pendekatan kualitatif	Pandemi COVID-19 telah menciptakan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada semua aspek, untuk itu sangat tertarik untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% angkatan kerja di Amerika Serikat bekerja di rumah dan/atau dirumahkan secara permanen. Dari tatanan dunia kerja yang mengalami dampak dari adanya pandemic ini mengakibatkan tiga hal, diantaranya adalah <i>job loss</i> (kehilangan pekerjaan/PHK), <i>Job Change</i> (Perubahan pekerjaan), dan <i>job outcomes</i> berupa kinerja berkurang.	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan. Selain itu dalam jurnal ini membahas dampak secara luas dari adanya covid dan membahasnya dari berbagai perspektif.	Persamaan terletak pada dampak yang timbul karena COVID-19, yaitu meningkatkan permasalahan sosial berupa kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkannya angka kriminalitas.
2.	Muhtar, 2015. Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Jaminan Kesehatan bagi Penduduk	Mengetahui implemantasi kebijakan perlindungan sosial dibidang kesehatan bagi masyarakat	Kualitatif deskriptif	Dalam penelitian ini permasalahan utama dalam proses implementasi kebijakan adalah sinkronisasi dan validasi data keluarga penerima manfaat, dan data yang diperoleh tidak valid. Pemerintah daerah melalui dinas sosial tidak	Dalam penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan pendataan penerima bantuan sosial, sehingga tidak membahas	Penelitian ini berfokus pada perlindungan sosial masyarakat miskin dengan memberikan sejumlah bantuan sosial berupa

	Miskin di Provinsi Jambi	miskin di Provinsi Jambi		melakukan update data sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 untuk dapat mengupdate data setidaknya enam bulan sekali. Terdapat beberapa strategi yang digunakan pemerintah daerah untuk menatasinya yaitu dengan memperbaiki pola komunikasi antar stakeholders dan mengembangkan sumber daya manusia terkait.	detail kebijakan apa saja yang dibuat dan diimplementasikan terkait dengan judul penelitian.	pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat miskin, salah satunya yaitu kesehatan.
3.	Edi Suharto, 2015. Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan	Mengetahui seberapa besar peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi kemiskinan.	induksi analitik (<i>analytic induction</i>) dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa masih terdapat permasalahan didalam implementasi kebijakan PKH khususnya dalam pemutakhiran data penerima bantuan, koordinasi antar pemangku kepentingan dan komunikasi pengaduan masyarakat. Yang menarik adalah cakupan program ini luas, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang sebelumnya dan diperlukan pendampingan secara massif dalam proses monitoring dan evaluasi penerima manfaat bantuan.	Perbedaan terletak pada metode penelitian, dimana dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian induksi analitik sedangkan didalam tesis ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selain itu program bantuan sosial yang diteliti berbeda.	Program bantuan ini sama-sama mengadopsi konsep dari kebijakan sebelumnya yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan melakukan pendekatan dengan situasi dan kondisi yang sekarang sehingga relevan terhadap kondisi sosial masyarakat pada saat ini.
4.	Junaidi dan Kariono, 2013. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana suatu	deskriptif dengan pendekatan kualitatif	mengetahui bagaimana suatu implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan ditingkat paling bawah yaitu untuk dapat melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya	Perbedaan dari penelitian ini adalah tujuan dan sasaran dari program bantuan sosial pada jurnal ini adalah untuk	Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan.

	Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur	implemetasi kebijakan pengentasan kemiskinan ditingkat paling bawah yaitu untuk dapat melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar		sehari-hari karena terkena dampak secara ekonomi mengenai kebijakan pencabutan subsidi BBM. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan bantuan sosial tanpa syarat yang diberikan pemerintah untuk dapat meminimalisir dampak sosial ekonomi masyarakat miskin karena adanya kebijakan penghapusan subsidi.	masyarakat miskin yang membutuhkan dan terkena dampak dari adanya kebijakan penghapusan subsidi BBM pada tahun 2005, sedangkan pada program BLT-DD ini adalah diperuntukkan bagi masyarakat miskin terdampak COVID-19.	
5.	Muhammad Khalid Anser, dkk, 2020. <i>Does communicable diseases (including COVID-19) may increase global poverty risk? A cloud on the horizon.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau literatur ilmiah tentang pengaruh penyakit mematikan terhadap kemiskinan dikarenakan perawatan kesehatan sangat mahal seiring dengan peningkatan intensitas penyebaran COVID-19.	System dynamics	Berdasarkan hasil studi ini berpendapat bahwa populasi yang tinggi, daerah kepadatan, meningkatkan angka kemiskinan, dan pasien yang sudah sakit HIV, TB, dan penyakit parasit lainnya sebagian besar memengaruhi COVID-19. Perlunya kebijakan perawatan kesehatan yang efektif dan strategi pencegahan akan sangat membantu untuk meminimalkan timbulnya coronavirus di area daerah kumuh dengan kebijakan sosial yang menjauhkan dan kebijakan sanitasi lintas negara.	Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan dan di jurnal ini membahas dampak sosial dari adanya penyakit yang berbahaya.	Persamaannya terletak pada pembahasan dampak sosial ekonomi dari adanya wabah COVID-19

6.	Huck-ju Kwon and Woo-rim Kim, 2015. <i>The Evolution of Cash Transfers in Indonesia: Policy Transfer and National Adaptation</i>	Mengetahui dan mendeskripsikan evolusi bantuan sosial di Indonesia	Deskriptif kualitatif	Membahas perlindungan sosial dalam bidang bantuan sosial melalui <i>cash transfer</i> di Indonesia dari masa ke masa dan bagaimana kebijakan ini menjadi instrumen dalam pilihan publik sebagai janji politik dan solusi mengatasi permasalahan kemiskinan walaupun implementasinya belum memberikan dampak yang signifikan.	Fokus dalam penelitian ini adalah evolusi bantuan sosial yang diberikan pemerintah dari masa ke masa dan bentuk yang berbeda, seperti bantuan beras miskin, Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, dan yang lainnya dalam menanggulangi kemiskinan yang semakin kompleks	Persamaan dari penelitian ini adalah bentuk program yang dibahas sama, yaitu tanggap bantuan sosial untuk masyarakat miskin.
7.	Antonio Devito, Juan Petro Gomez. 2020. <i>Estimating the COVID-19 cash crunch: Global evidence and policy</i>	Mengetahui bagaimana hubungan krisis kesehatan COVID-19 dapat memengaruhi likuiditas perusahaan terdaftar di 26 negara, salah satunya Indonesia.	System Dynamics	Membahas hubungan krisis kesehatan COVID-19 yang dapat memengaruhi likuiditas perusahaan terdaftar di 26 negara, salah satunya Indonesia. Banyak perusahaan mengalami kerugian yang besar dan berdampak pada pemutusan kerja karyawan diberbagai lini tingkatan dan perusahaan dan menimbulkan permasalahan sosial berupa pengangguran dan kemiskinan.	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan	Membahas permasalahan sosial berupa kemiskinan dan perlunya kebijakan pemerintah untuk mengatasinya.
8.	Irfan Ullah, 2020. <i>COVID-19 suicides in Pakistan, dying off not COVID-19 fear but poverty? –</i>	Mengetahui dan mendeskripsikan kasus kematian karena penyakit mental kemiskinan di	Studi Pustaka	Membahas Krisis COVID-19 juga mengancam dan memukul negara berkembang seperti Pakistan, tidak hanya sebagai krisis kesehatan masyarakat dalam jangka pendek tetapi sebagai krisis ekonomi dan	Perbedaan tertletak pada metode penelitiannya, selain itu fokus penelitian ini pada	Persamaan terletak pada imbas dari adanya covid yang berpengaruh pada kehidupan

	<i>The forthcoming economic challenges for a developing country</i>	negara berkembang.		sosial yang menghancurkan segala sendi kehidupan, mengingat saat ini, Pakistan menghadapi banyak tantangan termasuk kemiskinan, kerawanan pangan dan alam dan buatan manusia yang tak henti-hentinya	permasalahan secara mental	masyarakat secara umum.
9.	Baso Iping, 2020. Perlindungan Sosial melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi COVID-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial.	Menganalisis kebijakan perlindungan sosial melalui program bantuan langsung tunai di masa pandemi dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perspektif ekonomi dan sosial.	Kualitatif studi pustaka	Penelitian ini membahas pelaksanaan program perlindungan sosial telah berlanagsung lama sejak masa orde baru, namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu adanya COVID-19 ini mengakibatkan adanya perperparah permasalahan kemiskinan sehingga pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT).	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan pada jurnal ini pada tinjauan ekonomi dan sosial. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakannya dalam rangka perlindungan sosial.	Persamaan terletak pada metode penelitian dan juga pada program kebijakan yang dibahas
10.	Binar Dwiyanto Pamungkas, dkk. 2020. Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa	mengetahui alokasi dana desa di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2020 di Kabupaten Sumbawa	Kualitatif deskriptif	Penelitian ini membahas alokasi dana desa di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2020 meliputi alokasi untuk pencegahan dan penanganan COVID-19; padat karya tunai desa; bantuan langsung tunai dana desa.	Perbedaan terletak pada fokus pembahasan, fokus pembahasan pada jurnal ini adalah alokasi penggunan dana desa, sedangkan pada penelitian ini adalah kebijakan BLT Dana Desa	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

11.	Ibraheem M. Karaye dkk, 2020. <i>The Impact of Social Vulnerability on COVID-19 in the U.S.: An Analysis of Spatially Varying Relationships</i>	mendeskrripsikan dampak dari adanya pandemi COVID-19 dari perspektif sosial, teurtama permasalahan kerentanan sosial masyarakat termarjinalkan di Amerika Serikat	kuantitatif dengan <i>Multiple Linear Regression</i>	COVID-19 berdampak secara mendalam dan tidak adil terhadap kesehatan penduduk yang rentan secara sosial. Peristiwa tersebut menggambarkan ketidakadilan di berbagai bidang termasuk akses ke perumahan dan pendidikan yang berkualitas serta masalah keadilan ekonomi dan lingkungan yang menciptakan kondisi yang membuat sulit untuk menjaga kesehatan.	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan	Persamaan pada pembahasan mengenai pentingnya perlindungan sosial kelompok rentan sosial
12.	Carly Erfly Fernando Maun, 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin terkena dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Tuluun Tarenan Kabupaten Minahasa Selatan	Mendeskrripsikan efektivitas BLT Dana Desa terutama mengenai ketepatan waktu dan ketepatan sasaran.	Kualitatif deskriptif	Dilihat efektifitas dari program tersebut terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa di Desa Talaitad, dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Sedangkandarisiketepatan menentukan pilihan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh hukum tua dan berdasarkan hasil data sekunder dilaporkan menyatakan demikian. Dan untuk aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, scope penelitian dan fokus penelitian	Persamaan terletak pada implementasi BLT Dana Desa sebagai respon dampak pandemi Covid-19

				Desa Talaitad sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan.		
13.	Ashilly Achidsti dkk, 2020. Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT DD Melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi	Mendesripsikan praktik tat kelola pendataan hingga penyaluran BLT DD dalam mencegah adanya praktik korupsi.	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya untuk meminimalisir adanya penyelewengan penyaluran BLT DD melalui pasardesa.id melalui berbagai tahapan untuk meningkatkan akuntabilitas dan terukur.	Perbedaan pada fokus penelitian, scope penelitian dan lokasi penelitian	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai BLT dana desa

Sumber: Diolah oleh penulis, 2020

Meskipun memiliki kesamaan penelitian dalam studi kebijakan perlindungan sosial melalui bantuan sosial, penelitian Muhtar (2015) yang membahas Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, Edi Suharto (2015) menjelaskan Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia melalui kebijakan Program Keluarga Harapan, Junaidi dan Kariono (2013) yang membahas Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur, Huck-ju Kwon and Woo-rim Kim (2015) mendeskripsikan evolusi kebijakan bantuan sosial *cash transfer* dan adaptasinya di Indonesia, Baso Iping (2020) yang membahas Perlindungan Sosial melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi COVID-19 dilihat dari Perspektif Ekonomi dan Sosial, Binar Dwiyanto Pamungkas, dkk (2020) yang menjelaskan mengenai Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, kesamaan dalam lingkup studi mengenai dampak COVID-19 dibidang sosial juga dijelaskan, seperti penelitian Vinwanath Venkatesh (2020) adalah tentang dampak COVID-19 dalam perjuangan masyarakat dalam mengatasi dampak sosial pandemi, Muhammad Khalid Anser, dkk (2020) menjelaskan tentang dampak pandemic terhadap daya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, Antonio Devito dan Juan Petro Gomez (2020) menjelaskan mengenai dampak COVID-19 dalam dunia usaha dan mempengaruhi likuiditas perusahaan di dunia, dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja diberbagai perusahaan segala sektor, Irfan Ullah (2020) juga menjelaskan mengenai dampak COVID-19 dalam peningkatan kasus penyakit mental masyarakat, Ibraheem M. Karaye dkk (2020) menjelaskan mengenai dampak COVID-19 yang rentan sosial dan masyarakat termarginalkan di Amerika Serikat, Sedangkan penelitian ini adalah membahas

mengenai Dampak COVID-19 dalam perspektif sosial masyarakat miskin melalui implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 belum banyak dilakukan, dikarenakan adanya permasalahan pandemi ini belum lama muncul. Penelitian mengenai dampak COVID-19 lebih banyak dilakukan pada aspek kesehatan/medis dan aspek ekonomi dibandingkan dampak dari aspek sosial masyarakat. Dengan adanya perlindungan sosial, terutama mengenai bantuan sosial di masa pandemi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif, tepat guna dan tepat sasaran.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

2.2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Sejatinya kehidupan masyarakat sehari-hari ditentukan dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Menurut Dye (2011:1) kebijakan publik merupakan “*Public policy is what government do, why they do it, and what difference it makes*”. (kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuatnya berbeda). Menurut Carl Friedrich (dalam Indiyahono, 2017: 18) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah sendiri dalam lingkungan tertentu berhubungan dengan adanya hambatan atau permasalahan dan mencari peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Nugroho juga (2018:207) mendefinisikan kebijakan publik sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Dengan kata lain menurut Nugroho, kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut Islamy (2004:2) kebijakan publik adalah tindakan yang di tetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pada hakekatnya kebijakan publik mendasar pada paham kebijakan publik harus selalu mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Dari pemahaman diatas memiliki beberapa implikasi, yakni:

- a. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata;

- b. Kebijakan publik senantiasa ditujukan bagi seluruh anggota masyarakat;
- c. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- d. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Sementara menurut Dan Amara Raksasataya dalam Islamy (2004:7-18) menyatakan kebijakan sebagai salah satu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen yakni: taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang di inginkan, penemuan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik dan strategi dan identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. Dari beberapa macam pengertian kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu strategi untuk dapat melakukan sesuatu tindakan atau tidak yang dilaksanakan sebagai tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan demi kepentingan masyarakat secara luas. Untuk itu kebijakan yang dibuat haruslah berkualitas untuk dapat menetapkan tindakan sesuai dengan tujuan dan tidak ada maksud lain dari kebijakan yang dibuat, melainkan hanya untuk kepentingan publik.

2.2.1.2 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Pada dasarnya interpretasi kebijakan publik dikemukakan secara tradisional oleh para ilmuwan politik. Beberapa kategori dari kebijakan tersebut dapat dibedakan menjadi berapa jenis kebijakan (Subarsono, 2005:19), yakni:

- a. Kebijakan substansif, misalnya: kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan sebagainya

- b. Kebijakan menurut kurun waktu tertentu, misalnya: kebijakan masa reformasi kebijakan masa Orde Baru.
- c. Kelembagaan, misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen.

Menurut sudut pandang Nugroho jenis-jenis kebijakan dibedakan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sudut pandang Nugroho dalam Pasolong (2010:40) kebijakan publik dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni:

- a. Kebijakan yang bersifat meso, yakni kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan;
- b. Kebijakan yang bersifat makro, yakni kebijakan yang bersifat umum;
- c. kebijakan yang bersifat mikro, yakni kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan dan implementasi dari kebijakan di atasnya.

2.2.1.3 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Easton yang dikutip dalam Wahab (2014: 18) menjelaskan bahwa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dipikirkan, didesain, dirumuskan dan diputuskan oleh orang-orang yang memiliki otoritas dalam sistem politik adalah para eksekutif, legislator hakim, administrator, monarki dan sejenisnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, ciri-ciri kebijakan publik menurut Wahab (2014:20-23) adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sekedar bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak, asal-asalan dan serba kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern pada umumnya bukan suatu tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan.

- 2) Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan pula diikuti dengan keputusan-keputusan/ petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkutan paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya.
- 3) Kebijakan itu nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, memberantas korupsi, memberantas buta aksara, menggalakan program keluarga berencana dan menggalakan program perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Kebijakan publik bersifat positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk yang negatif, ia kemungkinan akan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

2.2.1.4 Proses Kebijakan Publik

Dalam pembuatan sebuah kebijakan tidak terlepas dari dari suatu proses. Sehingga proses sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan. Menurut Winarno (2005: 28-30) dalam sebuah kebijakan publik ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam rangka membuat kebijakan publik, sebagai berikut yaitu:

- 1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat mendapatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah tersebut berkompetisi terlebih dahulu agar dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Sehingga beberapa masalah akan masuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan.

2) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari berbagai alternatif kebijakan yang sudah di tawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari sekian banyak alternatif tersebut diadopsi dan atau di angkat dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan

3) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah ini berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk diambil untuk dipilih menjadi alternatif yang baik untuk memecahkan masalah

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan baik, apabila program tidak diimplementasikan. Kebijakan yang ambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial manusia. Oleh sebab itu yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilandasakan oleh

badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Beberapa implementasi kebijakan mendapatkan dukungan dari pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bergantung

5) Tahap Penilaian (Evaluasi) Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauhmana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih dampak yang diinginkan.

Kebijakan publik, ada dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Sebab hal yang ada di dunia ini tentu memiliki tujuannya. Jika memahami administrasi publik, maka pada bagian ini kita akan mencoba memahami tentang kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah sebuah perpaduan dari pengertian kebijakan dan konsep dari kebijakan publik itu sendiri. Proses kebijakan publik selalu mengedepankan beberapa tahap yang berhasil dalam pembuatan kebijakan untuk publik. Dalam proses kebijakan akan menghasilkan sebuah kebijakan yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang sedang terjadi.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan adalah salah satu proses tahapan dalam kebijakan publik. Menurut Hinggis dalam Pasolong (2013:57) mendefinisikan “implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi”. Menurut Grindle dalam Pasolong (2013:57-58) “implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya”. Menurut Widodo (2017:88) “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan”. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2017:87) yaitu:

“To understand what actually happens after a programs is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which in cluded both the effort to administer and the substantive impacts on people and events”. (Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian).

Pendapat lain disampaikan Darwin dalam Widodo (2017:89) “persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan ada empat hal yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi,

interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik. Sedangkan menurut Wahab (2015:136) implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab kepada semua kelompok sasaran melainkan juga kepada jaringan-jaringan politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak yang terlibat. Pendekatan implementasi kebijakan membongkar stagnansi kebijakan untuk mendekatinya dalam kerangka pendekatan politik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Santoso (2010:130) dalam merumuskan asumsi implementasi kebijakan dalam perspektif politik yaitu:

“Implementasi sebuah kebijakan bisa jadi telah direncanakan secara cermat menurut organisasi prosedur, dan manajemen yang tepat, dan menghasilkan perilaku sebagaimana diharapkan. Tetapi jika itu semua mengabaikan realitas kekuasaan, misalnya: kemampuan kelompok-kelompok yang menentang kebijakan tersebut untuk ‘mengganggu’ kebijakan tersebut, maka kebijakan itu bisa jadi akan gagal.”

Pendapat tersebut mendeskripsikan bahwa pemaknaan terhadap implementasi kebijakan dalam era zaman sekarang lebih pada mensistensikan antara implementasi sebagai proses administrasi juga sebagai proses politik. Menurut Grindle dalam Santoso (2010:126-127) pembahasan mengenai implementasi kebijakan menyangkut dua hal. Pertama, soal *Policy Content* yang dimaknai sebagai produk kebijakan yang memuat tujuan dan misi kebijakan yang telah dirumuskan dari *policy making* ; kedua, sedangkan *Policy Context* dimaknai segala representasi lingkungan di mana suatu proses kebijakan, termasuk implementasi berlangsung. Kesimpulan dari pendapat ahli diatas bahwa implementasi kebijakan adalah proses mentransformasikan peraturan atau

rencana ke praktik yang menyangkut administrasi dengan muatan politik serta melibatkan manusia, dana, dan kemampuan organisasional.

2.2.2.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Smith dalam Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada adalah:

a. Unsur pelaksana (*implementor*)

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan.

b. Adanya program yang dilaksanakan

Pada hakekatnya, implementasi kebijakan adalah implementasi program. Di dalam kebijakan terdapat program-program sebagai sebuah strategi dalam pencapaian tujuan daripada kebijakan itu sendiri.

c. Kelompok Sasaran (*Target group*)

Sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan menurut Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:27-28) adalah pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia,

pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Menurut Tachjan (2006:28) ada tiga fase dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pertama, fase yang harus dilakukan oleh administrator adalah menetapkan tujuan dan sasaran dari rencananya, lalu dari hasil analisis perumusan kebijakan ditentukan kebijakan administratif yang bersifat ke dalam sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Rencana-rencana yang dirumuskan terdiri dari hasil penjabaran kebijakan dan berbagai keputusan yang diambil dan selanjutnya rencana-rencana yang disusun diturunkan/dijabarkan lagi melalui program-program operasional, sehingga terbentuk struktur program.

Fase kedua yang harus dilaksanakan administrator dari unit-unit administratif ialah pengorganisasian. Melalui pengorganisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja ditata sedemikian rupa sehingga dapat digerakkan untuk melaksanakan kegiatan, salah satunya yakni melalui proses memotivasi individu-individu yang didalamnya dalam bersikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program. Ketiga, fase yang harus dilakukan adalah administrator harus mengembangkan metode-metode dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan, salah satunya cara-cara untuk secara kontinyu meninjau hasil-hasil sewaktu program itu dalam proses pelaksanaan. Menurut Siagian dalam Tachjan (2006:31) fase penilaian yang menjadi objek seluruh segi kegiatan antara lain:

- a. Hasil yang dicapai dalam satu kurun waktu tertentu.
- b. Biaya yang nyata dikeluarkan oleh satu organisasi untuk mencapai hasil itu dibandingkan dengan biaya yang tersedia.
- c. Tenaga yang dipergunakan.

- d. Sarana dan prasana yang dimanfaatkan, termasuk cara pemanfaatannya.
- e. Efektivitas mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
- f. Sarana dan prasarana yang dimanfaatkan, termasuk cara pemanfaatannya.

Unsur yang kedua yakni, unsur program. Esensi dalam implementasi kebijakan implementasi program. Terry dalam Tachjan (2006:31) mengemukakan bahwa program ialah rencana yang bersifat komprehensif menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program harus menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar, *budget*. Grindle dalam Tachjan (2006:32) juga mengungkapkan isi program harus menggambarkan:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh program;
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- c. Derajat perubahan yang diinginkan;
- d. Status pembuat keputusan;
- e. Siapa pelaksana program;
- f. Sumber daya yang diprogram.

Unsur yang terakhir yakni unsur Kelompok sasaran (*target groups*) yakni sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung pada kesesuaian isi dari kebijakan (program) dengan harapan atau kebutuhan mereka. Disamping itu juga ditentukan oleh faktor keefektifan komunikasi berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran tersebut dan efektivitas implementasi, dan sebaliknya.

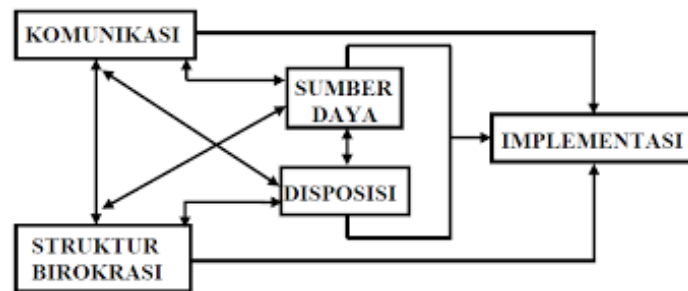
Kelompok sasaran mempunyai karakteristik seperti: besar kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi, hal itu mempengaruhi efektivitas implementasi.

2.2.2.3 Model Implementasi Kebijakan

Dalam proses impleemntasi kebijakan terdapat banyak model yang sering digunakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

George C Edward III menggambarkan model implementasi kebijakan dengan menunjuk empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber: Indiahono, 2017

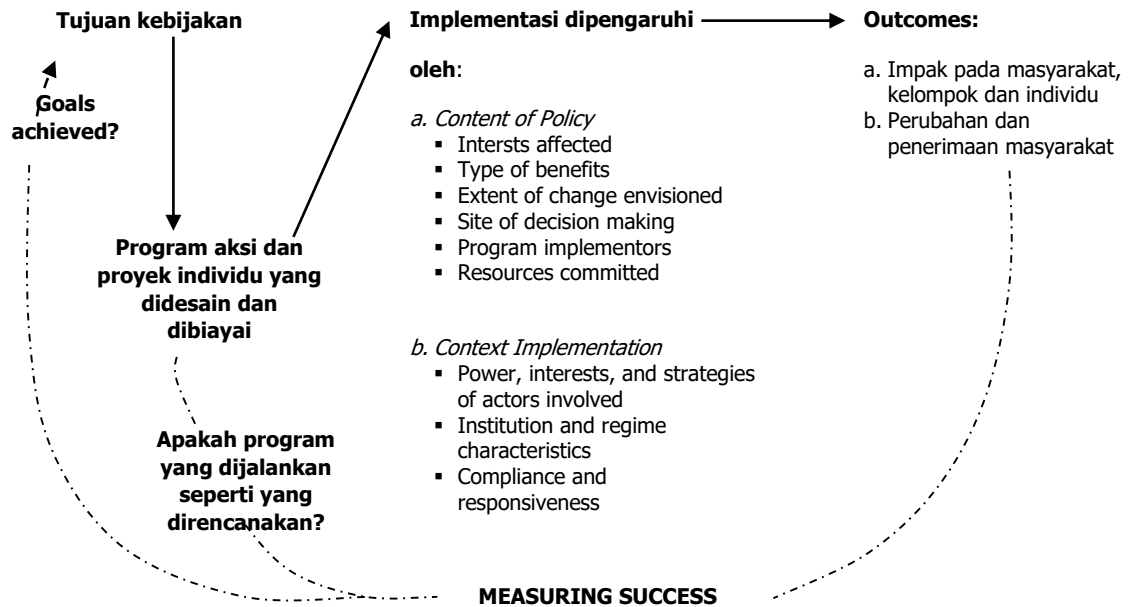
1. Komunikasi, yang menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila komunikasi dijalankan secara efektif antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran (*target group*). Menurut Agustino (2006:157) menyatakan bahwa komunikasi adalah salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik dan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui

mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

2. Sumber daya, yakni menunjuk pada setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan berkecukupan dalam sumber daya finansial. Kedua hal ini menjadi penting dalam implementasi kebijakan untuk dapat menjalankan suatu kebijakan.
3. Disposisi, yaitu menunjuk pada karakteristik yang dimiliki implementor kebijakan. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.
4. Struktur Birokrasi, menunjuk pada mekanisme dan struktur organisasi. struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Semua saling bersinergi dalam mencapai tujuan.

Model yang kedua yaitu model yang dikembangkan oleh Grindle. Grindle dalam Hayat (2018:130) menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of policy*). Keunikan dari model ini adalah terletak pada pemahamannya yang bersifat komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Grindle



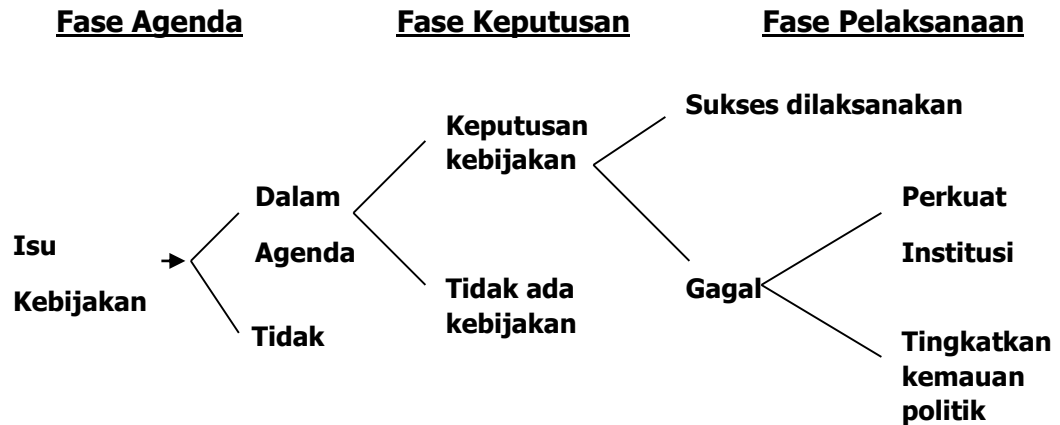
Sumber: Nugroho (2004:176)

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasikan ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang didesain dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran (Akib dan Tarigan, 2008). Dalam penelitian ini akan membahas lebih detail

model implementasi kebijakan Grindle dari adanya kebijakan BLT Dana Desa dan akan dianalisis secara mendalam menggunakan model ini.

Gambar 4. Model Implementasi kebijakan Baedhowi

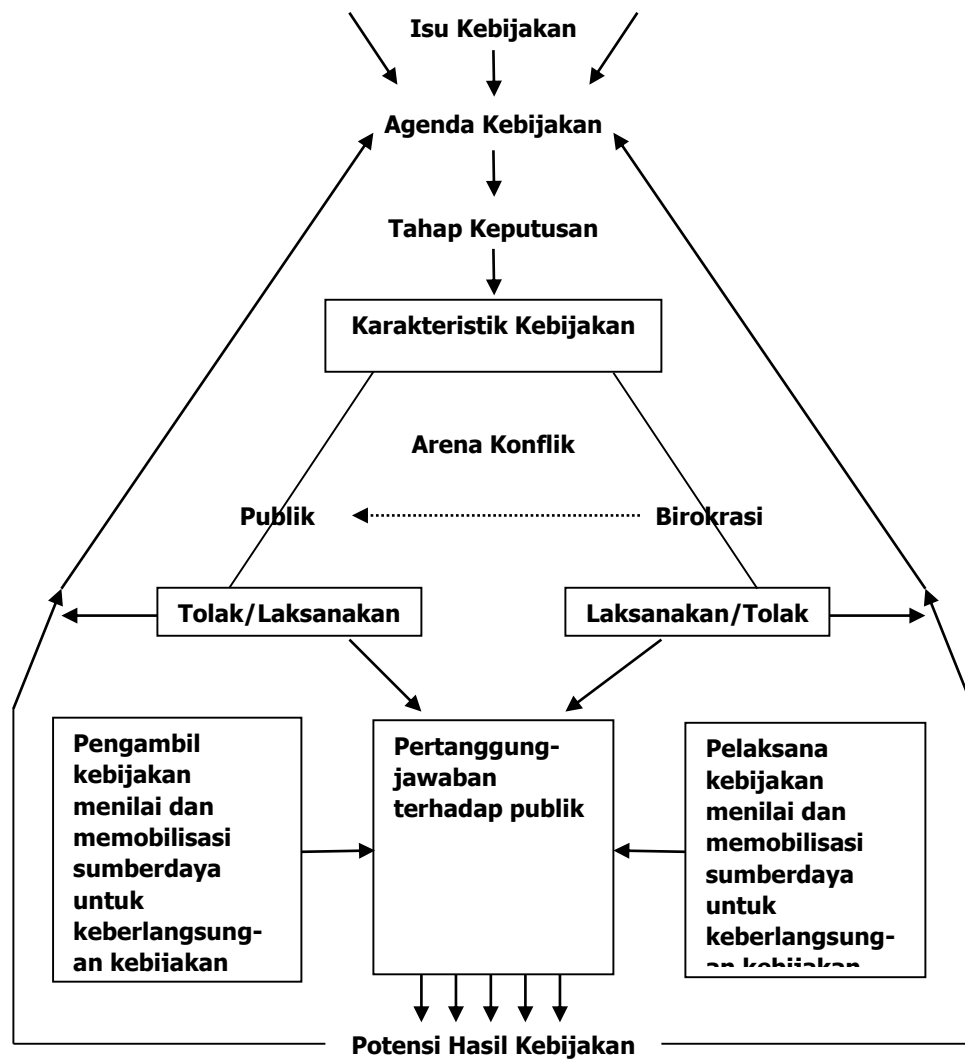
Model Linier Implementasi Kebijakan



Sumber: Baedhowi (2004:47)

Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (lihat Baedhowi, 2004: 47). Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.

Gambar 5. Model Interaktif Implementasi Kebijakan



Sumber: Haedar Akib, (2010)

Berbeda dengan model linier, model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh

setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Pada gambar diatas terlihat bahwa meskipun persyaratan input sumberdaya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan model implementasi kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu, enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut Grindle mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, beserta output dan outcomenya.

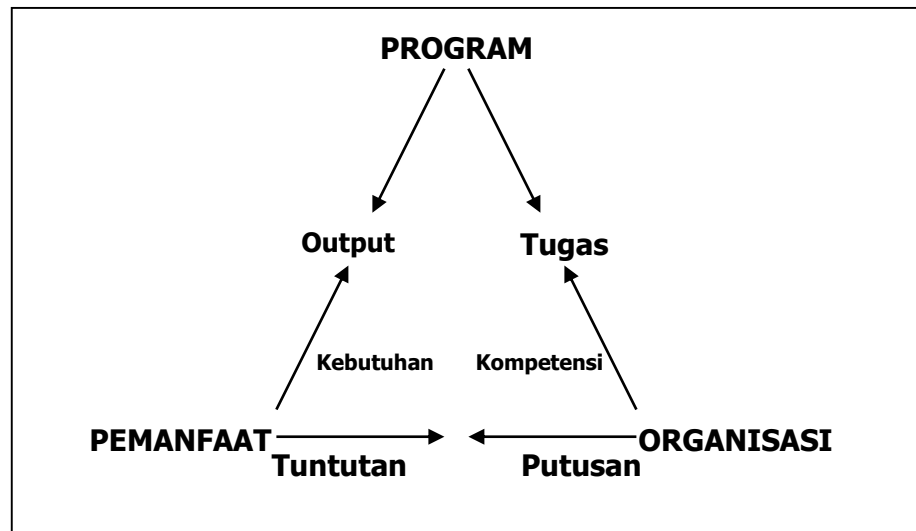
Selain model implementasi kebijakan di atas Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. (Tarigan, 2000: 20).

Keduanya menegaskan pendirian bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Tanpa mengurangi kredibilitas model proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa elemen yang menentukan keberhasilan penerapannya termasuk ke dalam elemen model proses politik dan administrasi menurut Grindle. Kata kunci yakni perubahan, kontrol dan kepatuhan termasuk dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Demikian pula dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya termasuk dalam elemen isi kebijakan dan konteks implementasi menurut Grindle. Tipologi jumlah perubahan yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan dan tipologi ruang lingkup kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi.

Sejalan dengan pendapat di atas, Korten (baca dalam Tarigan, 2000: 19) membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

Gambar 6. Model Implementasi Kesesuaian



Sumber: Nugroho (2004)

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang

disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen yang disesuaikan satu sama lain – program, pemanfaat dan organisasi – juga sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks implementasi (organisasi) maupun dalam outcomes (pemanfaat) pada model proses politik dan administrasi dari Grindle.

2.2.4 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana kebijakan ini akan berhasil atau gagal karena kejelasan isi dari suatu kebijakan serta tujuan, target dan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Implementasi kebijakan merupakan proses yang paling penting dalam struktural kebijakan karena yang menentukan suatu kebijakan tersebut dapat dirasakan dampaknya untuk masyarakat serta dapat diketahui mengenai penyelesaian masalah di masyarakat sekitar. Menurut Sabatier dalam Parson (2008:487) terdapat enam syarat yang mencukupi dan harus ada implementasi yang efektif yaitu:

1. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya.
2. Teori kasual yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
3. Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dengan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
4. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijakan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. Dukungan dan kelompok kepentingan dan 'penguasa' di legislatif dan eksekutif.
6. Perubahan dalam kondisi sosio-ekonomis yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Demi mencapai kebijakan efektif tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketika diimplementasikan. Faktor-faktor tersebut yang memperlihatkan keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan. Terdapat dua faktor dalam menentukan keberhasilan implementasikan yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Kegagalan kebijakan menurut Hogwood dan Gunn dalam Winarno (2012:102) membagi kegagalan kebijakan (*policy failure*) terdapat dua kategori yaitu:

- a. *Non Implementation*, yang artinya bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang terjadi.
- b. *Unsuccesful Implementation*, yang artinya suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijaksanaan tersebut, tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor pelaksanaannya yang jelek (*bad excution*), kebijaksanaan yang jelek (*bad policy*) dan kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*).

Implementasi kebijakan walaupun memiliki faktor penghambat sehingga mengalami kegagalan kebijakan seperti yang disebutkan diatas namun tentu saja juga ada faktor pendukung untuk mencapai keberhasilan kebijakan. Pengukuran keberhasilan kebijakan bisa dari berbagai faktor yaitu isi kebijakan dan proses

implementasinya. Perlu dicatat menurut Agustino (2016:129) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Pendapat ini sama seperti yang disampaikan oleh Grindle dalam Agustino (2016:129) bahwa “Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut dapat tercapai”. Setiap implementasi kebijakan selain mempunyai faktor penghambat juga mempunyai faktor pendukung seperti yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (2009:108-110) bahwa terdapat sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan yaitu:

1. *Respect* anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan badan-badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

2.2.5 Perlindungan Sosial

Dalam konteks kebijakan sosial, perlindungan sosial merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengentasan permasalahan kemiskinan (Suharto, 2015). Perlindungan sosial menurut *International Labour Organization* (ILO) (1984) adalah sebuah sistem yang disediakan melalui rangkaian kebijakan publik untuk meminimalisir dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari, penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian. Sedangkan menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) (2012) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai serangkaian kebijakan publik dan privat yang mempunyai tujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kerugian dan kemiskinan.

Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka. Landasan perlindungan sosial erat kaitannya dengan Agenda Pekerjaan yang Layak (ILO, 2012). Untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan, landasan perlindungan sosial harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro pekerja. Saat ini, beberapa negara sudah memasukkan elemen-elemen utama tersebut ke dalam sistem perlindungan sosial yang mereka miliki. Pada negara-negara dengan penghasilan menengah ke bawah, akses pada program perlindungan sosial sejalan dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan dan transformasi sosial lainnya.

Gambar 7. Arah Kebijakan Perlindungan Sosial yang Komprehensif di Indonesia



Sumber: Kementerian Sosial (2016)

Menurut Scott (2012), konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam, pengangguran, hingga kematian. Fokus perlindungan sosial yang terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut kerap dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. Dengan meningkatnya perhatian dunia untuk mendukung pembangunan yang lebih merata, secara bertahap perlindungan sosial berevolusi menjadi sistem yang lebih berfokus kepada tindakan preventif dan promotif dalam jangka panjang. Pendekatan konsep perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-penyebab kemiskinan dan berusaha untuk mengatasi batasan-batasan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh penduduk rentan.

Guhan (1994) memandang bahwa perlindungan sosial memiliki komponen yang lebih luas, diantaranya mencakup komponen perlindungan, pencegahan, serta promosi. Komponen perlindungan terdiri dari berbagai kebijakan yang bertujuan memastikan tingkat kesejahteraan minimal untuk masyarakat yang kesusahan. Komponen pencegahan berisikan berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah masyarakat yang tergolong rentan untuk jatuh dibawah standar kesejahteraan yang ditentukan. Komponen promosi mencakup kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan setiap individu di masa mendatang.

Perlindungan sosial juga dipandang memiliki peran transformatif, dimana perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan status dan membuka lebih banyak peluang penghidupan bagi kelompok masyarakat yang termarjinalkan. Perluasan konsep perlindungan sosial hingga kepada peran transformatif salah satunya dikemukakan oleh Sabates-Wheeler dan Devereux (2007). Menurut mereka, perlindungan sosial memiliki empat elemen, yakni penyediaan, tindakan pencegahan, tindakan promotif, serta peran transformatif. Elemen penyediaan mencakup program jejaring pengaman yang tertarget. Elemen tindakan pencegahan mencakup tindakan manajemen risiko sosial untuk rumah tangga yang tergolong rentan. Elemen promotif mencakup seluruh intervensi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan kapabilitas setiap penduduk. Sedangkan elemen transformatif mencakup tindakan-tindakan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan untuk mendukung kelompok masyarakat yang tergolong rentan.

Menurut *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* dalam Suharto (2015) secara konseptual perlindungan sosial adalah '*tindakan publik yang diambil untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan ketidaksetaraan*'. Secara operasional perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian inisiatif

pemerintah yang didesain untuk menyediakan empat skema utama: bantuan sosial, pelayanan sosial, asuransi sosial, dan kebijakan pasar kerja.

1. Bantuan sosial adalah layanan publik yang diberikan kepada penduduk dan rumah tangga yang sangat miskin, terutama dengan menggunakan prinsip solidaritas vertikal dan oleh karenanya tidak mempertimbangkan kontribusi ataupun premi dari penerima manfaat;
2. Pelayanan sosial adalah salah satu jenis pelayanan kesejahteraan yang terutama didesain untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan perawatan khusus atau yang mendapat penolakan akses terhadap rangkaian pelayanan dasar;
3. Asuransi sosial adalah skema yang dikembangkan untuk melindungi masyarakat terhadap resiko dan
4. konsekuensi guncangan pendapatan berdasarkan kontribusi maupun premi yang dibayarkan sebelumnya;
5. Kebijakan pasar kerja merupakan intervensi publik yang bertujuan untuk memastikan standar ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

2.2.6 Bantuan Sosial

Menurut Kementerian Sosial (2011:15) bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk

realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di tingkat bawah.

Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (*in-cash transfers*), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (*in-kind transfers*). Setiap bantuan bisa bersifat sementara, karena adanya situasi sosial tertentu seperti; bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan pemerintah tertentu. Selain itu bantuan juga dapat bersifat tetap khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak terlantar. Berbagai definisi dari program bantuan sosial sendiri telah cukup banyak diungkapkan oleh lembaga-lembaga di dunia.

Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 (2010:79) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 (2010:79) menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan perkembangan sosial ekonomi suatu negara, program bantuan sosial yang semula hanya berbentuk hibah saja berubah orientasinya menjadi program yang lebih memberikan manfaat berkelanjutan melalui bantuan pemberdayaan atau stimulan agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri kecuali bagi sasaran program yang memang sudah tidak potensial sama sekali seperti lanjut usia yang jompo, miskin terlantar dan lain-lain. Salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan pemberian bantuan sosial

kepada kepala keluarga miskin dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Program BLT Dana Desa adalah salah satu program perlindungan sosial masyarakat miskin yang mempunyai tujuan untuk dapat mengatasi permasalahan sosial masyarakat miskin desa yang terdampak COVID-19 secara ekonomi karena hilangnya pekerjaan, berkurangnya pendapatan, atau masyarakat miskin yang belum terjangkau bantuan sosial lainnya yang memang sangat membutuhkan. Program ini dikeluarkan dengan menggunakan konsep pembayaran G2P (*Government to people*), yaitu dengan pembayaran yang dilakukan pemerintah yang langsung ditransfer kepada orang yang bersangkutan.

Secara umum, pencairan/transfer/pembayaran G2P didefinisikan sebagai skema pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah kepada individu atau kelompok masyarakat di negaranya (Pickens dkk, 2009; Stuart, 2016). Menurut Pickens dkk (2009), pembayaran G2P adalah pembayaran tunai untuk program sosial, gaji, pensiun, dan pembayaran lainnya. Sementara itu, Bank Dunia (2012) mencatat pembayaran G2P sebagai dana yang disalurkan pemerintah terkait dengan manfaat sosial, antara lain insentif/subsidi, manfaat jaminan sosial, komponen gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri, termasuk pensiun dan pengembalian pajak. Menurut definisi ini, pencairan G2P umumnya memiliki karakteristik berupa jumlah transaksi yang besar namun dengan nilai yang relatif kecil. Definisi lain mengenai G2P juga dikembangkan oleh *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), sebagai pembayaran yang di dalamnya termasuk manfaat bantuan pemerintah (*government benefits*) dan gaji. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa program-program yang menggunakan mekanisme pembayaran G2P meliputi program yang memiliki fungsi “bantuan sosial” untuk meningkatkan kesejahteraan dan program pembayaran yang

secara rutin dilakukan oleh pemerintah. Dalam laporannya berjudul “*Banking the Poor via G2P Payments*”, Pickens dkk (2009) mencatat bahwa pembayaran G2P dapat menjangkau masyarakat miskin melalui dua cara, yaitu (1) transfer sosial; dan (2) pembayaran kepada pekerja aktif dan para pensiunan.

Secara umum, transfer sosial yang dilakukan di banyak negara di dunia meliputi:

- a. *Conditional cash transfer (CCT)*, yaitu pembayaran yang diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dengan syarat penerima bantuan harus melakukan investasi kesehatan dan pendidikan, seperti mengirim anak bersekolah dan memberi imunisasi atau vaksin kepada anak.
- b. *Unconditional cash transfer*, yaitu pembayaran yang diberikan kepada penerima manfaat yang ditargetkan tanpa syarat khusus.
- c. *Workfare transfer*, yaitu pembayaran untuk program-program penciptaan lapangan kerja yang bertujuan mengurangi pengangguran dan membantu masyarakat agar memiliki pendapatan yang lebih stabil.

Tujuan utama studi ini adalah untuk memetakan dan menganalisis program bantuan pemerintah untuk individu, keluarga, dan kelompok kurang mampu. Dengan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan, studi ini penting dilakukan untuk melihat potensi penyaluran program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu agar lebih tepat sasaran. Salah satu caranya adalah memperbaiki sistem manajemen penyaluran program menjadi satu pintu. Indonesia memiliki beragam program bantuan sosial dan subsidi dengan kerangka sistem penyaluran yang berbeda-beda. Selain kriteria penerima bantuan dan sumber data yang berbeda, sistem penyaluran dana bantuan juga cukup bervariasi dan kompleks karena melibatkan pemangku

kepentingan yang juga beragam. Hal ini memunculkan masalah tumpang tindih bantuan, kesalahan eksklusi-inklusi, dan tidak efisien.

2.2.8 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut Shirazi dan Pramanik (2017:68), kemiskinan diuraikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu atau kelompok dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Menurut Chambers dalam Prasetyo (2010), kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak dari aspek sosial, ekonomi, psikologis karena ketidakberdayaan seseorang untuk dapat memenuhinya. Untuk itu dibutuhkan

perhatian dari pemerintah untuk dapat membuat kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan ini.

Pratama dalam Haidir (2019:58) menyatakan berbagai kebijakan telah dibuat pemerintah untuk dapat mengatasinya dari berbagai sektor akan tetapi belum sepenuhnya kebijakan yang telah dibuat mampu mengatasi permasalahan ini. (Pratama, 2015) Menurut Ragnar Nurske dalam Prasetyoningrum (2018: 220) menyatakan bahwa lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*) terjadi dikarenakan tabungan rendah, investasi rendah, kekurangan modal, rendahnya produktifitas, pendapatan rendah yang kembali menyebabkan tabungan rendah dan seterusnya.

2.2.8.1 Jenis Kemiskinan

Menurut Arsyad (2016) menyatakan bahwa ada dua ukuran umum jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank duniamendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah

maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan erat dengan permasalahan distribusi pendapatan.

2.2.8.2 Penyebab kemiskinan

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal. Menurut Sharp, setelah melakukan identifikasi, penyebab kemiskinan dari segi ekonomi adalah:

- a. Kemiskinan secara makro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan.
- b. Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya. 3)Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada. Selain itu Todaro menambahkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu: tingkat pendapatan nasional dan lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Todaro dalam Kuncoro (2006:66) juga menjelaskan bawa adanya variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Luasnya negara,
- b) Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan

- c) Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya
- d) Relatif pentingnya sektor publik dan swasta
- e) Perbedaan struktur industri
- f) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik, negara lain dan
- g) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Selain itu, Bappenas (2018:13) menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok pandangan yang mengidentifikasi penyebab kemiskinan berdasarkan klasifikasi para ahli sebagai berikut:

a. Kelompok Pandangan Ekonomi Politik.

Kelompok ini berpendapat bahwa munculnya kemiskinan perdesaan merupakan hasil dari proses pengkonsentrasian kekayaan dan kekuasaan. Proses tersebut terjadi melalui tiga tingkatan, yaitu:

- a) tingkat global, munculnya kemiskinan merupakan akibat hubungan pertukaran yang eksploitatif dan tidak seimbang antara negara kaya dan negara miskin sehingga negara miskin akan tetap menjadi miskin, meskipun tetap memperoleh manfaat dari investasi modal;
- b) tingkat nasional, kemiskinan perdesaan muncul sebagai akibat dari ulah beberapa kelompok kepentingan terutama kelompok kepentingan perkotaan, seperti kelompok berpendapatan menengah di perkotaan yang berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan penduduk desa; dan

c) tingkat lokal, kemiskinan perdesaan muncul sebagai akibat dari ulah para elit lokal -yang terdiri dari tuan tanah, pedagang, pelepas uang (*money lenders*), dan birokrat yang terus mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan mereka.

b. Kelompok Pandangan Ekologi

Kelompok ini melihat kemiskinan di perdesaan sebagai akibat dari pertumbuhan dan tekanan penduduk yang tidak terkendali atas sumber daya dan lingkungan. Adanya tekanan penduduk menyebabkan usaha pertanian menjadi semakin sempit. Hal ini mengakibatkan upah riil turun dan jumlah pengangguran meningkat. Sebagian tenaga kerja terpaksa harus bermigrasi ke daerah perkotaan dan lingkungan marginal. Selain itu, para ahli ekologi fisik juga melihat karakteristik fisik dari kelompok miskin seperti kurang gizi, kondisi lingkungan yang tidak sehat, perumahan yang kurang layak, lingkungan yang kurang nyaman, dan kondisi iklim yang tidak menentu menjadi penyebab kemiskinan di perdesaan.

Dari berbagai pendapat para ahli, berbagai faktor penyebab kemiskinan, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.
- b. Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
- c. Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan

ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.

- d. Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.
- e. Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani atau pertanian, yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang.

2.2.8.3 Strategi Kebijakan Penurunan Kemiskinan

Terdapat berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah terbukti dapat menjinakkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di berbagai negara, terutama negara berkembang. Adelman dan Robinson (2000) menyebutkan terdapat empat pendekatan dalam mengatasi kemiskinan, yaitu:

- a. Pendekatan yang berorientasi kepada aset, yaitu kebijakan untuk meningkatkan kuantitas aset kelompok miskin. Pendekatan ini dilakukan melalui reformasi agraria atau dengan menciptakan institusi yang memungkinkan kelompok miskin memiliki akses melakukan akumulasi aset misalnya melalui pemberian kredit yang disubsidi atau dengan memperluas akses kelompok miskin terhadap pendidikan dasar.
- b. Strategi penciptaan permintaan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja kelompok miskin, yang umumnya terdiri dari tenaga kerja tidak terampil. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan, baik absolut maupun relatif terhadap tenaga kerja tidak terampil.

- c. Strategi atau kebijakan yang dapat meningkatkan harga dari aset utamayang dimiliki kelompok miskin. Aset utama yang dimiliki kelompok miskin adalah tenaga kerja, yang umumnya merupakan tenaga kerja tidak terampil. Kebijakan peningkatan harga yang bekerja melalui pasar faktor produksi harus dapat meningkatkan upah dari kelompok miskin. Hal ini hanya bisa terjadi jika ada kenaikan permintaan tenaga kerja dari kelompok miskin. Sementara itu, efek dari kebijakan peningkatan harga terhadap upah kelompok miskin sangat tergantung pada bagaimana pasar tenaga kerja bekerja dan organisasi kelembagaan dari pasar tenaga kerja tersebut. Strategi atau kebijakan ini menekankan pentingnya peningkatan harga dari barang yang dihasilkan dengan tenaga kerja dari kelompok miskin. Peningkatan harga relatif dari keluaran pertanian diharapkan dapat memberi manfaat kepada kelompok miskin termasuk pekerja yang tidak memiliki lahan. Peningkatan produktivitas kelompok miskin dapat dilakukan melalui: (1) investasi dalam sumber daya manusia seperti investasi dalam nutrisi, pendidikan, dan kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas dari tenaga kerja kelompok miskin; (2) peningkatan aset pelengkapatau sumber daya seperti lahan dan kapital; dan (3) pengenalan perubahan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas.
- d. Strategi atau kebijakan yang dapat mendorong peningkatan produktivitas, yaitu suatu kebijakan yang beroperasi melalui pasar faktor produksi atau pasar komoditi, dan/atau kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas dari aset yang dimiliki kelompok miskin.

Nafziger (2005) dalam bukunya yang berjudul *Economic Development*, menambahkan:

- a. Perlunya reformasi agraria dan redistribusi lahan. Di banyak negara berkembang, ketersediaan lahan pertanian yang subur sudah semakin berkurang. Sementara kepemilikan lahan terkonsentrasi pada sekelompok kecil petani pemilik lahan.
- b. Permodalan dan perkreditan. Kelompok miskin mengalami kesulitan dalam mengakses sumber kredit dan permodalan misalnya perbankan. Hal ini disebabkan karena prosedur yang rumit dan tidak tersedia jaminan. Program perkreditan dan permodalan khusus bagi kelompok miskin dengan persyaratan dan prosedur yang lebih mudah dan terjangkau seperti model “Grameen Bank” di Bangladesh perlu terus dikembangkan.
- c. Kebijakan peningkatan pendidikan dan latihan yang merupakan investasi modal manusia sangat penting untuk menghasilkan aliran pendapatan sepanjang waktu. Pendidikan dasar universal dan gratis merupakan cara penting untuk meredistribusi modal manusia kepada kelompok miskin. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dasar yang tinggi memiliki korelasi kuat dengan pendapatan dari kelompok 40 persen penduduk terbawah. Kualitas pendidikan perlu dibarengi oleh peningkatan derajat kesehatan dan nutrisi penduduk, khususnya anak-anak di keluarga miskin agar mereka tidak terjatuh kemiskinan lagi.

Todaro dan Smith (2015) menyampaikan bahwa transfer langsung dan subsidi sangat efektif dengan beberapa prasyarat. Pertama, karena sumber daya terbatas sehingga harus dipastikan bahwa transfer dan subsidi diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Kedua, penerima tidak tergantung pada bantuan, tetapi

termotivasi membangun aset seperti pendidikan anak yang nantinya dapat mencegah anaknya tetap dalam kondisi miskin.

2.2.9 Coronavirus Disease (COVID-19)

Coronaviruses (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV)* and *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV)*. Penyakit yang disebabkan virus corona, atau dikenal dengan COVID-19, adalah jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya (*World Health Organization*, 2019). Kasus virus corona muncul dan menyerang manusia pertama kali di provinsi Wuhan, China. Awal kemunculannya diduga merupakan penyakit *pneumonia*, dengan gejala serupa sakit flupada umumnya. Gejala tersebut di antaranya batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Namun berbeda dengan influenza, virus corona dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ.

Kondisi darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya. Karena penularan virus corona yang sangat cepat inilah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona (Widiyani, 2020).

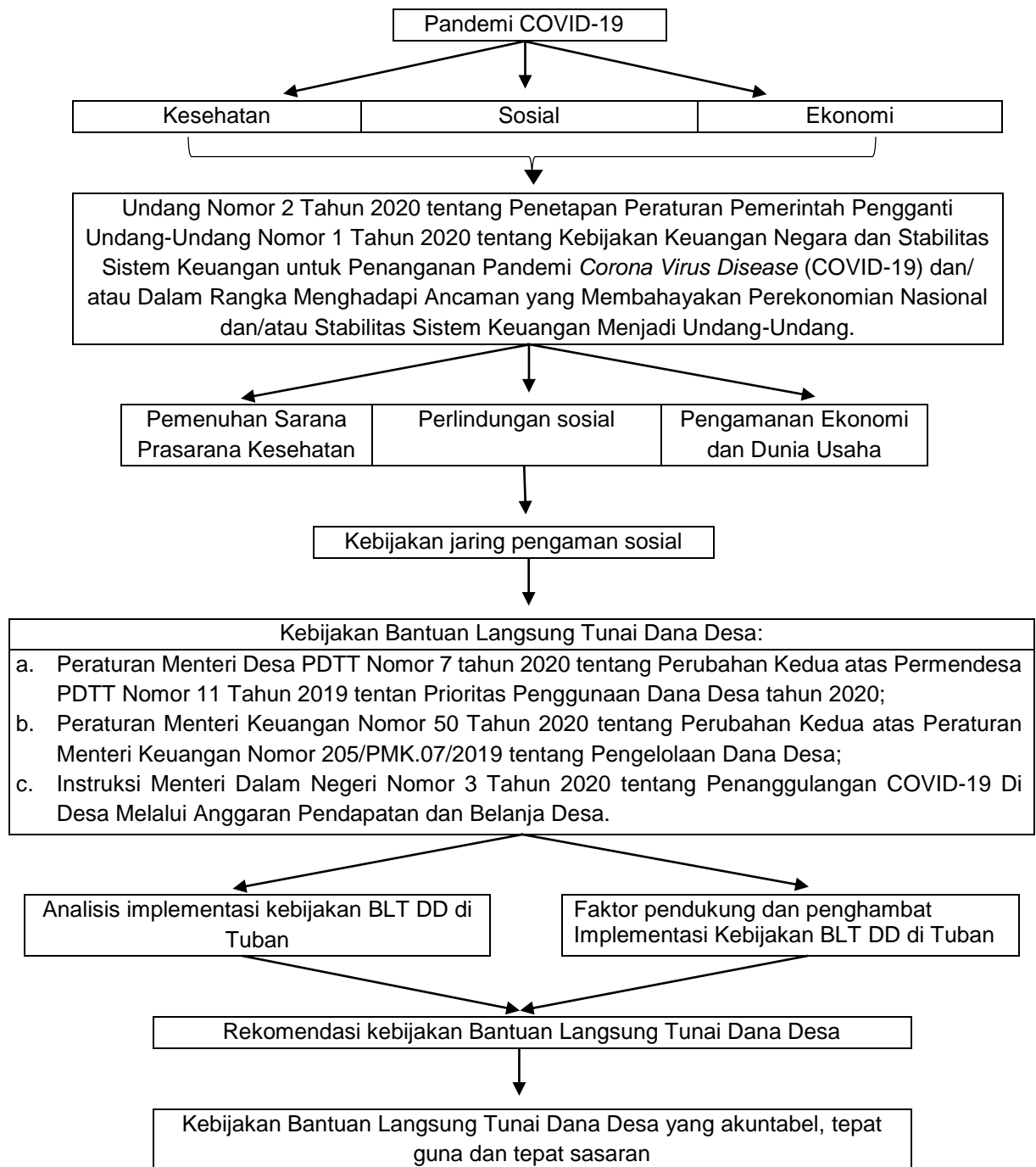
Adanya penyakit yang sangat menular yang menjadi pandemi, seperti COVID-19, menimbulkan masalah kesehatan dan ekonomi yang serius karena berbagai transformasi sosial dan lingkungan global yang terjadi sebagai akibat dari

perkembangan ekonomi. Kejadian COVID-19 pada dasarnya melibatkan masalah kesehatan lingkungan karena kemunculannya bergantung pada keadaan lingkungan sekitar individu (Tisdell:2020:17)

Ketika bencana jenis apa pun terjadi, mereka yang rentan secara sosial berada pada risiko terbesar (Ibraheem, 2020:317). Laporan terbaru tentang morbiditas dan mortalitas penyakit koro-navirus 2019 (COVID-19) telah menunjukkan beban yang lebih tinggi di antara ras / etnis minoritas, lansia, orang miskin, dan orang dengan pencapaian pendidikan terendah. Tindakan Jika semua jenis bencana terjadi, termasuk pandemi seperti COVID-19, faktor sosial seperti persentase orang yang hidup dalam kemiskinan atau tanpa akses transportasi dapat berkontribusi pada derajat di mana komunitas menahan dampak bencana dan meminimalkan penderitaan manusia dan kerugian finansial.

Berdasarkan penelitian Siagian (2020:105) dengan menggunakan metode Discourse Network Analysis, menemukan kelompok-kelompok berisiko tinggi terinfeksi Virus Corona yaitu antara lain kelompok lansia, penderita penyakit kronis, perokok dan penghisap vape, kaum pria dan orang bergolongan darah A. Dengan demikian, agar menjadi perhatian bagi seluruh sektor masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan terjadinya masalah ini yang akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Dampak dari adanya masalah ini adalah bersifat multidimensional dalam berbagai sektor.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 8. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020)

Adanya pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia yang bersifat multidimensional yang tidak direncanakan dan terjadi secara mendadak sehingga mengakibatkan permasalahan global baik di negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan tersebut diantaranya adalah pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi yang terdampak akibat adanya pandemi ini. Untuk itu pemerintah membuat rangkaian kebijakan untuk dapat menangani permasalahan tersebut, salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam peraturan tersebut membahas mengenai refocusing/relokasi anggaran negara untuk dapat menangani permasalahan pandemi ini dengan tiga fokus utama, yaitu, (1) pemenuhan sarana prasarana kesehatan; (2) perlindungan sosial melalui jaring pengaman sosial; dan (3) pemulihan ekonomi dan dunia usaha yang terkena imbas dari adanya permasalahan ini. Dari fokus perlindungan sosial melalui jaring pengaman sosial, pemerintah banyak membuat kebijakan bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat yang terdampak COVID-19. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah dengan dikeluarkannya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dari kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan kepada masyarakat yang kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan

pendekatan teori model implementasi kebijakan dari Grindle yang melihat kebijakan melalui dua unsur utama, yaitu *policy context* dan *policy content*. Dari analisis tersebut peneliti dapat menggambarkan bagaimana proses implementasi dan bagaimana hambatan dalam prosesnya, sehingga peneliti dapat memberikan masukan berdasarkan fakta yang ditemukan dengan pendekatan teori dan peraturan yang ada untuk dapat dijadikan rekomendasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19, agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, tepat guna dan tepat sasaran.

BAB III

ANALISIS SOCIAL SETTING

3.1 Kondisi Kabupaten Tuban

3.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Tuban merupakan secara administratif berada di dalam daerah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 183.994,561 Ha. Letak astronomi Kabupaten Tuban berada pada koordinat 111^o 30' - 112^o 35' Bujur Timur dan 6^o 40' – 7^o 18' Lintang Selatan. Panjang wilayah pantai yang dimiliki Kabupaten Tuban adalah sepanjang 65 km dari mulai dari Kecamatan Palang di ujung Timur sampai Kecamatan Bancar di ujung barat. Luas wilayah laut yang dimiliki Kabupaten Tuban adalah 22.608 Km². Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Tuban terdiri dari 20 Kecamatan dengan jumlah 328 desa/kelurahan (311 desa dan 17 kelurahan) serta terbagi lagi menjadi 1.733 RW (Rukun Warga) dan 6.469 RT (Rukun Tetangga) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan

3.1.2 Visi dan Misi

1) Visi

Berpedoman pada hal-hal yang sudah dicapai pada proses pembangunan sebelumnya, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Tuban lima tahun ke depan, maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis untuk mengatasi segala persoalan yang saat ini masih eksis menuju Tuban yang lebih makmur dan sejahtera serta berkeadilan. Visi pembangunan Tuban yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah :

“Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera”

Pada visi tersebut diatas, terdapat empat kata kunci dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut :

1. Religius

yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.

2. Bersih

Sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan *satisfied public services* (layanan publik yang memuaskan) guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti.

3. Maju

Ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Maju yang dimaksud adalah kondisi daerah yang dinilai berdasarkan berbagai indikator, yaitu: indikator sosial, ekonomi, hukum, dan politik.

- a. Indikator sosial yang digunakan untuk mengukur kemajuan adalah pada kualitas sumber daya manusia dan kependudukan. Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli. Selain itu, Kabupaten Tuban yang maju masyarakatnya juga didukung oleh kepribadian dan berakhlak mulia. Sedangkan kependudukan erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemerataan pembangunan, dan pelayanan sosial yang lebih baik.
- b. Indikator ekonomi dapat menggambarkan kemajuan Kabupaten Tuban yang tercermin melalui tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga ekonomi juga tertata dan berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian dengan optimal. Selain itu, daerah yang maju juga ditandai dengan perekonomian yang stabil.
- c. Kemajuan Kabupaten Tuban juga ditandai dengan jaminan hukum dan penyelenggaraan politik yang baik serta mantap. Masyarakat yang maju ditandai dengan tingginya partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, maupun dalam hukum. Selain itu juga terdapat pemenuhan hak-hak masyarakat, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupannya. Pencapaian Kabupaten Tuban yang maju juga didukung oleh suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang baik (*clean government*), sehingga dapat menjalankan pelayanan prima (*excellent service*) kepada publik

4. Sejahtera

Dalam istilah umum sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjukkan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

A. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tuban 2016-2020 yaitu “Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera” diterjemahkan melalui 5 (lima) misi berikut :

Misi kesatu: Peningkatan pengemalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Misi ini untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur, toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, etika pembangunan serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama sebagai pilar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib.

Misi kedua: Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta pelayanan prima (*excellent service*) pada pelayanan publik, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat pemerintah desa.

Misi ketiga: Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah.

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kabupaten layak huni.

Misi keempat: Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal yang berdaya saing melalui peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan, peningkatan hasil olahan dan tingkat konsumsi masyarakat sebagai upaya dalam menaikkan nilai tambah hasil produksi, pengembangan destinasi wisata, penguatan kelembagaan koperasi/usaha kecil mikro/BUMDes, industri dan perdagangan, peningkatan investasi dalam rangka membuka lapangan kerja, serta penyediaan sistem jaringan distribusi.

Misi kelima: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan sarana prasarana dan prestasi olah raga, serta peningkatan peran dan kreatifitas pemuda.

2.1.3 Kondisi Demografi

Kondisi demografis Kabupaten Tuban berdasarkan penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018) cenderung mengalami peningkatan jumlah penduduk. Pada Tahun 2014 tercatat penduduk Kabupaten Tuban sebesar 1.291.665 meningkat 12.415 jiwa di Tahun 2015 menjadi sebesar 1.304.080 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2016 jumlah penduduk menjadi sebesar 1.315.155 jiwa, meningkat 11.075 jiwa jika dibandingkan jumlah penduduk di Tahun 2015. Penurunan jumlah penduduk sempat terjadi di Tahun 2017, dimana saat itu berada diangka 1.267.886 jiwa, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Tahun 2016 sebesar 1.315.155 jiwa, mengalami penurunan sebesar 47.269 jiwa.

Tahun 2018 jumlah penduduk sebesar 1.315.155 jiwa berdasarkan hasil registrasi pada tanggal 31 Desember 2018. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 658.933 jiwa dan perempuan sebesar 656.222 jiwa. Dari jumlah tersebut angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk sebesar 100,41. Angka tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Tuban pada tahun

2018 jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Tuban, diketahui bahwa penduduk Kabupaten Tuban didominasi oleh penduduk usia muda atau dewasa, yakni mengelompok pada usia 15-49 tahun. Namun jika diamati pada piramida penduduk, penduduk berusia di bawah 15 tahun masih terlihat membesar, terutama pada kelompok usia 5-14 tahun, yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang berusia 0-4. Hal tersebut menunjukkan jumlah angkatan kerja yang besar.

2.1.4 Kesejahteraan Masyarakat

2.1.4.1 Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan ekonomi

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ditentukan oleh pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Pertumbuhan PDRB dapat memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2018 sebesar 5,16%. Sedikit meningkat dibanding tahun 2017 yang mencapai 5,00%. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Tuban, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dari sisi eksternal diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik serta harga komoditas internasional yang masih stagnan di level yang rendah. Beberapa indikator yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Tuban diantaranya keberhasilan pemerintah mempertahankan laju inflasi pada

level yang rendah dalam kurun beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 9,71 persen, tumbuh sangat pesat jika dibandingkan capaian pada Tahun 2017 yang hanya sebesar 5,91 persen. Kemudian diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang juga mengalami pertumbuhan cukup signifikan di angka 7,78 persen. Lapangan usaha di bidang Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berada diposisi capaian 7,73 persen, disusul oleh bidang usaha Informasi dan Komunikasi yang pertumbuhannya tidak bergerak dari capaian 2017 sebesar 7,40 persen.

Berikutnya, Jasa Perusahaan mencapai 7,25 persen yang sempat turun diangka 5,76 persen di tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 7,27 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan diangka 7,08 persen, turun jika dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai 7,49 persen. Bidang Real Estate, mengalami fluktuasi yang agak beragam, pada Tahun 2016 sempat menyentuh angka 8,22 persen, akan tetapi di Tahun 2017 turun cukup signifikan diangka 4,61 persen, baru Tahun 2018 capaian angka pertumbuhannya sebesar 5,91 persen.

Bidang Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2018 perkembangannya menurun diangka 5,84 persen, jauh dibawah Tahun 2017 sebesar 7,74 persen dan di Tahun 2016 sebesar 7,98 persen. Bidang Jasa Lainnya di Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,70 persen jika dibandingkan Tahun 2017 sebesar 5,26 persen. Berikutnya Jasa pendidikan yang mencapai angka 4,84 persen, naik namun belum signifikan dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 sebesar 4,73 persen dan Tahun 2018 yang sempat menyentuh angka 6,78 persen.

Beberapa bidang lainnya, pertumbuhannya tidak terlalu menggembirakan antara lain Bidang Jasa Keuangan dan Asuransi diangka 4,22persen, Bidang Jasa Admin Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial diangka 4,10 persen, Bidang Pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,97 persen, Bidang Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,47 persen, Bidang Pertambangan danPenggalian sebesar 3,09 persen, Bidang Konstruksi sebesar 0,41 persen dan Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diangka -0,01 persen. Jika dianalisis terdapat 2 (dua) Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan cukup cepat jika dibandingkan Tahun 2017 yaitu Bidang Industri Pengolahan dari 5,78 persen di Tahun 2017 menjadi 9,71 persen di Tahun 2018, naik 3,93 persen. Sebaliknya, terdapat 2 (dua) bidang usaha yang mengalami pelambatan bahkan penurunan pertumbuhan yaitu Bidang Pertambangan dan Penggalian di Tahun 2017 masih diangka sebesar 5,61 persen, sedangkan di Tahun 2018 hanya 3,09 persen, turun 2,52 persen.

Selain itu, Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang di Tahun 2017 masih menyentuh angka 3,27 persen, di Tahun 2018 menjadi -0,01 persen. Dapat dikatakan, bidang ini tidak bertumbuh, kalah berkembang dibandingkan dengan bidang usaha lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tuban mulai terjadi pergeseran peradaban dari yang awalnya Daerah agraris perlahan tapi pasti bergerak ke arah Daerah industri, selain tentu saja untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, penurunannya dipengaruhi pula oleh peralihan kewenangan di bidang pertambangan dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi.

Selain dari pertumbuhan beberapa unit produksi di suatu Daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat terbaca melalui perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) ataupun Atas Dasar Harga Berlaku

(ADHB) setiap tahunnya, yang kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan estimasi rencana pembangunan regional. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian suatu daerah. Berikut Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun terakhir, kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

Gambar 9. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Nasional

Tahun	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	5,47	5,86	5,02
2015	4,89	5,44	4,79
2016	4,90	5,55	5,02
2017	5,00	5,45	5,07
2018	5,16	5,50	5,17

Sumber ; BPS data diolah

2) Indeks Gini

Indeks Gini Ratio Indeks Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Jadi pada Indeks Gini ratio, semakin rendah tingkat Indeks Gini Ratio di suatu Daerah, hal itu semakin baik karena artinya tingkat ketimpangan pendapatan antar individu yang satu dengan individu yang lain di wilayah tersebut semakin kecil dan cenderung mendekati pemerataan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkat

Indeks Gini Rationya besar maka hal itu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan antar individu. Di Kabupaten Tuban, pada Tahun 2018 Indeks Gini Ratio mencapai angka 0,31, masih cukup jauh dari target yang ditetapkan sebesar 0,22. Sedangkan untuk Tahun 2019, target yang ditetapkan sebesar 0,22, selanjutnya ditargetkan turun di Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar 0,21.

2.1.4.2 Kesejahteraan Masyarakat

1) Indeks Pembangunan Manusia

Pada dasarnya seluruh upaya pembangunan daerah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan filosofi diatas digunakan sebuah angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk yang selain itu dapat digunakan sebagai penentu peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Di Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pembangunan yang hakiki tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tetapi secara holistik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dimaksud tidak hanya terfokus pada pembangunan gedung sarana dan prasarana, tetapi berimplikasi pada perubahan kualitas manusia. Bisa dianalogkan, pembangunan yang pro kepada kualitas manusia itu bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan pembangunan yang hakiki, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas manusia. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan upaya serius dengan program peningkatan kualitas manusia baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat merasa sejahtera, jika pembangunan memberikan implikasi tercapainya umur panjang dan sehat, masyarakat semakin berpengetahuan dan dapat hidup layak secara ekonomi. Potret implikasi pembangunan terhadap kualitas manusia dapat dilihat dari hasil capaian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Harapan Lama Sekolah (HLS), dimana pada Tahun 2018 berada pada angka 12,19 naik 0,01 poin dibandingkan Tahun 2017 sebesar 12,18. Sedangkan komponen lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2018 berada pada angka 6,52, naik 0,04 poin. Mengenai pertumbuhan IPM di Kabupaten Tuban Selama 6 tahun terakhir IPM Kabupaten Tuban terus mengalami kenaikan, namun demikian angka ini masih berada di bawah IPM Jawa Timur dan Nasional. Oleh karena itu perlu upaya yang serius agar IPM terus naik seiring dengan kesejahteraan

masyarakat yang merupakan muara dari proses pembangunan. Adapun data Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana Tabel berikut.

Gambar 10. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban

IPM	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Tuban	64.14	64.58	65.52	66.19	66,77	67,43
Jawa Timur	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27	70,77
Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	--

Sumber : BPS Kabupaten Tuban

2) Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tuban pada tahun 2017 adalah sebanyak 653.981 orang, dimana jumlah ini masih sangat besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yakni perbandingan antara penganggur dengan angkatan kerja. Angka TPT dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu 3,03 pada tahun 2015 menjadi 2,83 pada tahun 2018. Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban mulai menunjukkan hasil. Capaian TPT sebesar 2,83 berarti bahwa dari 100 orang yang angkatan kerja di Kabupaten Tuban masih terdapat 2-3 orang yang menganggur. Meskipun menurut ILO (International Labour Organization) bahwa TPT sebesar 3 persen sudah termasuk Full Employment (tidak ada pengangguran), Pemerintah Kabupaten Tuban tetap berkomitmen untuk fokus dan memastikan permasalahan angkatan kerja dan pengangguran tetap menjadi prioritas penanganan.

3) Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tuban Tahun 2018 mencapai 178.640 jiwa (15,31 persen), berkurang jika

dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 yang sebesar 196.100 jiwa (16,87 persen) dan berada di peringkat 5 (lima) tertinggi dari 38 kabupaten/kota se-Jatim. Yang tertinggi adalah Kabupaten Sampang (21,21 persen), sedangkan yang terendah adalah Kota Malang (3,89 persen). Untuk Propinsi Jawa Timur, prosentase penduduk miskin Tahun 2018 sebesar 10,98 persen, menurun dari Tahun sebelumnya (11,77 persen). Di wilayah eks-Karesidenan Bojonegoro (Bojonegoro, Tuban, Lamongan), persentase penduduk miskin Kabupaten Tuban merupakan yang tertinggi. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bojonegoro (13,16 persen). Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban kondisi tahun 2018 sebesar Rp. 328.268,- per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang besarnya Rp. 308.822,- per kapita per bulan.

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya. Hal tersebut tidak selalu tetap setiap tahunnya karena memang kebutuhan trend kebutuhan hidup manusia berubah setiap saat dan cenderung naik seiring kenaikan harga barang dan inflasi. Kenaikan Garis Kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2017- 2018 sebesar 4,85 persen ditunjukkan pada Tabel.

Gambar 11. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tuban tahun 2017-2018

No.	Data	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Penduduk Miskin	196.100	178.640
2.	Presentase Penduduk Miskin	16,87	15,31
No.	Data	Tahun 2017	Tahun 2018

2.1.4.3 Aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

dalam Implementasi kebijakan BLT Dana Desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) inilah yang memiliki kewenangan untuk dapat mengaturnya sesuai dengan Surat Edaran Bupati Tuban No. 140/2112/414.106/2020. Salah satu tugas Dinas PMD Kabupaten Tuban adalah melaksanakan, memantau dan melaksanakan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban

Dinas Sosial Kabupaten Tuban merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dan melaksanakan tugas dalam Perumusan Kebijakan, Perumusan Rencana, Pengkoordinasian Tugas-Tugas, Penyelenggaraan Pembinaan, Penyelenggaraan Penyusunan, Penyelenggaraan

Kerjasama, Penyelenggaraan Kesekretariatan, Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Penyelenggaraan Penilaian, Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai; Penyelenggaraan Laporan. Dalam Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa, OPD ini mempunyai tugas dalam pemenuhan data awal sebelum adanya kegiatan pendataan dan verifikasi. Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan.

3. Inspektorat Kabupaten Tuban

Inspektorat Kabupaten Tuban merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai salah satu unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan BLT Dana Desa, OPD ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Dari segi jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Pasolong (2016:75) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang terjadi secara nyata dalam proses melakukan penelitian. Jenis penelitian ini dipilih karena dapat menjelaskan gambaran keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang ada dalam menggambarkan pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban.

Pendekatan penelitian adalah cara Peneliti dalam usaha mengerti sebuah fenomena sosial. Pendekatan penelitian memberikan asumsi mengenai dunia sosial, bagaimana ilmu pengetahuan dikelola, dan apa yang sesungguhnya merupakan masalah, solusi, dan kriteria pembuktian (Craswell, 2008:1). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Craswell (2008:48) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mana peneliti sangat bergantung pada informasi dari partisipan/informan, ruang yang luas, pertanyaan, dan pengumpulan data yang sebagian besar terdiri dari kalimat yang dilakukan secara subyektif. Jenis penelitian ini dipilih karena dalam meneliti implementasi kebijakan BLT Dana Desa diperlukan dengan menggunakan data primer dan sekunder untuk dapat menarasikan hasil penelitian.

4.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Burhan Bungin (2005) adalah fokus penelitian atau pokok asal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Spradley dalam Sugiyono (2006:234) mengemukakan ada empat alternatif untuk menetapkan fokus yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan;
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organisasi domain;
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek;
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan dalam penelitian kedalam dua fokus yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Tuban Nomor 140/2112 /414.106/2020 tentang Penyaluran BLT Dana Desa menyebutkan bahwa pelaksanaan program BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban ke dalam 5 tahap sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim pendata BLT Dana Desa;
 - b. Menetapkan sasaran penerima BLT Dana Desa;
 - c. Mekanisme Pendataan penerima BLT Dana Desa;
 - d. Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa; dan
 - e. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa.
2. Faktor pendukung, penghambat dan upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban. Peneliti menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan dari Grindle yang memandang kebijakan dari dua faktor utama yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan:

a. Content of Policy;

- 1) Sejauh mana kelompok sasaran termuat dalam isi daripada kebijakan yang dirumuskan.
- 2) Jenis manfaat yang akan diterima nantinya oleh target groups.
- 3) Sejauh mana changes yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan.
- 4) Ketepatan letak sebuah program.
- 5) Kebijakan telah menyebutkan implementornya dalam isi kebijakannya
- 6) sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai dalam implementasinya.

b. Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)

- 1) Seberapa besar power/kekuasaan, kepentingan, dan juga strategi yang dipunyai stakeholders yang terlibat dalam implementasi.
- 2) Karakteristik institusi dan juga rejim yang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan juga responsivitas target group.

4.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena adanya isu yang berkembang, kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma Al Muchtar, 2015: 243). Menurut Nasution (2003: 43) mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan sebaran COVID-19 yang terjadi di kabupaten Tuban. Selain itu, angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Tuban sebelum adanya pandemi ini, kemudian dipicu dengan adanya pandemi yang akan berakibat pada peningkatan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Tuban. Penelitian ini berlangsung dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap *stakeholders* terkait dalam implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti mengungkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dengan demikian situs dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, dan rumah masyarakat penerima manfaat bantuan. Alasan Peneliti memilih situs penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Sosial Kabupaten Tuban yang mempunyai tugas untuk memberdayakan masyarakat dan mengumpulkan data awal masyarakat miskin di Kabupaten Tuban;
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tuban yang mempunyai tugas sebagai pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, khususnya dalam implementasi BLT Dana Desa;
- 3) Inspektorat Kabupaten Tuban yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya program penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban;
- 4) Kediaman masyarakat penerima bantuan BLT Dana Desa sebagai penerima manfaat dari program bantuan.

4.4 Jenis dan Sumber Data

4.4.1 Jenis Data

Ada dua jenis data dalam penelitian ini untuk proses mendapatkan dari subjek dan objek data. Data yang dimaksud digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Penggolongan ini dilakukan demi menjaga keakuratan dan relevansi serta kekayaan data yang diperoleh di lapangan sehubungan dengan objek penelitian ini. Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Menurut Arikunto (2010:22) data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, data meliputi informasi dan keterangan mengenai implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari orang-orang yang terkait dengan permasalahan tanpa melalui perantara, antara lain:

- 1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung serta mencatat peristiwa, kejadian, dan kegiatan pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban. Peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan program BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban dengan mengamati proses pendataan, musyawarah desa, penyaluran dan mekanisme pelaporan di beberapa desa di Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil penelitian, observasi dalam kegiatan penelitian ini dilakukan pengamatan khusus dan pencatatan sistematis yang ditujukan pada proses mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pemecahan persoalan baik secara kebijakan, lapangan maupun evaluasi secara keseluruhan. Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam kebijakan BLT Dana Desa yang dibuat memang sangat banyak mulai dari kebijakan dari pusat provinsi dan kabupaten/kota. Disisi lain, dalam pelaksanaannya data yang terdapat dalam sistem

Kementerian Sosial dalam situs Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih banyak ditemukan data ganda, data orang yang meninggal, data orang yang sudah pindah tempat tinggal tetapi masih terdata sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam sistem DTKS, sehingga diperlukan perbaikan data secara *sustainable* untuk dapat menghasilkan data terkini agar tepat sasaran dalam pemberian bantuan sosial.

2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dan lisan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada informan mengenai kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan dalam wawancara adalah pejabat dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan masyarakat, antara lain:

- a) Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tuban dengan menanyakan secara mendetail mengenai data kemiskinan di Kabupaten Tuban dan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tuban.
- b) Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban dengan menanyakan secara mendetail mengenai proses monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban.

- c) Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban menanyakan secara mendalam mengenai regulasi BLT Dana Desa, teknis pendataan, teknis penyaluran dan faktor pendukung dan pengambat dilapangan pada saat diimplementasikan.
- d) Beberapa masyarakat penerima BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban. Pemilihan masyarakat sebagai informan dengan menggunakan sistem acak (*random sampling*) dengan mengambil sampel dari beberapa desa di kecamatan yang berbeda. Desa yang dipilih adalah desa Prambontergayang dan Desa Mentoro Kec. Soko karena berdasarkan penelitian, kecamatan Soko memiliki jumlah KPM tertinggi di Kabupaten Tuban.

Dalam wawancara dalam penelitian ini, peneliti telah mendapatkan data primer mengenai pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban secara keseluruhan baik dalam proses rekrutmen pembentukan tim pendata, penetapan sasaran PMKS, melakukan proses pendataan, penyaluran BLT Dana Desa, proses pelaporan, dan monitoring serta evaluasi implementasi Kebijakan BLT Dana Desa. Data-data tersebut peneliti dapatkan dari proses wawancara dengan beberapa narasumber inti, yaitu dari Bapak Anto Wahyudi selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Dinas PMD Kabupaten Tuban, Dinas sosial, Inspektorat Kabupaten Tuban dan Masyarakat KPM.

3) Data Sekunder

Data sekunder didapat melalui Studi literatur/Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data sekunder dengan mempelajari buku-buku atau bahan-

bahan tertulis yang ada hubungannya dengan topik yang akan diteliti, termasuk data-data tertulis lainnya yang berasal dari lembaga yang dijadikan objek penelitian termasuk mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Data masyarakat miskin 2020 Dinas Sosial Kabupaten Tuban;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban 2020;
- d. Data KPM BLT Dana Desa Kabupaten Tuban 2020;
- e. Data jumlah desa yang menyalurkan BLT Dana Desa 2020;
- f. Surat Edaran Bupati Tuban tentang pelaksanaan BLT Dana Desa 2020;
- g. Data Anggaran BLT Dana Desa 2020 se-Kabupaten Tuban.

4.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat asal dari suatu data tersebut diperoleh baik dari seseorang maupun dari suatu peristiwa yang dapat mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan, peristiwa, dan dokumen yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Informan

Dalam penelitian kualitatif sumber data ini disebut dengan informan. Informan itu sendiri merupakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari para narasumber/informan dimana tentunya yang dapat

dipercaya dan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan peneliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *Criterion sampling*. *Criterion Sampling* adalah metode pemilihan informan yang bertujuan mendapatkan informan/kasus yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan data berdasarkan kasus yang diteliti sesuai dengan bidang tugas yang diemban masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terkait diantaranya Dinas PMD Kabupaten Tuban, Dinas Sosial Kabupaten Tuban, Inspektorat Kabupaten Tuban dan masyarakat KPM BLT DD. Dari penentuan tersebut, diambil beberapa informan yang dalam penelitian ini mempunyai wewenang dan tugas dalam menjalankan BLT DD di Kabupaten Tuban. Adapun sumber data primer yang akan digunakan peneliti adalah hasil wawancara dengan informan terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Durasi (Menit)	Frekuensi Wawancara	Tanggal	Lokasi	Metode
1	Bapak Anto Wahyudi, S.TP	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas PMD dan KB Kab. Tuban	00.51.51	1 kali	2 Desember 2020	Kantor Dinas PMD dan KB Kab. Tuban	Tatap Muka
2	Bapak Santoso, SH	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinsos kab. Tuban	00.52.46	1 kali	5 Desember 2020	Kantor Dinas Sosial Kab. Tuban	Tatap Muka
3	Ibu Dra. Sukartiwi	Irban Investigasi, Inspektorat Kab. Tuban	00.43.09	1 kali	16 Oktober 2020	Kantor Inspektorat Kab. Tuban	Tatap Muka
4	Bapak Drs. Bambang Suhaji, M.AP	Irban Inspektorat Kab. Tuban	00.21.40	1 kali	8 Oktober 2020	Kantor Inspektorat Kab. Tuban	Tatap Muka
5	Ibu Maskanah	KPM dari desa Prambontergayang	00.45.26	1 kali	24 November 2020	Rumah warga	Tatap Muka

6	Bapak Japar	KPM dari desa Mentoro	00.29.46	1 kali	22 November 2020	Rumah warga	Tatap Muka
---	-------------	-----------------------	----------	--------	------------------	-------------	------------

*) Catatan: Penelitian dilakukan selama 2 bulan (November-Desember 2020).
Sumber: Olahan Penulis (2020)

2) Tempat dan Peristiwa

Tempat merupakan lokasi yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian, sementara peristiwa merupakan kejadian atau keadaan yang terjadi di tempat penelitian. Tempat dalam hal ini adalah Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban, kantor dinas sosial Kabupaten Tuban, inspektorat Kabupaten Tuban, dan kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Tuban dengan peristiwa yang diamati adalah Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan mengamati setiap prosesnya yaitu dengan proses rekrutmen tim pendata BLT Dana Desa, penetapan sasaran BLT Dana Desa, metode dan mekanisme penyaluran, sistem pelaporan, kemudian pada proses monitoring dan evaluasi.

3) Dokumen

Dokumen yaitu memperoleh data dari bahan-bahan tertulis. Dokumen tersebut bertujuan untuk melengkapi informasi penelitian dalam mendapatkan data yang akurat. Dalam penelitian ini dokumen yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Data masyarakat miskin 2020 Dinas Sosial Kabupaten Tuban;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban 2020;
- d. Data KPM BLT Dana Desa Kabupaten Tuban 2020;
- e. Data jumlah desa yang menyalurkan BLT Dana Desa 2020;
- f. Surat Edaran Bupati Tuban tentang pelaksanaan BLT Dana Desa 2020;
- g. Data Anggaran BLT Dana Desa 2020 se-Kabupaten Tuban.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsaputra (2012:208) teknik pengumpulan data ditentukan oleh setting dan partisipan serta jenis data yang akan dikumpulkan. Oleh karena itu, penentuan teknik harus cocok dengan semua itu, sehingga data yang terkumpul benar-benar mengarah pada pemahaman fenomena sentral penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dengan melihat keadaan lapangan untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono (2011:226) observasi adalah aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Observasi dilakukan keunit analisis yang telah

ditentukan melalui pengamatan dan pencatatan data pada objek penelitian langsung di lapangan.

Dalam penelitian ini observasi telah dilakukan dengan observasi partisipan. Secara teknis observasi dilakukan dengan mengamati langsung dilapangan proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban dengan melihat dari proses pendataan masyarakat penerima bantuan, musyawarah dan kegiatan verifikasi di tingkat kabupaten dan juga kegiatan monitoring dan evaluasi ditingkat kabupaten. Kegiatan penelitian dilapangan dilakukan dalam waktu 1 bulan dimulai pada November sampai dengan Desember 2020.

Berdasarkan hasil penelitian, observasi dalam kegiatan penelitian ini dilakukan pengamatan khusus dan pencatatan sistematis yang ditujukan pada proses mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pemecahan persoalan baik secara kebijakan, lapangan maupun evaluasi secara keseluruhan. Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam kebijakan BLT Dana Desa yang dibuat memang sangat banyak mulai dari kebijakan dari pusat provinsi dan kabupaten/kota. Disisi lain, dalam pelaksanaannya data yang terdapat dalam sistem Kementerian Sosial dalam situs Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih banyak ditemukan data ganda, data orang yang meninggal, data orang yang sudah pindah tempat tinggal tetapi masih terdata sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam sistem DTKS, sehingga diperlukan perbaikan data secara *sustainable* untuk

dapat menghasilkan data terkini agar tepat sasaran dalam pemberian bantuan sosial.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Menurut Sugiyono (2011:231) pengertian wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya menurut garis besar yang akan ditanyakan kepada beberapa responden yang ditemui saat melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti memilih beberapa informan yaitu *stakeholders* yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban yaitu:

- a) Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tuban dengan menanyakan secara mendetail mengenai data kemiskinan di Kabupaten Tuban dan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tuban.
- b) Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban dengan menanyakan secara mendetail mengenai proses monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban.
- c) Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban menanyakan secara mendalam mengenai regulasi BLT Dana Desa, teknis pendataan,

teknis penyaluran dan faktor pendukung dan pengambat dilapangan pada saat diimplementasikan.

- d) Beberapa masyarakat penerima BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban. Pemilihan masyarakat sebagai informan dengan menggunakan sistem acak (*random sampling*) dengan mengambil sampel dari beberapa desa di kecamatan yang berbeda. Desa yang dipilih adalah desa Prambontergayang dan Desa Mentoro Kec. Soko karena berdasarkan penelitian, kecamatan Soko memiliki jumlah KPM tertinggi di Kabupaten Tuban.

Penelitian ini telah dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan dengan melakukan wawancara dengan informan yang berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Keseluruhan proses wawancara direkam dengan menggunakan Handphone yang kemudian dideskripsikan dengan bentuk transkrip wawancara yang kemudian akan dinarasikan. Kegiatan wawancara dilakukan dalam waktu 60 menit tiap informan dengan berpedoman pada pedoman wawancara (*interview guide*).

Waktu wawancara dilakukan sesuai dengan waktu yang diluangkan oleh informan untuk melakukan wawancara. Pemilihan informan dilakuakn sesuai peran dan kapasitasnya.

Tabel 4. Teknis Wawancara

Detail Wawancara	Keterangan
Subjek	OPD terkait, inspektorat, Masyarakat penerima bantuan
Tempat	Lokasi dilakukan di kantor OPD terkait di Kabupaten Tuban
Waktu(Rentan Waktu)	November 2020 (1 Bulan)
Durasi	1 jam/per wawancara
Alat	Perekam suara, Kamera

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Dalam wawancara ini, peneliti telah mendapatkan data primer mengenai pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban secara keseluruhan baik dalam proses rekrutmen pembentukan tim pendata, penetapan sasaran PMKS, melakukan proses pendataan, penyaluran BLT Dana Desa, proses pelaporan, dan monitoring serta valuasi implementasi Kebijakan BLT Dana Desa. Data-data tersebut peneliti dapatkan dari proses wawancara dengan beberapa narasumber inti, yaitu dari Bapak Anto Wahyudi selaku Kepala Bagian Pemerintah Desa, Dinas PMD Kabupaten Tuban, Dinas sosial, Inspektorat Kabupaten Tuban dan Masyarakat.

3. Studi dokumen/Studi Pustaka.

Studi dokumen yaitu dengan jalan melihat dan mempelajari dokumen, peraturan, laporan yang terkait dengan penelitian dan studi pustaka yaitu pengambilan data berupa referensi yang didapat dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan untuk dikumpulkan sebagai landasan teori.

5.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2011:222) adalah sesuatu yang menjadi instrumen atau alat dalam penelitian itu sendiri. Instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Dalam penelitian ini, instrumen atau alat yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri

Menggunakan metode kualitatif, dimana pengumpulan data tergantung dari peneliti sendiri melalui aktivitasnya dalam mencari, menyerap dan mengambil data berdasarkan hasil di lapangan. Peneliti berfungsi sebagai sumber data dalam melakukan pengumpulan data, menganalisis data hingga membuat kesimpulan atas temuannya.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mencari data yang dibutuhkan. Tahapan pembuatan pedoman wawancara pertama kali dengan mengajukan surat permohonan penelitian untuk selanjutnya dapat melakukan wawancara oleh informan, kemudian membuat daftar informan dan melakukan perjanjian kepada informan yang akan diwawancarai. Selanjutnya yaitu dengan membuat dan mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti untuk diajukan kepada informan yang bersangkutan sesuai dengan fokus penelitian.

3. Catatan lapangan (*field note*)

Catatan ini merupakan sebuah penelitian yang dapat didengar, dilihat dan dipikirkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan ini berisi tentang berbagai hasil yang telah ditemukan di lapangan terkait dengan permasalahan yang terjadi saat penelitian.

4. Alat dokumentasi

Alat dokumentasi ini sebagai alat penunjang dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini alat dokumentasi yang digunakan antara lain kamera untuk mengabadikan kondisi dan situasi di lapangan sehingga dapat menjadi gambar

pendukung dalam penelitian, serta perekam suara untuk merekam suara pada saat wawancara berlangsung.

4.7 Keabsahan Data

Hasil penelitian kualitatif dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, reliabilitas, dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Istilah validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam penelitian kuantitatif berbeda dalam penelitian kualitatif. Jika dalam metode penelitian kuantitatif terdapat istilah validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas, maka dalam metode penelitian kualitatif keempat istilah tersebut masing-masing dikenal dengan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Usman dan Purnomo, 2009: 97-98).

1. Kredibilitas

Kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep penulis dengan konsep responden (Usman dan Purnomo, 2009: 98). Agar kredibilitas dalam penelitian ini terpenuhi, maka penulis melakukan beberapa cara, antara lain:

a. Mengadakan Triangulasi

Patton (dalam Poerwandari, 1998: 132) menjelaskan konsep triangulasi dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

1) Triangulasi Data

Triangulasi data yakni digunakannya variasi sumber-sumber data yang berbeda. Variasi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu partisipan penelitian yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Dalam penelitian ini triangulasi

data dilakukan dengan melihat varian data yang terkumpul untuk dapat dianalisis yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban dari berbagai perspektif yang mendukung maupun tidak. Data yang digunakan dalam proses ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer peneliti peroleh melalui proses wawancara yang telah peneliti lakukan dengan berbagai informan yang bersangkutan, kemudian peneliti juga melakukan observasi terhadap pelaksanaan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban.

2) Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah digunakannya beberapa penulis atau evaluator yang berbeda. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing juga bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang menjadi evaluator secara substansi dan kepenulisan adalah Ibu Prof. Dr. Sjamsyiar Sjamsuddin dan Bapak Fadillah Amin, Ph.D selaku dosen pembimbing pada penelitian ini.

3) Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah digunakannya beberapa perspektif yang berbeda untuk menginterpretasi data yang sama. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data penelitian. Triangulasi teori dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa teori/model implementasi kebijakan yang peneliti pilih untuk dapat menganalisis data dan menginterpretasi dalam kegiatan penelitian implementasi kebijakan BLT Dana Desa di

Kabupaten Tuban. Beberapa teori yang peneliti gunakan dalam proses ini adalah pada tahap persiapan pelaksanaan pembentukan tim, selain peneliti mengungkapkan mengenai konsep pembentukan *teamwork* dalam menjalankan tugas, peneliti juga menggunakan proses *capacity building* untuk dapat memberikan arahan, petunjuk, dan meningkatkan kompetensi dari tim yang telah dibuat sebelum melaksanakan tugas. Dalam tahap penetapan sasaran selain mengungkapkan secara konsep sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peneliti juga menggunakan teori dari Grindle mengenai kelompok sasaran didalam teori implementasi kebijakan model “Top-Down” yang melihat kebijakan dari isi kebijakan dan lingkungan yang memengaruhinya. Dalam proses mekanisme pendataan BLT Dana Desa dimana diulas mengenai konsepsi pendataan yang dilakukan dan dianalisis mengenai pendekatan modal sosial dalam proses pendataanya dengan melibatkan masyarakat dan musyawarah menuju mufakat.

2. Transferabilitas

Transferabilitas ialah apabila hasil penelitian kualitatif itu dapat digunakan atau diterapkan pada kasus atau situasi lainnya. Penulis dapat meningkatkan nilai transferabilitas penelitiannya dengan cara membuat deskripsi tebal, yang detail dan terinci tentang laporan dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai hasil temuan penelitiannya (Prabowo, 2007: 81). Melalui deskripsi tebal ini, sekiranya pembaca dapat memahami hasil temuan penelitian dengan lebih baik. Dengan demikian, pembaca tersebut akan lebih banyak memiliki peluang untuk mentransfer sendiri hasil temuan penelitian ke

dalam kasus atau situasi lain yang mirip dan mampu membuat keputusan sendiri yang berkaitan dengan penelitian yang telah dibacanya.

Selain itu, untuk meningkatkan standar transferabilitas penelitian, penulis menggunakan teknik sampling purposif dengan karakteristik subjek yang jelas. Karena dengan karakteristik subjek yang jelas, maka pembaca akan lebih mudah mentransfer hasil temuan penelitian pada kasus-kasus lain yang memiliki karakteristik subjek hampir sama.

3. Dependabilitas

Dependabilitas ialah apabila hasil penelitian kita memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang diulang pihak lain. Kemampuan ini dapat dicapai dengan meminta seorang auditor independen untuk memeriksanya, hal ini disebut dengan audit trail. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bantuan dosen pembimbing untuk memeriksa konsistensi tentang semua materi, tahap, dan temuan hasil penelitian. Usman dan Pramono (2012: 99) memaparkan agar dosen pembimbing mudah melakukan audit trail, maka penulis menyiapkan data mentah, hasil analisis data, dan hasil sintesis data, yaitu tafsiran, kesimpulan, tema, pola, hubungan dengan kepustakaan, dan laporan akhir.

4. Konfirmabilitas

Prabowo (2007: 82) menyatakan jika konfirmabilitas digunakan untuk melihat bahwa hasil penelitian bersifat netral dan tidak penuh dengan bias-bias pribadi peneliti. Konfirmabilitas dapat dicapai dengan melakukan

pengecekan dan penelurusan secara menyeluruh tentang penelitian itu kembali, antara lain dengan melakukan pengecekan ulang terhadap informasi penelitian yang masih mentah, proses analisis informasi penelitian yang sistematis, pembahasan data fenomenal dikofrontasikan dengan tinjauan pustaka untuk menguji hasil temuan penelitian, pemeriksaan asumsi dan prasangka penulis. Untuk memenuhi kriteria tersebut, penulis melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.

Dalam penelitian ini, konfirmabilitas dilakukan dengan melihat kembali kesesuaian hasil penelitian apakah data yang dimiliki kurang atau tidak sesuai, sistematika penelitian apakah sudah sesuai dengan pedoman, dan melihat kembali apakah asumsi atau pernyataan yang peneliti uraikan didukung dengan data dan fakta. Untuk itu pada penelitian implemtnasi kebijakan BLT Dana Desa ini peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing tesis yaitu Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin dan Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D untuk dapat memberikan arahan, masukan, saran untuk perbaikan atas penelitian yang Peneliti lakukan.

4.8 Teknik Analisis Data

Umumnya, penulis kualitatif menggunakan prosedur yang umum dan langkah langkah khusus dalam analisis data. Dalam penelitian ini teknis analisis data menggunakan teknik analisis data dari Creswell. Creswell (2013) mengajak penulis kualitatif untuk melihat analisis data kualitatif sebagai suatu proses penerapan langkah-langkah dari yang spesifik hingga umum dengan berbagai level analisis yang berbeda. Lebih lanjut Creswell (2013: 276-284) menjabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis data berikut ini:

- 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Dalam tahap ini akan dilakukan dengan memilah data-data primer maupun sekunder untuk dapat disajikan. Pada data primer dilakukan pengetikan hasil wawancara dengan berbagai informan, yakni dari dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, dan inspektorat dengan memilah data lapangan lainnya yang didapat untuk dipersiapkan. Untuk data sekunder dilakukan proses pengecekan apakah data-data yang terkumpul sudah sesuai dengan yang dibutuhkan atau belum terkait dengan pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa sebagai perlindungan masyarakat miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban.
- 2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini dilakukan pengecekan data secara keseluruhan baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban. Pada tahap ini dilakukan untuk membangun makna umum atas informasi yang diperoleh dari informan untuk dapat dipahami oleh peneliti.
- 3) Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Rosman dan Rallis, dalam Creswell, 2013: 276). Dalam proses coding ini, penulis mengkombinasikan kode-kode yang telah ditentukan sebelumnya (*predetermined code*) dan membuat kode-kode berdasarkan informasi yang muncul dengan sendirinya (*emerging code*) (Creswell, 2013).

Sehingga, proses coding dalam penelitian ini adalah dengan menfitkan kode-kode yang muncul selama proses analisis data dengan data penelitian.

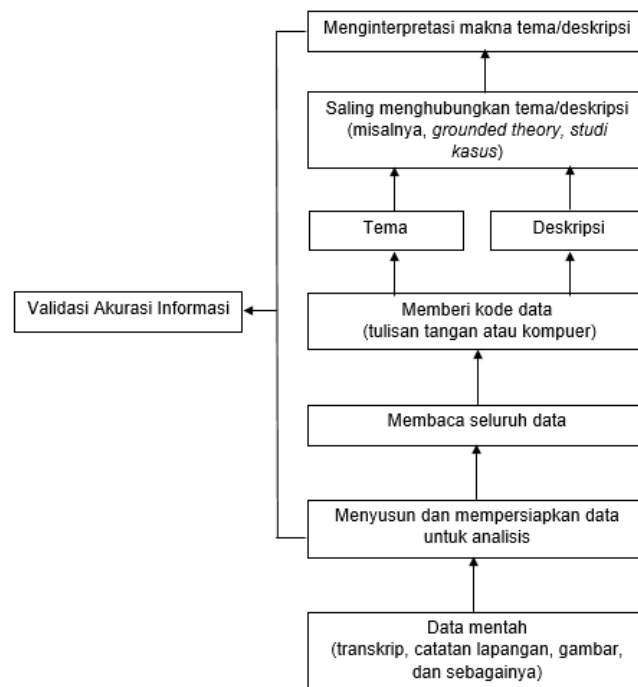
Dalam penelitian ini proses coding dilakukan dengan menganalisis dan memilah data yang berkaitan dengan mengelompokkan data-data yang ada, baik primer maupun sekunder untuk dapat memudahkan proses interpretasi data dengan teori yang digunakan dalam analisis. Dalam penelitian implemantasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban ini dilakukan proses coding dengan melihat data-data yang ada berdasarkan masing-masing fokus penelitian, sehingga didapatkan hubungan kausalitas dalam suatu permasalahan yang dibahas.

- 4) Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Pada langkah ini, penulis membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi, lalu menganalisisnya. Tema-tema inilah yang kemudian dijadikan judul dalam bagian hasil penelitian. Dalam penelitian ini, setelah proses coding data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengelompokkan data dalam kategori tertentu, dalam penelitian ini data akan dikategorikan dengan beberapa tema yaitu kemiskinan, penerima bantuan BLT, penghambat implementasi, proses pendataan bantuan, verifikasi, kemudian data mengenai monitoring dan evaluasi dari tingkat kabupaten,
- 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan naratif ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologis peristiwa, tema-tema tertentu, atau tentang keterhubungan antar tema. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data-data yang ada ke dalam narasi yang saling berkaitan antar data yang mempunyai

hubungan kausalitas. Kronologis proses implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban dideskripsikan secara nyata berdasarkan temuan-temuan yang ada yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder.

- 6) Langkah terakhir adalah dengan menginterpretasi atau memaknai data. Langkah ini akan membantu penulis dalam mengungkap esensi dari suatu gagasan (Lincoln dan Guba dalam Creswell, 2013). Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. dalam penelitian ini setelah data-data dideskripsikan dan dinarasikan langkah selanjutnya adalah menginterpretasi temuan yang ada dan telah dinarasikan dengan teori-teori dan regulasi/kebijakan yang digunakan dalam menganalisis data.

Gambar 15. Model analisis data Cresswell



Gambar 12. Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: Creswell (2013)

Dalam penelitian ini, proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan disini menggunakan metode dari Creswell dalam Idrus M. (2009:152) yang dimaksudkan agar peneliti dalam melaksanakan langkah dalam mencari makna secara menyeluruh (*holistic meaning*) dari apa yang diperoleh selama penelitian di lapangan. Dan tidak berhenti sampai disini saja, melainkan dari kesimpulan yang diambil masih membutuhkan adanya verifikasi ulang pada catatan lapangan atau diskusi dengan teman sejawat untuk kepentingan terbangunnya “kesepakatan intersubjektif”, dan dari hasil tersebut dapat dianggap bahwa data tersebut bernilai valid atau *reliable*.

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, yang pertama menyusun simpulan sementara, tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada. Kedua, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah peneliti secara konseptual.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) menjelaskan bagaimana dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemukan dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola sistematis penelitian, pencatatan-pencatatan data wawancara yang telah didapatkandari beberapa informan, konfigurasi-konfigurasi, menggunakan alur sebab-akibat dan menarasikan dari literatur referensi buku sosial dan politik. Hal itu akan diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir yang merupakan bagian akhir dari penelitian penulis dalam menganalisis suatu masalah yang lebih spesifik dan tepat dengan teori-teori yang sesuai.

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah Peneliti peroleh berdasarkan data penelitian tentang Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban. Dalam Bab ini memuat dua subbab yaitu yang pertama mengenai Penyajian Data hasil penelitian dan analisis yang berisi teori hasil penelitian yang disandingkan dengan data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder.

5.1 Penyajian Data

5.1.1 Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk menjaga Stabilitas Keuangan Negara dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Jaring pengaman sosial ini diberikan atas dasar untuk dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan ditingkat desa untuk menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemi COVID-19. Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa dilaksanakan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020, peraturan menteri keuangan nomor 50 tahun 2020, Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020

tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa; Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa; Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa dan Surat Edaran Bupati Tuban Nomor 140/2112 /414.106/2020 tentang Penyaluran BLT Dana Desa bahwa pelaksanaan dilapangan mengenai kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban dilakukan dengan melalui tahapan, diantaranya adalah pembentukan tim pendataan, penetapan sasaran, mekanisme pendataan, metode dan mekanisme penyaluran serta monitoring dan evaluasi.

5.1.1.1 Pembentukan tim pendata BLT DD

Dalam pembentukan tim pendata, Pemerintah Desa se-Kabupaten Tuban dapat menentukan sendiri siapa calon pendata BLT Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan untuk dapat melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintah desa Desa. Berikut adalah mekanisme tim Pendataan BLT DD yang mempunyai tugas dan fungsi untuk: (1) melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa dan Kecamatan dalam rangka penyediaan data Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai dengan DTKS; (2) Melakukan pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dengan sasaran

Keluarga Miskin yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bansos Tunai dan kartu Pra Kerja, serta keluarga miskin yang Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, Belum terdata (exclusion error; dalam Basis Data Terpadu (BDT), Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; (3) Bekerjasama dengan Pemerintahan Desa, RT RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Pendamping Desa dalam rangka pendataan keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD); (4) Dalam melakukan pendataan dapat menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing sesuai dengan kondisi objektif di desa dan sesuai dengan kesepakatan Tim; (5) Melaporkan hasil pelaksanaan Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT DD.

Tim pendata adalah tim yang dibentuk oleh kepala desa untuk dapat melaksanakan pendataan untuk warga masyarakat di desa yang bersangkutan untuk dapat memilih sesuai kriteria calon KPM yang terdiri dari Perangkat desa, pendamping desa, dan tokoh masyarakat/pemuda desa. Dengan demikian tim pendata adalah anggota Relawan Desa Lawan Covid-19 di masing-masing desa. Berikut adalah mekanisme pendataan berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- b. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;

- c. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- d. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- e. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Sejalan dengan regulasi tersebut Bapak Anto Wahyudi selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas PMD Kabupaten Tuban juga menyatakan proses pendataan calon KPM BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban sebagai berikut:

“pendataan bisa dibilang kita serahkan kepada pemerintah desa sendiri, kita dari dinas hanya mengkoordinasi dan memeberikan juknis dari kebijakan pusat seperti apa. Kita hanya perantara saja dan mengawasi. Teknisnya kepala desa membentuk tim pendata yang terdiri dari pemerintah desa, ketua RT dan RW setempat untuk mendata warganya yang sesuai dengan kriteriadan menuliskan dengan formulir yang telah disediakan. Dari hasil pendataan di seluruh RT di setiap dusun kemudian dibawa ke dalam musyawarah desa untuk dapat benar-benar dilakukan diskusi mengenai calon penerima. Kemudian setelah ditetapkan oleh Kades, baru diserahkan kepada kecamatan setempat. Dari sini kemudian ditetapkan oleh bupati dengan tembusan kepada dinas pmd dan inspektorat” (Hasil wawancara pada 8 Desember 2020 di Kantor Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pendataan calon KPM BLT Dana Desa sudah dilaksanakan dengan regulasi yang berlaku. Hal ini terlihat dari pernyataan diatas yang menyebutkan proses pendataan yang dilakukan dan disosialisasikan kepada pemerintah desa mengenai teknis tatacara proses pendataan. Berikut adalah dokumentasi beberapa desa di kabupaten Tuban yang melaksanakan proses pendataan mulai dari pembentukan tim sampai dengan musyawarah desa untuk menetapkan calon KPM BLT Dana Desa:

Gambar 13. Pembentukan tim pendata BLT Dana Desa di Desa Kradenan Kec. Palang Kab. Tuban



Sumber: Dinas PMD dan KB Kab. Tuban

Pembentukan tim pendata merupakan langkah awal dalam proses pendataan BLT Dana Desa. Pembentukan tim menjadi penting dikarenakan menjadi tolak ukur utama pelaksanaan BLT DD yang menentukan ketepatan sasaran calon penerima BLT DD. Pembentukan tim pendata BLT DD di Kabupaten Tuban ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Tuban Nomor Nomor 140/2112/414.106/2020 tentang Penyaluran BLT Dana Desa yaitu dengan menugaskan:

1. kepala desa membentuk tim pendata calon penerima BLT DD dengan mengikutsertakan ketua RT sesuai dengan wilayah pendataan;
2. anggota Tim pendata calon penerima BLT Dana Desa berasal dari gugus tugas pencegahan dan penanganan Covid-19 tingkat desa dari unsur perangkat desa, pengurus/anggota LKD, dan tokoh masyarakat/agama/pemuda;

3. susunan tim pendata calon penerima BLT DD terdiri dari ketua merangkap anggota, ex officio dijabat oleh kepala desa, sekretaris merangkap anggota, anggota anggota dan ketua RT setempat sebagai pendamping.
4. Jumlah tim pendata calon penerima BLT DD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

. berdasarkan wawancara dan observasi peneliti di beberapa desa, pembentukan tim pendata dilaksanakan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing desa sehingga jumlahnya berbeda di setiap desa, namun secara struktur hampir sama. Sesuai dengan pernyataan tersebut berikut adalah petunjuk teknis pelaksana Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 mengenai pendataan Calon Keluarga Penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut

- a. Pendata calon penerima BLT-DD adalah relawan desa yang menerima Surat Tugas oleh Kepala Desa.
- b. Pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT)
- c. Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil.
- d. Calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT.
- e. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana poin (d) tetapi tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS.

- f. Calon penerima BLT-DD harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- g. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan BLT DD di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang terdapat diatas sehingga secara pembentukan tim tidak didapatkan kendala yang berarti dalam proses pembentukan tim karena telah disebutkan secara rinci mengenai teknis pelaksanaan dilapangan.

5.1.1.2 Penetapan sasaran penerima BLT Dana Desa

Sasaran penerima BLT Dana Desa ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria serta belum menerima bantuan sosial apapun. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 pasal 8A ayat (3) menjelaskan keluarga miskin yang dimaksud adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan atau sakit menahun/kronis. Jadi dapat disimpulkan bahwa sasaran penerima BLT Dana Desa adalah masyarakat miskin dan rentan baik yang terdampak pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak untuk dapat menjaga kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan sehari-hari.

Selain kebijakan tersebut, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 32A ayat (3) menyatakan bahwa kriteria penerima bantuan adalah: (1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan (2) Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), KartuSembako, dan Kartu PraKerja.

Secara nasional sasaran kebijakan ini adalah 7.804.978 KPM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah KPM BLT Dana Desa berdasarkan pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah (KK)	Persentase (%)
1.	Petani dan buruh tani	6.868.381	88%
2	Nelayan dan buruh nelayan	315.028	4%
3	Buruh pabrik	156.954	2%
4	Guru	70.270	1%
5	Pedagang dan UMKM	394.345	5%
Jumlah		7.804.978	100%

Sumber: Kemendes (2020)

Implementasi BLT Dana Desa di kabupaten Tuban berdasar kepada Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 411.2/3300/112.2/2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid 19 di Desa. Selain itu, dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Tuban Nomor 140/2112 /414.106/2020 tentang Penyaluran BLT Dana Desa. Di Kabupaten Tuban, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani kebijakan ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana (Dinas PMD dan KB) Kabupaten Tuban. Dinas PMD dan KB ini yang mempunyai tanggungjawab dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa

di Kabupaten Tuban sebagaimana pernyataan Bapak Anto Wahyudi selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas PMD dan KB sebagai berikut:

“BLT di daerah memang kita yang menangani. Tapi ini kan ketentuan dari pemerintah pusat, kita hanya memfasilitasi saja. Memberikan juknis pelaksanaannya impelementasinya seperti apa. Melakukan sosialisasi kepada kecamatan dan pemerintah desa bagaimana cara menetapkan sasaran, proses pendataan, dan pengawasan dari kecamatan, BPD dan masyarakat desa setempat. BLT Dana Desa ini secara teknis merupakan kewenangan pemerintah desa untuk menganggarkan dalam dana desa ataupun tidak disesuaikan saja dengan kondisi masyarakat sesuai dengan sasaran” (Hasil wawancara pada 8 Desember 2020 di Kantor Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan BLT Dana Desa ditingkat daerah kabupaten dilaksanakan oleh Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban, namun secara teknis pendataan dan penyaluran adalah wewenang pemerintah desa untuk mengelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam implementasinya sasaran dalam program ini adalah masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan sosial yang lain baik dari pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Anto Wahyudi sebagai berikut:

“Sasaran kita sesuai dengan regulasi yang ada mas, seperti permendes nomer 6, permenkeu nomer 50 dan SE pemda provinsi yaitu masyarakat miskin yang terdampak pandemi seperti hilang pekerjaan karena pandemi, masyarakat miskin yang belum menerima bansos manapun, masyarakat miskin yang rentan seperti KPM ynag kepala keluarganya wanita, lansia, masyarakat yang sakit menahun karena penyakit kronis. Semua itu kami sampaikan melalui bimtek yang kami lakukan dengan bekerjasama dengan sekda untuk menyampaikan amanat sasaran ini” (Hasil wawancara pada 8 Desember 2020 di Kantor Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban).

Pernyataan diatas menegaskan bahwa sasaran dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa ini adalah masyarakat miskin dan rentan yang kehilangan pekerjaannya sesuai dengan yang diamankan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 pasal 8A ayat (3). Penetapan sasaran ini akan terlaksana apabila adanya

koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait mengenai data masyarakat yang memang dibutuhkan sebagai acuan calon KPM dari BLT Dana Desa ini. Dalam prakteknya, program ini melaksanakan kerjasama dengan OPD lain diantaranya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dan Dinas Sosial Kabupaten Tuban sesuai dengan pernyataan Bapak Anto Wahyudi selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa sebagai berikut:

“koordinasi di tingkat daerah berjalan dengan lancar. Dari dinas kami sendiri apabila mengadakan rapat koordinasi dan selalu mengundang dari inspektorat selain dari pemerintah desa sendiri. Kecamatan juga kami libatkan karena nanti juga pasti berhubungan dan agar terjadi hubungan yang kerja yang sinergi. Dalam program BLT ini kami berkoordinasi dengan dinsos juga mengenai sistem DTKS yang nanti diperlukan dalam mengkroscek calon KPM apakah benar-benar masyarakat tersebut miskin dan belum menerima bantuan sosial yang lain atau sudah. Apabila sudah maka calon KPM tersebut langsung gugur sebagai penerima bantuan. Apabila di data DTKS belum ada, maka nama yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai KPM BLT Dana Desa. Selain itu, dari setda juga membantu dalam proses sosialisasi ke masyarakat dan bimtek untuk pemerintah desa. Kerjasama kami jalankan untuk kelancaran implementasi program ini. Kaya kemaren pas ada rapat koordinasi mengenai SE Bupati. Peserta Rapat Koordinasi terdiri dari Inspektorat, Camat, Kasi Kecamatan, Pendamping APBDesa, dan Staf Dinas PMD” (Hasil wawancara pada 8 Desember 2020 di Kantor Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban).

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait dalam pelaksanaan program BLT Dana Desa diantaranya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa itu sendiri, Dinas Sosial, Inspektorat Kabupaten Tuban, Kecamatan, Pendamping Desa. Dari adanya koordinasi tersebut menghasilkan kebijakan di tingkat kabupaten dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Tuban Nomor: 140/2112 /414.106/2020 tentang penyaluran BLT Dana Desa tertanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Dr. Budi Wiyana (terlampir). Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut diharapkan pelaksanaannya dilakukan secara efektif, artinya tepat sasaran

dan nonpartisan, artinya dilakukan sesuai peraturan yang berlaku tanpa membedakan karena alasan atau kepentingan tertentu.

Gambar 14. sasaran BLT Dana Desa se-Jawa Timur 2020

No	Kabupaten	PAGU DD	20 % Dari Pagu DD	KEMAMPUAN BLT DD (KPM)	No	Kabupaten	PAGU DD	20 % Dari Pagu DD	KEMAMPUAN BLT DD (KPM)
1	2	3	4		1	2	3	4	
1	PACITAN	150.656.730.000	30.131.346.000	16.740	17	JOMBANG	280.150.133.000	56.030.026.600	31.128
2	PONOROGO	257.356.035.000	51.471.207.000	28.595	18	NGANJUK	287.836.252.000	57.567.250.400	31.982
3	TRENGGALEK	154.882.638.000	30.976.527.600	17.209	19	MADIUN	162.590.785.009	32.518.157.002	18.066
4	TULUNGAGUNG	237.663.966.000	47.532.793.200	26.407	20	MAGETAN	171.377.664.000	34.275.532.800	19.042
5	BLITAR	191.476.398.000	38.295.279.600	21.275	21	NGAWI	197.263.598.000	39.452.719.600	21.918
6	KEDIRI	322.882.645.000	64.576.529.000	35.876	22	BOJONEGORO	367.201.310.000	73.440.262.000	40.800
7	MALANG	383.481.676.000	76.696.335.200	42.609	23	TUBAN	263.445.066.000	52.689.013.200	29.272
8	LUMAJANG	195.267.518.000	39.053.503.600	21.696	24	LAMONGAN	371.757.666.000	74.351.533.200	41.306
9	JEMBER	305.112.329.000	61.022.465.800	33.901	25	GRESIK	287.891.804.000	57.578.360.800	31.988
10	BANYUWANGI	212.947.095.000	42.589.419.000	23.661	26	BANGKALAN	330.890.066.000	66.178.013.200	36.766
11	BONDOWOSO	238.475.671.000	47.695.134.200	26.497	27	SAMPANG	233.187.661.000	46.637.532.200	25.910
12	SITUBONDO	139.269.225.000	27.853.845.000	15.474	28	PAMEKASAN	204.903.215.000	40.980.643.000	22.767
13	PROBOLINGGO	432.707.687.000	86.541.537.400	48.079	29	SUMENEP	341.286.410.000	68.257.282.000	37.921
14	PASURUAN	368.742.957.000	73.748.591.400	40.971	30	KOTA BATU	29.193.055.000	5.838.611.000	3.244
15	SIDOARJO	296.168.960.000	59.233.792.000	32.908					
16	MOJOKERTO	238.168.355.000	47.633.671.000	26.463					
					TOTAL		7.654.234.570.009	1.530.846.914.002	850.471

Sumber: Dinas PMD Tuban

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah sasaran KPM BLT Dana Desa di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 850.471 KPM dengan penganggaran rata-rata sebesar 20% dari total pagu Dana Desa. Sasaran penerima BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 29.272 KPM yang tersebar di 20 Kecamatan. Sedangkan pada pelaksanaannya jumlah KPM yang telah terdata di Kabupaten Tuban adalah sebanyak 33.238 KPM. Berikut adalah rincian data KPM BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban berdasarkan masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah KPM BLT Dana Desa Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah KPM BLT DD (KK)	Anggaran (Rp)
1.	Kenduruan	766	Rp1.378.800.000
2.	Jatirogo	1562	Rp2.811.600.000

3.	Bangilan	1708	Rp3.072.600.000
4.	Bancar	1667	Rp3.324.600.000
5.	Senori	1365	Rp2.457.000.000
6.	Tambakboyo	1724	Rp3.103.200.000
7.	Singgahan	1951	Rp3.511.800.000
8.	Kerek	1535	Rp3.060.000.000
9.	Parengan	2347	Rp4.224.600.000
10.	Montong	1324	Rp2.383.200.000
11.	Soko	2676	Rp4.884.000.000
12.	Jenu	2068	Rp3.703.400.000
13.	Merakurak	1841	Rp3.565.800.000
14.	Rengel	1768	Rp3.182.400.000
15.	Semanding	1676	Rp3.045.250.000
16.	Tuban	415	Rp747.000.000
17.	Plumpang	2211	Rp4.233.193.700
18.	Palang	2225	Rp4.005.000.000
19.	Widang	1618	Rp2.912.400.000
20.	Grabagan	791	Rp1.423.800.000
Jumlah		33.238	Rp61.029.643.700

Sumber: Dinas PMD dan Pemdes dan KB Kab. Tuban (2020)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa KPM BLT Dana Desa telah mencapai sasaran. Dari data diatas terlihat bahwa masing-masing kecamatan mempunyai jumlah KPM yang beragam. Kecamatan yang paling banyak menerima BLT Dana Desa adalah Kecamatan Soko dengan jumlah KPM sebanyak 2676 dengan total anggaran sebanyak Rp4.884.000.000. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penerima manfaat berada di kecamatan Tuban dengan jumlah KPM 415 dan total anggarana sebanyak Rp747.000.000. Secara spesifik, penetapan KPM diputuskan oleh pemerintah desa setelah dilaksanakan pendataan oleh tim pendata yang berasal dari Relawan Desa Lawan Covid-19. Baru kemudian dilakukan musyawarah desa khusus (musdesus) atau musyawarah insidentil untuk membahas bersama mengenai jumlah calon KPM BLT Dana Desa.

Jumlah Desa di Kabupaten Tuban adalah sebanyak 311 Desa dan 17 Kelurahan yang tersebar di 20 Kecamatan. Dari total 311 Desa, terdapat 310 desa

yang menganggarkan BLT Dana Desa dalam APBDes dan terdapat 1 Desa yang tidak menganggarkan BLT Dana Desa dalam APBDes. Desa yang tidak menganggarkan BLT Dana Desa tersebut adalah Desa Bunut Kecamatan Widang. Setelah dikonfirmasi dengan dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban menyatakan bahwa setelah dilakukan musyawarah khusus desa, maka diambil keputusan untuk tidak melaksanakan kebijakan BLT Dana Desa bagi masyarakat desa setempat.

5.1.1.2 Mekanisme Pendataan Penerima BLT Dana Desa

Data merupakan kunci bagi terwujudnya efektifitas/ketepatan sasaran dari pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan mekanisme pendataan yang dirancang dengan baik untuk dapat menjangkau warga masyarakat secara tepat sasaran. Masyarakat miskin dan rentan sebagai sasaran penerima bantuan sosial haruslah memang dipastikan sebagai KPM dalam pemberian bantuan sosial. Kemiskinan di Kabupaten Tuban merupakan salah satu yang terbesar di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah yang masuk dalam 10 Daerah termiskin di Jawa Timur.

Kemiskinan di Kabupaten Tuban berdasarkan data BPS Kabupaten Tuban tahun 2020 adalah sebesar 142. 774 Rumah Tangga. Rincian dari data kemiskinan di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Angka Kemiskinan di Kabupaten Tuban

No.	Persentase Kemiskinan	Jumlah Masyarakat Miskin	Jumlah Rumah Tangga Miskin
1.	14,58%	170.800	142. 774

Sumber: Dinas Sosial (2020)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kabupaten Tuban adalah dengan prosentase sebesar 14,58% atau sebanyak 170.800 orang masih hidup dibawah standar garis kemiskinan. Dengan demikian perlu adanya perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan sebagai strategi dalam pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya adalah bidang pendidikan, kesehatan dan bahan pangan untuk dapat hidup dengan layak dan keluar dari zona kemiskinan. Berbagai bantuan sosial telah diberikan pemerintah, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten untuk menangani masalah kemiskinan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah KPM Bantuan Sosial di masa pandemi di kab. Tuban

No.	Jenis Bantuan Sosial	Cakupan Bidang	Jumlah KPM
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	Kesehatan dan pendidikan	53.167
2.	Bantuan Pemerintah Non-Tunai (BPNT)	Pangan	107.207
3.	BLT Dana Desa	Sosial ekonomi akibat Pandemi Covid-19	33.238

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tuban (2020)

BLT Dana Desa sebagai jaring pengaman sosial terakhir untuk menjaring warga masyarakat miskin yang ada di desa yang belum tersentuh bantuan sosial apapun menjadi alternatif kebijakan yang diperlukan untuk merespon permasalahan sosial ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Pendataan perlu untuk dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa dengan pendekatan sosial

masyarakat karena pemerintah desalah yang paling tahu kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

Dengan demikian perlu adanya standar kriteria calon penerima bantuan BLT Dana Desa sebagai filter untuk menentukan apakah implelementasi ini dilakukan dengan tepat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sasaran penerima BLT Dana Desa adalah masyarakat miskin yang belum tercover bantuan sosial lainnya. Kriteria dalam penentuan masyarakat miskin yang dimaksud adalah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh menteri sosial yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 menyebutkan kriteria KPM BLT Dana Desa sebagai berikut:

Gambar 15. Kriteria Keluarga Miskin KPM BLT Dana Desa

TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN	
NO	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1	Luas lantai <8m2/orang
2	Lantai tanah/bambu/kayu murah
3	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4	Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5	Penerangan tanpa listrik
6	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9	Satu stel pakaian setahun
10	Makan 1-2 kali/hari
11	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12	Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan
13	Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu

Sumber: Dinas PMD Tuban

Dari persyaratan tersebut calon KPM harus memenuhi setidaknya 9 dari 14 kriteria yang telah ditetapkan untuk dapat dikategorikan miskin sesuai dengan standar

Kementerian Sosial. Sedangkan dalam kriteria BLT Dana Desa dalam Surat Edaran Bupati Tuban No. 140/2112/414.106/2020 tentang Penyaluran BLT Dana Desa menyatakan bahwa kriteria penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

Gambar 16. Kriteria Penerima BLT Dana Desa

- a. kehilangan mata pencaharian/pekerjaan;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- c. tidak masuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
- d. tidak masuk dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- e. salah satu/lebih anggota keluarganya bukan penerima kartu Pra-Kerja; dan

2

- f. bukan penerima bantuan-bantuan lainnya dari Pemerintah.

Sumber: SE Bupati Tuban No. 140/2112/414.106/2020

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria calon KPM BLT Dana Desa adalah masyarakat miskin dan rentan yang terdampak secara langsung maupun tidak mengenai adanya pandemi Covid-19 ini. Miskin yang dimaksud adalah yang terdata dalam sistem DTKS dan/atau memenuhi 9 standar dari 14 kriteria masyarakat miskin sesuai dengan standar Kementerian Sosial. Sedangkan masyarakat rentan yang dimaksud seperti keluarga yang dikepalai oleh perempuan/janda, masyarakat yang mempunyai penyakit menahun dan masyarakat yang digolongkan rentan terhadap adanya perubahan sosial terutama dampak pandemi ini. Kriteria ini dimaksudkan untuk dapat menjaring kelompok masyarakat yang memang membutuhkan agar program ini tepat sasaran.

Pendataan yang tepat akan menghasilkan data yang berkualitas dan data yang berkualitas akan meningkatkan efektivitas dari implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban. Untuk itu implementasi BLT Dana Desa melaksanakan pendataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan mekanisme pendataan BLT Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan membentuk tim pendata.

Pembentukan tim pendata merupakan langkah awal dalam proses pendataan BLT Dana Desa. Pembentukan tim ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan pernyataan tersebut berikut adalah petunjuk teknis pelaksana Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 mengenai pendataan Calon Keluarga Penerima BLT Dana Desa sebagai berikut:

Gambar 17. Petunjuk Teknis Pelaksana pendataan Calon Keluarga Penerima BLT Dana Desa

disampaikan Petunjuk Teknis (Juknis) Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut:

- a. Pendata calon penerima BLT-DD adalah relawan desa yang menerima Surat Tugas oleh Kepala Desa.
- b. Pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT).
- c. Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil.
- d. Calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT.
- e. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana poin (d) tetapi tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS.
- f. Calon penerima BLT-DD harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- g. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- h. Dokumen yang sudah ditandatangani disampaikan ke Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengesahan, hal mana pengesahan dapat pula didelegasikan kepada Camat.
- i. Kepala Desa melaporkan rekap data penyaluran BLT-DD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sumber: SE Menteri Desa PDTTT No. 9/PRI.00/IV/2020 (2020)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa proses pendataan dilakukan oleh tim relawan Covid-Desa yang minimal terdiri dari 3 orang dan harus berjumlah ganjil untuk dapat memudahkan pengambilan keputusan apabila musyawarah tidak terjadi mufakat. Calon penerima BLT Dana Desa adalah penduduk/masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 secara langsung maupun tidak. Pendataan dilakukan dengan format yang telah ditentukan dalam Peraturan Maenteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

Gambar 18. Form Pendataan BLT Dana Desa

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

No	Nama/NIK	Alamat	Nomor Rekening	Kriteria Keluarga Miskin														Jumlah	Sdh Menerima JPS		Bim Menerima JPS			MS/ TMS
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPKT	KP	Kehilangan Mata Pencapaian	Tidak Terdata	
1																								
2																								
3																								
JUMLAH																								

Mengetahui,
Kepala Desa

(Nama Lengkap)

....., ... (tg/bn/thn) ...
Pencatat,

(Nama Lengkap)

Sumber: Permendes No.6 Tahun 2020

Dari data diatas pendataan dilakukan dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat untuk dapat memilah bagaimana warga masyarakat yang memang berhak menerima bantuan ini. Setelah pendataan dilakukan langkah selanjutnya adalah membawa hasil pendataan tersebut ke dalam forum musyawarah desa khusus (musdesus) untuk menetapkan tahap akhir calon penerima BLT Dana Desa. Proses tersebut dilaksanakan dengan tertib dan tetap mematuhi protokol kesehatan selama proses pendataan, musyawarah penentuan KPM sampai dengan tahap penyaluran BLT Dana Desa. Berikut adalah dokumentasi beberapa desa yang melaksanakan verifikasi dan penentuan calon penerima bantuan sebagai berikut:

Gambar 19. Kegiatan Musdesus Penetapan Calon KPM BLT Dana Desa di salah satu desa di Kbaupaten Tuban

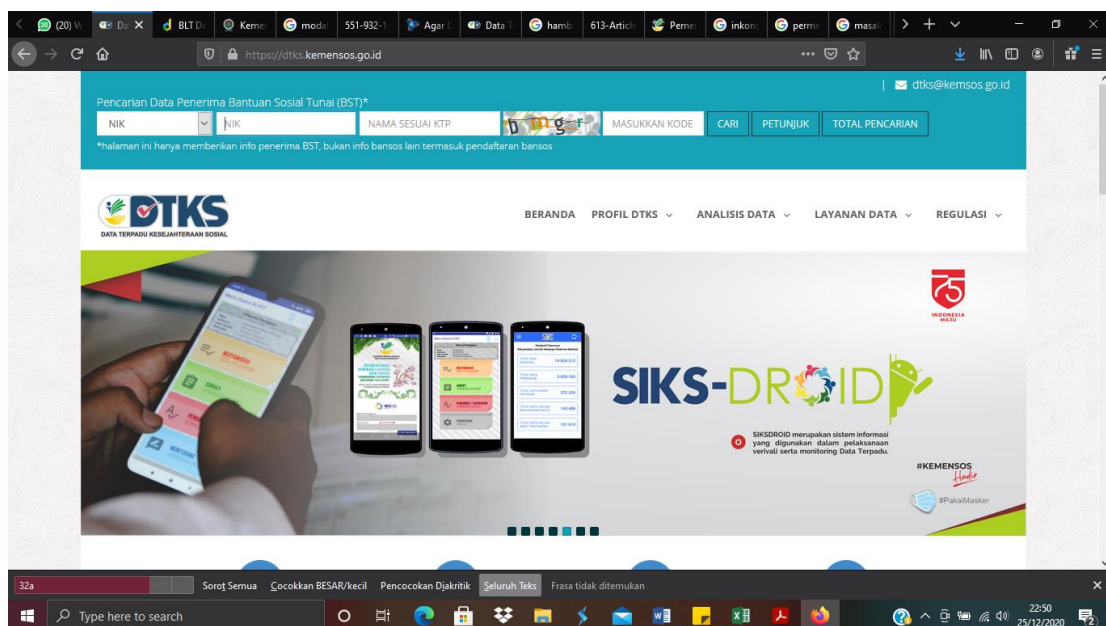


Sumber: Dinas PMD Tuban

Foto diatas merupakan salah satu pelaksanaan verifikasi data melalui musyawarah desa di dua desa di Kabupaten Tuban. Verifikasi dilakukan untuk menetapkan data keluarga miskin baru di desa yang diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong-royong.

Untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih bantuan BLT Dana Desa, Dinas PMD melakukan kerjasama untuk dapat melihat data dari sistem DTKS. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.

Gambar 20. Laman website DTKS Kementerian Sosial

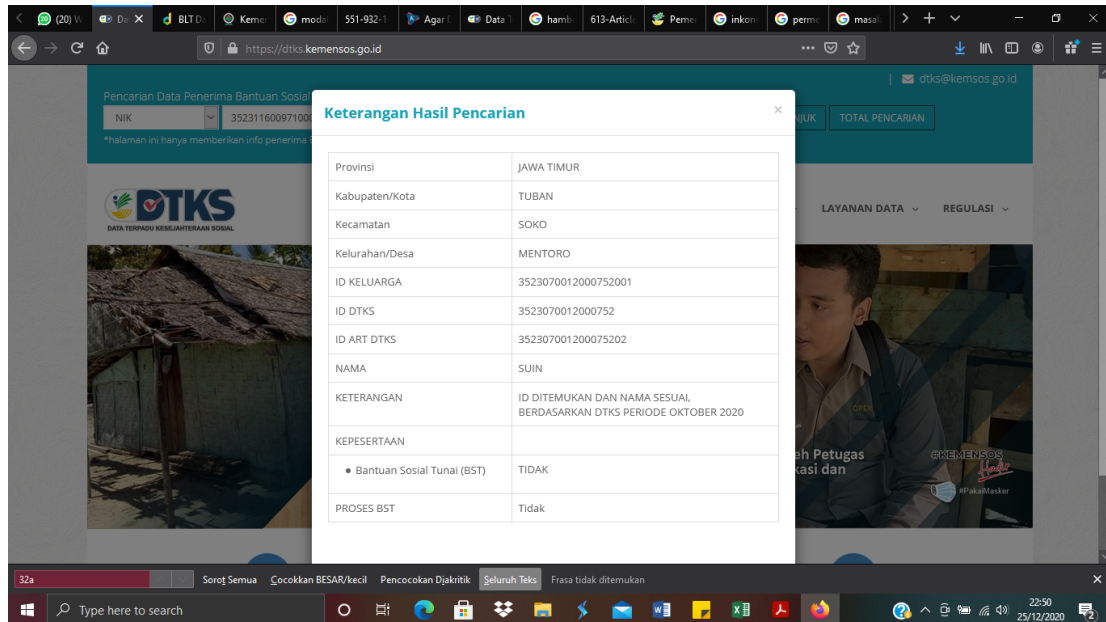


Sumber: Kemensos (2020)

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat memgarahkan agar DTKS digunakan sebagai rekomendasi data calon penerima bantuan sosial karena belum terdata menerima bantuan sosial dari pemerintah dan apabila menemukan

calok KPM yang belum terdata di sistem DTKS maka dapat melaprockan di Dinas Sosial masing-masing daerah untuk dapat diupdate.

Gambar 21. Pencarian salah satu KPM BLT Dana Desa di Desa Mentoro Kec. Soko Kab. Tuban



Sumber: Kemensos (2020)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa verifikasi dilakukan dengan melihat keterangan dalam sistem DTKS apakah salah satu warga masyarakat tersebut di tracking apakah sudah pernah menerima bantuan sosial ataupun belum. dari keterangan dalam sistem tersebut Ibu Suin selaku calon KPM BLT Dana Desa belum terdata sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah, sehingga dapat diverifikasi bahwa Ibu Suin layak untuk mendapatkan BLT Dana Desa untuk dipergunakan dalam kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan adanya DTKS, maka pemerintah desa dengan mudah dapat memferifikasi penduduknya, apakah benar-benar belum menerima bantuan sosial dari pemerintah selama ini. Apabila sudah menerima maka calon KPM BLT Dana Desa

dinyatakan gugur, naum apabila di sistem DTKS KPM yang bersangkutan memang belum pernah menerima bantuan sosial apapun maka calon KPM tersebut dinyatakan layak menerima BLT Dana Desa. Berikut adalah pernyataan bapak Anto Wahyudi:

“kita bekerjasama dengan dinsos mas untuk ini, karena kami harus meminta bantuan untuk dapat memastikan tidak adanya bansos dobel yang diterima masyarakat. Untuk itu perlu kami melihat data DTKS dari dinsos” (Hasil wawancara pada 8 Desember 2020 di Kantor Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kerjasama yang dilakukan oleh Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban dengan Dinas Sosial terutama untuk dapat menggunakan DTKS sebagai basis data calon penerima BLT Dana Desa. Selain itu, untuk dapat memastikan data yang tersedia adalah yang terbaru, perlu adanya pengupdatean data secara berkala mengingat kondisi masyarakat yang dinamis berubah setiap waktu. Dalam sistem DTKS setidaknya dilakukan dua kali pemutakhiran data dalam satu tahun yang dilakukan oleh pemerintah desa. Perlu adanya peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk dapat melakukan pendataan bantuan sosial, termasuk BLT Dana Desa. Pemerintah kabupaten Tuban melalui dinas PMD telah melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai pendataan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban. Berikut adalah pernyataan Bapak Anto Wahyudi mengenai hal tersebut:

“ada sosialisasi yang kita lakukan kepada setiap desa untuk dapat melaksanakan kebijakan ini secara nyata. Sosialisasi ini kita berikan sebagai upaya untuk dapat mengelola mulai dari persiapan dan pembentukan tim, pendataan langsung ke masyarakat, musdesus, sampai dengan penetapan oleh kepala desa yang kemudian dievaluasi oleh kecamatan. Selain itu penting untuk mensosialisasikan kriteria penerima BLT ini, yaitu masyarakat miskin dan rentan. Sosialisasi ini terlaksana dengan adanya bantuan dari setda untuk mensosialisasikannya” (Hasil wawancara pada 8 Desember 2020 di Kantor Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban).

Bapak Santoso selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tuban juga menegaskan mengenai adanya peningkatan kapasitas dari perangkat desa khususnya operator desa untuk mengelola data tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan dalam pemutakhiran data. Berikut adalah pernyataan beliau:

“Bimtek (bimbingan teknis) kami berikan kepada operator desa se-kabupaten Tuban setiap tahun mas, untuk update data ditingkat desa/kelurahan melalui aplikasi SIKS-NG. Karena masyarakat kan berubah-ubah ada yang tahun lalu masih miskin dan sekarang sudah dapat dikategorikan punya. Ini dapat didata dengan melihat asset dari masyarakat yang didata oleh RT/RW untuk diupdate di tingkat desa. Tapi pada prakteknya, Kenyataannya tidak seperti itu mas, hanya sebagian kecil saja yang mengupdate datanya/mengusulkan mengenai warganya yang memang kurang mampu. Pemerintah desa kurang aktif. Hal ini dikarenakan banyak faktor misalnya operator di desa tiap tahun beda orang. Hal ini pasti menghambat untuk proses bimbingannya karena tidak tahu sistem dari awal seperti apa. Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa desa mengupdate datanya, hanya mengingatkan dan memotivasi untuk memperbaiki data karena tidak mempunyai daya paksa. Hanya bisa berkoordinasi. Ujung-ujungnya kalo ada bantuan kayak kemaren rame, lah ini orangnya sudah mati kok terdata, lah itu karena pemdesnya tidak mau mengupdate, masyarakat meninggal banyak yang masih terdata. Itu yang menyebabkan data masih kacau ya itu. Makanya menteri sosial waktu itu ngomongnya lha selama data kamu ga kamu apa-apakan ya selama sepuluh tahun dua puluh tahun ya akan begitu-begitu saja karena memang tidak ada perubahan. Jadi harus dari pihak operator. Kami hanya menerima laporan dari pihak operator bahwa kami telah update ya sudah kami teruskan ke kemensos. Satu tahun kalau di tuban dua kali, periode jul dan periode desember. Dari periode juli kemarin sudah ada data di DTKS yang baru. Mestinya bulan ini mereka (pemerintah desa) mengupdate. Tapi isnyaallah tahun depan akan ada verval (verifikasi dan validasi) data nasional” (Hasil wawancara pada 8 Desember 2020 di Kantor Dinas Sosial Kab. Tuban).

Gambar 22. Bimtek SIKS-NG Seluruh Operator Desa di Kabupaten Tuban



Sumber: Dinas Sosial Kab. Tuban (2020)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa adanya sosialisasi dan bimbingan teknis sebagai salah satau bentuk pengembangan kapasitas pemerintah desa terutama operator desa untuk dapat mengelola dan memutakhirkan data kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Data sebagai strategi dalam efektivitas Bantuan sosial seringkali terdapat *human error* ataupun permasalahan teknis yang terjadi sehingga bantuan sosial seringkali dianggap kurang tepat guna dan tepat sasaran. Dalam hal ini, perlu adanya kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan tugasnya yang dalam hal ini mengupdate data masyarakat miskin dengan pendekatan sosial baik ditingkat RT maupun dusun untuk mendata secara berkala dengan melihat asset dan perkembangan ekonomi dari masyarakatnya.

5.1.1.3 Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 tentang pengelolaan Dana Desa, penyaluran dana desa dibagi menjadi tiga tahap. Syarat penyaluran Tahap I dapat berupa Keputusan kepala daerah mengenai Rincian Dana Desa per desa. Artinya, setiap desa memang harus menyelesaikan laporan realisasi

penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya untuk dapat mengajukan anggaran tahun berjalan sehingga dapat divalidasi pemerintah kabupaten/kota untuk mengajukan dana desa. Penyaluran Dana Desa tahap II langsung diajukan oleh pemda ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan menandai pengajuan di sistem online monitoring. Penyaluran bulanan untuk BLT Desa dilakukan tanpa syarat, karena merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial yang bersifat kondisional. Secara teknis, penyaluran DD bulanan dapat dilakukan 2 kali dalam sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu.

Sebelum dilaksanakannya penyaluran BLT Dana Desa, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020, pemerintah desa haruslah menganggarkan dan melaksanakan penetapan anggaran dengan mengikuti aturan sebagai berikut:

- a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Naum sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2020 persyaratan tersebut tidak berlaku karena desa diberikan kewenangan untuk menganggarkan BLT Dana Desa sesuai dengan prosinya masing-masing desa sehingga regulasi tersebut dalam pasal 32A ayat (7) dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memudahkan dalam proses implementasi karena adanya penyederhanaan mekanisme penyaluran BLT Dana Desa. Dari adanya batasan dalam penganggaran BLT Dana Desa namun sekarang desa diberikan kewenangan untuk menggunakan dana desa dalam program BLT Dana Desa sesuai dengan hasil musyawarah desa dan tidak ada batasan minimal dan maksimal. Berikut adalah perbedaan mekanisme BLT Dana Desa dari regulasi lama dan baru:

Gambar 23. Relaksasi penyederhanaan Kebijakan BLT Dana Desa



Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

Dari gambar tersebut dapat dilihat adanya perubahan kebijakan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 ke Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2020 untuk dapat menyederhanakan proses mekanisme pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa. Pada point pertama dapat dilihat adanya syarat penyaluran BLT Dana Desa tahap I harus ada rincian dana desa perdesa dan

harus disertai dengan adanya peraturan desa mengenai APBDes yang kemudian disederhanakan dengan syarat adanya keputusan kepala daerah mengenai rincian dana desa perdesa. Penyaluran Dana Desa kedua dilakukan penyederhanaan dengan hanya melihat pengajuan di OMSPAN. Kemudian dalam proses penyaluran Dana Desa, pemerintah desa harus menetapkan calon KPM Dana Desa dan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa. Namun pada aturan yang baru dapat dilakukan tanpa syarat. Kemudian pada point 4 penyaluran dana desa dari hanya bisa dilakukan sebulan sekali namun sekarang bisa dilakukan 2 kali dalam sebulan.

Bapak Anto juga menyatakan bahwa adanya perubahan regulasi BLT Dana desa untuk mengalokasikan anggaran desa sebagai berikut:

“batasan untuk alokasi BLT sendiri sesuai dengan aturan Permende dan SE dari Bupati mas, nanti saya carikan Senya. Isinya bahwa kalau DDnya kurang dari 800 juta maksimal 25% untuk BLT dan sebagainya. Boleh mengajukan lebih apabila kondisi masyarakat memang membutuhkan tetapi harus mendapat persetujuan dari Bupati, namun selama ini di Tuban beluma ada. Namun untuk aturan baru permenkeu nomor 50 lebih dibebaskan kepada pemerintah desa” (hasil wawancara pada 8 Desember 2020 di Kantor Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban).

Selain itu, besaran nominal BLT Dana Desa kepada KPM adalah sebesar Rp. 600.000 untuk 3 bulan pertama (Mei-Juli) sedangkan untuk berikutnya (Juli-Desember) adalah sebesar Rp. 300.000. berdasarkan keputusan terakhir menteri Desa PDTT menyatakan bahwa melakukan perpanjangan penyaluran BLT Dana Desa sampai dengan bulan Desember 2020. Hal ini dikarenakan mengingat situasi dan kondisi sosial masyarakat yang masih belum stabil sebagai imbas dari adanya pandemi ini. Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2020 tentang pengelolaan Dana Desa Pasal 32A dan Surat Edaran Bupati Tuban

No. 140/2984/414.106/2020 tentang penyesuaian anggaran BLT Dana Desa mengintruksikan besaran nominal BLT Dana Desa sebagai berikut:

Gambar 24. Besaran Nominal BLT Dana Desa

1. Pengalokasian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa dilaksanakan selama 6 bulan mulai bulan Mei;
2. Besaran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa ditetapkan sebesar:
 - a. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat;

Sumber: SE Bupati Tuban No. 140/2984/414.106/2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa besaran BLT Dana Desa yang diterima masyarakat miskin adalah sebesar Rp. 600.000 tiga bulan pertama dan Rp. 300.000 pada bulan berikutnya. Akumulasi perindividu KPM BLT Dana Desa adalah Rp. 3.000.000. untuk rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Akumulasi BLT Dana Desa per-KPM di Kab. Tuban

No.	Bulan	Banyaknya (Rp)
1.	Mei	600.000
2.	Juni	600.000
3.	Juli	600.000
4.	Agustus	300.000
5.	September	300.000
6.	Oktober	300.000
7.	November	300.000
8.	Desember	300.000
Jumlah		3.000.000

Sumber: Dinas PMD dan Pemdes dan KB Kab. Tuban (2020)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan di lapangan mengenai implementasi program BLT Dana Desa disalurkan kepada KPM sebesar 3.000.000 dari bulan Mei 2020 sampai dengan Desember 2020. Pemberian BLT Dana Desa ini berdasarkan Peraturan Menteri keuangan No. 40 Tahun 2020

dilakukan dengan metode *cashless* atau transfer dengan menggunakan bank HIMBARA (Himpunan Bank Negara) dalam mekanisme penyalurannya. Namun, apabila keputusan itu dilaksanakan maka akan terjadi permasalahan baru karena kebijakan ini dituntut untuk dapat dilaksanakan secepat mungkin mengingat pentingnya bantuan ini untuk masyarakat yang membutuhkan.

Setelah disahkannya peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2020 maka penyaluran BLT Dana Desa ini bisa dilakukan dengan metode *cash* yang diberikan oleh pemerintah desa dan/atau relawan desa lawan Covid-19 kepada KPM dengan bukti penyerahan berupa kwitansi dan dokumentasi/ foto penyerahan bantuan tersebut sebagai syarat pertanggungjawaban melalui pemerintah desa dan dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Penerimaan dan penyerahan dilakukan di masing-masing kantor pemerintah desa setempat secara bertahap.

5.1.1.4 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa

Untuk menjalankan proses penyaluran BLT Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi dan monitoring lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang terintegrasi. Evaluasi harus dilakukan secara berkala mengingat program ini harus segera disalurkan dan mengalami berbagai kendala sehingga banyak desa belum dapat menyalurkan BLT Dana Desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa.

Tabel 10. Pengawasan BLT Dana Desa

Level Pemerintahan	Fungsi Pengawasan
Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
Pemerintah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui: (a) Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/ kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/ BPD; dan (b) Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa. 2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya.
Pemerintah Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 2. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial. 3. Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya). 4. Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. 5. Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/ atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa. 6. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. 7. Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan

	<p>Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.</p> <p>8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.</p> <p>9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.</p>
Kecamatan	<p>1. Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa.</p> <p>2. Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.</p> <p>3. Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.</p>

Sumber: Bappenas (2020)

Monitoring dan Evaluasi dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan melihat adanya koordinasi dan pengawasan dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu diantaranya adalah Inspektorat, kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa, LSM dan Media massa. Bapak Anto Wahyudi menyatakan sebagai berikut:

“pengawasan dilakukan dari semua lini mas. Di tingkat desa yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan kecamatan. Ditingkat daerah ada dinas PMD bersama dengan Inspektorat Tuban untuk melakukan pengawasan vertikal dan horizontal” (hasil wawancara pada 8 Desember 2020 di Kantor Dinas PMD).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai aktor baik dari internal pemerintah maupun eksternal. Ibu Sukartiwi selaku Inspektur Pembantu Bidang Investigasi, Inspektorat Kabupaten Tuban menyatakan sebagai berikut:

“untuk pengawasan yang dilakukan inspektorat melalui pengawasan rutin mas. Pengawasan ini dilakukan oleh Irban pembinaan dan pengawasan masing-masing wilayah. Kalau ada kasus ataupun permasalahan yang diadukan ke kami itu baru wewenang saya sebagai irban investigasi. Untuk melihat secara detail bagaimana permasalahan yang terjadi” (Wawancara pada 7 Desember 2020 di Kantor Inspektorat Kabupaten Tuban).

Selain itu, Bapak Bambang Suhaji selaku Inspektur pembantu Bidang Pembinaan dan Pengawasan, Inspektorat Kabupaten Tuban juga menyatakan hal yang sama. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Untuk pengawasan kita tidak secara khusus melaksanakan pengawasan BLT Dana Desa. Kita melihat pengelolaan keuangan desa secara umum sesuai dengan pembagian wilayah masing-masing yang telah ditetapkan. Kita awasi penyelenggaraan program tersebut agar dapat disalurkan dengan tepat dan memastikan tidak ada data ganda penerima bantuan BLT dengan bantuan yang lainnya” (Wawancara pada 7 Desember 2020 di Kantor Inspektorat Kabupaten Tuban).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban dan Inspektorat Kabupaten Tuban dalam proses monitoring dan evaluasi terkait dengan implementasi BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban. Pengawasan yang dilakukan bersifat rutin dan hanya administratif pelaksanaan Dana Desa secara keseluruhan. Belum dapat menyentuh pelaksanaan BLT Dana Desa secara spesifik. Pengawasan menjadi penting dimana baru-baru ini terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Menteri Sosial terkait adanya dugaan kasus korupsi Anggaran bantuan sosial. Menurut Bapak Bambang Suhaji koordinasi dalam pengawasan perlu dilakukan. Berikut adalah hasil wawancara dengan beliau:

“sejauh ini sudah dilaksanakan (koordinasi dan pengawasan) dengan baik mas, seluruh bansos kita awasi termasuk BLT Dana Desa. Kita lihat kinerja dari dinas terkait yaitu dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa telah melaksanakan dengan baik. Baru hari ini ada sosialisasi dari dinas tersebut membahas secara langsung dengan kepala desa se kabupaten tentang dana desa dan blt dana desa. Ada salah satu dari ispektorat yang mewakili untuk menghadiri undangan” (Wawancara pada 7 Desember 2020 di Kantor Inspektorat Kabupaten Tuban).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa terdapat koordinasi dalam proses implementasi program BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban yang dilaksanakan dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengawasan BLT Dana Desa, sehingga program ini diharapkan dapat dijalankan tanpa adanya permasalahan.

Menurut Ibu Sukarwati, dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban sendiri belum ada permasalahan yang terjadi. Bahkan karena adanya BLT Dana Desa ini, ada salah satu kasus yang terbongkar karena ada oknum desa yang menyalahgunakan wewenangnya dalam proses pelaksanaan bantuan sosial lainnya, yaitu BPNT. Berikut adalah pernyataan beliau:

“belum ada mas kalo BLT, kalau bansos lainnya ada. Ada satu kasus yang berkaitan mas. Ada salah satu masalah dalam proses pendataan BLT Dana Desa. Dalam sistem DTKS kan kalau warga yang sudah menerima bantuan sosial lainnya tidak bisa didaftarkan karena sudah ada keterangan sudah menerima bansos lain, nah kasus ini orangnya sudah menerima BPNT. Namun setelah di *crosscheck* oleh pemerintah desa ke KPM kok katanya tidak menerima bantuan tersebut. Ada 40an KPM yang ternyata harusnya mendapatkan BPNT sejak 2018 namun tidak menerima. Pemerintah desa telah mendaftarkan beberapa warganya yang belum menerima bansos apapun untuk didaftarkan di BLT Dana Desa, namun di sistem ditolak karena sudah menerima bansos lain. Setelah diselidiki ternyata ada permainan oleh ketua RT yang sekaligus menjadi Agen dalam bansos itu. Dari 40 kartu BPNT yang ada sejak 2018 digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini baru terbongkar di saat adanya pandemi ini, kalau nggak ada BLT Dana Desa ga akan ketahuan kasus seperti ini mas. Akhirnya warga menerima akumulasi bansos yang menumpuk selama dua tahun” (Wawancara pada 7 Desember 2020 di Kantor Inspektorat Kabupaten Tuban).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya permasalahan yang terjadi akibat dari adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu oknum pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Ibu Sukartiwi sendiri tidak memberikan keterangan lebih mengenai

Desa mana dan siapa pelaku dari adanya penyelewengan tersebut karena memang masih dalam tahap penyidikan. Setelah Penulis mencari informasi dari berbagai sumber media massa, memang terdapat permasalahan yang terjadi karena adanya permasalahan ini.

Gambar 25. Kasus Korupsi Bantuan Sosial BPNT di Kabupaten Tuban



Sumber: Kompas.com, Jawa Pos, Surya.co.id dan Detiknews (2020)

Berdasarkan pada sumber diatas, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut terjadi di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang. kasus dugaan penyelewengan dana BPNT tersebut mencuat saat sejumlah warga Desa Cepokorejo mengajukan bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Namun,

setelah diakses datanya melalui DTKS Dinas Sosial Kabupaten Tuban, ternyata mereka sudah tercatat sebagai KPM program BPNT sejak 2018. Anehnya, sejumlah warga yang tercatat sebagai KPM program BPNT tersebut tidak menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Ternyata KKS yang seharusnya mereka terima justru disimpan oleh SHU, dan diduga disalahgunakan untuk mengeruk uang KPM secara diam-diam. Sedikitnya ada sekitar 46 KPM tidak bisa menikmati dana program BPNT pemerintah, lantaran KKS-nya disalahgunakan oleh SHU sejak 2018. Sejumlah KPM pun protes lantaran merasa dirugikan atas kejadian tersebut. Sebab, seharusnya dia mendapat bantuan sejak 2018 silam, tetapi bantuan berupa kebutuhan pangan baru diserahkan di tahun 2020. Setelah melakukan protes, setiap warga penerima manfaat mendapatkan beras sebanyak 19 karung dengan berbagai ukuran. Bantuan beras dari program BPNT itu diserahkan dari akumulasi bantuan sejak 2018 hingga sekarang. Total kerugian masyarakat akibat adanya permasalahan ini adalah sebesar Rp. 139.400.000.

5.1.2 Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban

5.1.2.1 Faktor Pendukung

1. Komitmen Pemerintah Pusat

Sebagai pelayan publik, pemerintah haruslah dapat berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya melalui jaring pengaman sosial. Komitmen pemerintah untuk membantu dan mengatasi kerentanan di desa dengan

memanfaatkan Dana Desa yang dianggarkan dalam APBDes menjadi bantuan langsung tunai (BLT) harus dipahami sebagai situasi darurat, relevan dengan kondisi masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19 secara sosial ekonomi.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kemudian diamantakan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020 mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mengimplementasikan jaring pengaman sosial ditingkat desa dengan dikeluarkannya BLT Dana Desa sebagai perlindungan sosial masyarakat dimasa pandemi Covid-19. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan jaring pengaman sosial ditengah kondisi sosial ekonomi tidak menentu karena menurunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi.

Dalam prakteknya BLT Dana Desa dilaksanakan pemerintah desa dan masyarakat desa dengan sistem musyawarah desa yang melibatkan pemangku kepentingan desa. Modal sosial ini dilakukan oleh pemerintah desa dengan tujuan agar menjaring warga masyarakat melalui RT dan RW karena pemerintah desa dan jajarannya yang lebih tahu siapa saja yang rentan, miskin, beresiko, dan beban berat sosial ekonomi, serta kelompok–kelompok yang layak mendapatkan BLT. Maka, data–data makro, perlu diverifikasi secara cepat, dengan pemaduan normatif aturan dan kenyataan empirik di desa sehingga terciptalah kualitas data yang lebih baik daripada sebelumnya.

2. Persyaratan Calon KPM BLT Dana Desa yang Mudah

Untuk dapat memastikan efektivitas dari adanya bantuan sosial, diperlukan beberapa kriteria khusus untuk dapat menjangkau sasaran calon KPM sesuai dengan kriteria tertentu. Jaring pengaman sosial haruslah diberikan kepada masyarakat yang memang terdampak dan membutuhkan agar program ini tepat sasaran. Ketentuan umum dari adanya bantuan sosial seperti beberapa hal diatas telah dibahas dimana syarat umumnya adalah masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang miskin dan rentan dan/atau kehilangan mata pencahariannya.

BLT Dana Desa merupakan salah satu jaring pengaman sosial di tingkat desa yang mempunyai kriteria calon KPM yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Anto Wahyudi selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban sebagai berikut:

“faktor pendukung dari adanya program ini adalah persyaratan pendataan yang sangat mudah dipahami pemerintah desa, bahwa dalam proses pendataan dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari tim relawan Covid Desa. Nah untuk metodenya sudah jelas dari pusat dilakukan dengan sistem gotong-royong berdasarkan pada musyawarah dengan tokoh masyarakat dan BPD. Dari sisi pendataan terdapat persyaratan penerima BLT Dana Desa yaitu masyarakat miskin dan rentan, terutama yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Kategori miskin kita mengikuti berdasarkan standar dari kemensos itu, kemudian untuk masyarakat yang rentan dikhususkan untuk masyarakat yang mempunyai anggota keluarga sakit menahun dan kesulitan ekonomi. Kepala keluarga yang dikepalakeluarga oleh janda/wanita tua dan lansia. Semakin banyak persyaratan yang dipenuhi semakin besar untuk dapat menjadi KPM BLT ini mas”

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan BLT Dana Desa dilakukan dengan adanya modal sosial masyarakat melalui musyawarah yang dilakukan di tingkat desa untuk dapat membentuk dan membahas mengenai calon KPM BLT Dana Desa. Proses musyawarah ini dilakukan guna menjangkau masyarakat yang memang dikategorikan berhak untuk dapat menerima bantuan tersebut. Calon

penerima BLT Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT NO. 7 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa.

3. Pendekatan Modal Sosial dalam Proses Pendataan

Modal sosial telah diyakini mampu memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Dunia, yang meyakini bahwa modal sosial merujuk pada dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat, dan sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian bermasyarakat.

Kesejahteraan sosial dan masyarakat sebagai indikator kesuksesan pembangunan di pedesaan menjadi tolok ukur utama dalam keberhasilan program BLT Dana Desa. Proses pendataan yang dilakukjan dengan melihat dan mengamati kehidupan masyarakat sehari-hari menjadikan dasar proses pendataan masyarakat penerima BLT Dana Desa berbasis musyawarah menuju mufakat. Dengan demikian akan tercipta kualitas data yang lebih baik karena pendekatan ini dirasa merupakan pendekatan yang paling tepat dalam proses pendataan BLT Dana Desa.

4. Diskresi Administrasi bagi Pemerintah Desa

Didalam pelaksanaannya apabila pemerintah desa menemui permasalahan yang kaitannya tidak terdapat penyelesaian yang terdapat didalam kebijakan yang ada, menemui kondisi-kondisi tertentu, maka Pemerintah Desa harus berani mengambil keputusan bijak karena kewenangannya, yaitu melakukan diskresi kebijakan

sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 dengan merujuk pula pada Undang-undang Kedaruratan.

Pelaksanaan BLT Dana Desa dalam Kebijakan Kementerian Keuangan dalam PMK 50/2020 didukung dengan kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT). Mekanisme penyaluran dilakukan melalui mekanisme nontunai melalui perbankan sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDPTT Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pada Lampiran II diatur mengenai Metode dan Mekanisme Penyaluran bahwa penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan. Ketentuan tersebut diterjemahkan sebagai penyaluran melalui transfer perbankan. Hal ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat telah mendatangkan keluhan dari pelaksana kebijakan di lapangan terutama dari desa-desa yang jauh dari layanan perbankan. Ketentuan tersebut menimbulkan biaya tambahan bagi penerima BLT. Untuk itu, dalam Permendes PDPTT No. 6 Tahun 2020 ditambahkan ruang diskresi bagi Kepala Desa untuk menerapkan mekanisme lain dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

5.1.2.2 Faktor Penghambat

1. Kualitas Data

Data sebagai kunci utama dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan bantuan sosial haruslah berkualitas untuk dapat menjaring penerima/KPM yang sesuai dengan kriteria. Untuk itu perlu adanya perbaikan data secara rutin mengingat kondisi sosial

masyarakat yang berubah, terutama pada masa pandemic ini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mendapat mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai bantuan sosial dan subsidi pemerintah.

Dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa menggunakan sistem DTKS dalam proses verifikasi untuk mencegah adanya tumpang-tindih dalam proses pendataan calon KPM. Dalam sistem DTKS sendiri masih ada kendala dalam kualitas data yang ada dalam sistemnya. Untuk itu masih perlu adanya perbaikan. Dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, pemerintah perlu menjadikan momentum pandemi untuk memperbaiki kebijakan pemberian bantuan sosial secara menyeluruh, termasuk kebijakan tentang pendataan dan penyalurannya.

2. Banyaknya Regulasi

Regulasi merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Dalam pandangan administrasi publik, regulasi merupakan bentuk kebijakan publik yang tertulis dan disahkan. Dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa, berikut adalah regulasi yang mengatur tentang BLT Dana Desa mulai dari kebijakan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah kabupaten sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.

- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran–1 dan Lampiran–2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.
- o. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 411.2/3300/112.2/2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid 19 di Desa, tanggal 20 April 2020.
- p. Surat Edaran Bupati Tuban Nomor: 140/2112 /414.106/2020 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa.

3. Inkonsistensi Kebijakan

Adanya kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah sehingga menyulitkan implemantasi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan juga pemerintah desa dalam melaksanakannya. Inkonsistensi kebijakan ini dapat dilihat dari adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah perubahan kebijakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan BLT Dana Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2020 yang sebelumnya adalah menggunakan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 ada beberapa hal yang diubah diantara adalah sebagai berikut:
 - 1) Perpanjangan penyaluran BLT Dana Desa dari 3 bulan (April, Mei, Juni 2020) Menjadi 6 bulan (April-September 2020) dan sekarang menjadi 9 Bulan (April-Desember 2020). Hal ini tentu menyulitkan pemerintah desa

karena harus merubah APBDes beberapa kali dengan adanya perpanjangan ini.

- 2) Adanya sanksi yang diberikan kepada desa yang tidak menganggarkan BLT Dana Desa yang tertuang dalam Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 yang kemudian diubah dalam Permenkeu nomor 50 tahun 2020 yang berisi Pemerintah Desa yang tidak dapat melaksanakan BLT Desa karena berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria, maka Pemerintah Desa tersebut tidak dikenakan sanksi.

- b. Kebijakan Fiskal BLT Dana Desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 yang sebelumnya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020;

- 1) Adanya perubahan metode penyaluran BLT Dana Desa dari cashless melalui transfer bank himbara langsung kepada KPM diubah menjadi cash, mengingat BLT Dana Desa ini harus cepat terealisasi dan tersalurkan kepada masyarakat luas.

Dengan adanya permasalahan tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkannya diantaranya adalah deadline waktu formulasi kebijakan BLT Dana Desa ini yang sangat singkat. Adanya instruksi presiden mengenai pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat untuk dapat disalurkan secepat mungkin.

4. Sumber Daya Manusia Aparatur Desa

Berhasilnya pembangunan di desa dipengaruhi salah satunya adalah oleh kualitas sumber daya manusia baik aparatur desa maupun kualitas sumber daya

masyarakatnya, sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai aturan hukum, mekanisme dan prosedurnya. Program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas aparatur desa belum menjadi fokus penting dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan mengenai perbaikan data dalam DTKS untuk dapat mendata tingkat kesejahteraan warganya secara berkala. Dalam sistem DTKS harusnya dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun sebagai update data masyarakat miskin pada tingkat desa.

Kualitas SDM Aparatur Desa di Kabupaten Tuban masih dapat digolongkan belum adanya sistem manajemen yang baik. Hal ini terlihat dari belum semua desa melaksanakan pemutakhiran data dan hanya sebagian kecil yang sudah mengupdate data mengenai kesejahteraan masyarakat melalui sistem SIKS-NG dan DTKS. Pengembangan kapasitas telah dilakukan dengan diadakannya bimbingan teknis mengenai pemutakhiran data yang diadakan setahun sekali. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Santoso dari Dinas Sosial Kabupaten Tuban:

“Bimtek kami berikan kepada operator desa se-kabupaten Tuban setiap tahun mas, untuk update data ditingkat desa/kelurahan melalui aplikasi SIKS-NG. masyarakat kan berubah-ubah ada yang tahun lalu masih miskin dan sekarang sudah dapat dikategorikan punya. Ini dapat didata dengan melihat asset dari masyarakat yang didata oleh RT/RW untuk diupdate di tingkat desa. Tapi pada prakteknya, Kenyataannya tidak seperti itu mas, hanya sebagian kecil saja yang mengupdate datanya/mengusulkan mengenai warganya yang memang kurang mampu. Pemerintah desa kurang aktif. Hal ini dikarenakan banyak faktor misalnya operator di desa tiap tahun beda orang. Hal ini pasti menghambat untuk proses bimbingannya karena tidak tahu sistem dari awal seperti apa. Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa desa mengupdate datanya, hanya mengingatkan dan memotivasi untuk memperbaiki data karena tidak mempunyai daya paksa. Hanya bisa berkoordinasi. Ujung-ujungnya kalo ada bantuan kayak kemaren rame, lah ini orangnya sudah mati kok terdata, lah itu karena pemdesnya tidak mau mengupdate, masyarakat meninggal banyak yang masih terdata. Itu yang menyebabkan data masih kacau ya itu. Makanya menteri sosial waktu itu ngomongnya lha selama data kamu ga kamu apa-apakan ya selama sepuluh tahun dua puluh tahun ya akan begitu-begitu saja karena memanag tidak ada perubahan. Jadi harus dari pihak operator. Kami hanya menerima laporan dari pihak operator bahwa kami telah update ya sudah kami teruskan ke kemensos.

Satu tahun kalua di tuban dua kali, periode jul dan periode desember. Dari periode juli kemarin sudah ada data di DTKS yang baru. Mestinya bulan ini mereka (pemerintah desa) mengupdate. Tapi isnyaallah tahun depan akan ada verval (verifikasi dan validasi) data nasional”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya aparatur pemerintah desa, khususnya operator desa masih kurang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal pemutakhiran data secara berkala yaitu minimal dilakukan 2 kali dalam setahun. Selain itu, adanya operator desa yang berbeda setiap tahun atau berganti menjadikan bimbingan teknis yang diberikan setiap tahun kurang optimal karena kurang pahamnya sistem sedari awal. Hal tersebut menjadi hambatan dalam proses pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan data kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

5.2 Analisis Data

5.2.1 Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban.

Sebelum analisis pembahasan Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa, pada abagian ini peneliti akan menjelaskan kebijakan BLT Dana Desa berdasarkan regulasi yang berlaku baik kebijakan secara nasional, kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten yang peneliti gunakan dalam menganalisis kebijakan ini.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah suatu program yang dicanangkan pemerintah untuk dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Indonesia. Dampak yang dimaksud adalah masyarakat miskin yang mata pencahariannya hilang karena adanya wabah ini dan

belum menerima bantuan sosial apapun baik dari Program Keluarga Harapan (PKH) maupun kartu prakerja. Penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat miskin dan atau rentan miskin yang terdampak Covid-19 adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain: (1) kehilangan mata pencaharian; (2) belum terdata (exclusion error); dan (3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
2. Mekanisme Pendataan mengacu pada Permendes PDTT Nomor 6, relawan dan BPD yang turun dari rumah ke rumah untuk mendata, mengedepankan pemenuhan terhadap minimal sembilan dari 14 kriteria yang ditetapkan dalam Permendes tersebut, diakomodir sebagai penerima BLT Dana Desa. Sementara yang hanya memenuhi delapan kriteria ke bawah tidak diakomodir.
 - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan

- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

3. Metode dan Mekanisme Penyaluran

- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

- Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah

alokasi setelah itu mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan. Namun pada implementasinya mengalami hambatan sehingga pada point ini dihapus dan diganti dengan dikeluarkannya permen

4. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020;
- 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

5. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:

- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Camat; dan
- 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.

6. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

7. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian teoritis dalam Bab II tentang Kajian Pustaka telah dijelaskan beberapa teori implementasi kebijakan dari berbagai ahli kebijakan publik.

Pada subbab ini akan membahas dan menganalisis hasil penelitian yang berjudul implementasi kebijakan BLT Dana Desa sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban dengan melihat prosesnya berdasarkan Surat Edaran Bupati Tuban Nomor: 140/2112 /414.106/2020 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa dimulai dari pembentukan tim pendata, penetapan sasaran, mekanisme pendataan, metode dan mekanisme penyaluran, serta monitoring dan evaluasi.

5.2.1.1 Pembentukan tim pendata BLT DD

Pembentukan tim dalam organisasi merupakan salah satu proses untuk mendukung terlaksananya strategi program. Tim adalah sebuah unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan sebuah tugas (Daft, 2003:171). Dalam penelitian ini tim dibentuk untuk dapat berinteraksi dan berkoordinasi dalam mendata masyarakat KPM BLT DD sebagai bagian dari proses implementasi kebijakan BLT Dana Desa. Untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan yaitu masyarakat miskin dan rentan yang belum tercover oleh bantuan sosial lainnya, diperlukan tim pendata dari berbagai kalangan baik pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa setempat.

Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Tuban, Pembentukan tim sebagai pelaksana pendataan dilakukan dengan diawali oleh seluruh Kepala Desa di Kabupaten Tuban yang membentuk Tim Pendata Calon Penerima BLT DD, dengan mengikutsertakan Ketua RT sesuai dengan wilayah pendataan. Anggota Tim Pendata Calon Penerima BLT DD berasal dari anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dari unsur:

- 1) Perangkat Desa;
- 2) pengurus/anggota LKD; dan
- 3) tokoh masyarakat/ agama/ pemuda.

Susunan Tim Pendata Calon Penerima BLT DD, terdiri dari:

- a) Ketua merangkap anggota, ex officio dijabat oleh Kepala Desa;
- b) Sekretaris merangkap anggota;
- c) Anggota-anggota; dan
- d) Ketua RT setempat sebagai pendamping.

Demikian juga berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anto Wahyudi, S.TP selaku kepala bidang pemerintah desa, Dinas PMD Kabupaten Tuban menyatakan bahwa pelaksanaan pembentukan tim pendata KPM BLT Dana Desa sudah dilaksanakan dengan kebijakan yang berlaku yakni Surat Edaran Bupati Tuban Nomor 140/2112/414.106/2020 tentang Penyaluran BLT Dana Desa yaitu dengan menugaskan:

- a. kepala desa membentuk tim pendata calon penerima BLT DD dengan mengikutsertakan ketua RT sesuai dengan wilayah pendataan;
- b. anggota Tim pendata calon penerima BLT Dana Desa berasal dari gugus tugas pencegahan dan penanganan Covid-19 tingkat desa dari unsur perangkat desa, pengurus/anggota LKD, dan tokoh masyarakat/agama/pemuda;
- c. susunan tim pendata calon penerima BLT DD terdiri dari ketua merangkap anggota, ex officio dijabat oleh kepala desa, sekretaris merangkap anggota, anggota anggota dan ketua RT setempat sebagai pendamping.
- d. Jumlah tim pendata calon penerima BLT DD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

. Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti, pembentukan tim pendata dilaksanakan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing desa sehingga jumlahnya berbeda di setiap desa, namun secara struktur hampir sama. Sesuai dengan pernyataan tersebut berikut adalah petunjuk teknis pelaksana Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 mengenai pendataan Calon Keluarga Penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendata calon penerima BLT-DD adalah relawan desa yang menerima Surat Tugas oleh Kepala Desa.
- b. Pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT)
- c. Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil.
- d. Calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT.
- e. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana poin (d) tetapi tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS.
- f. Calon penerima BLT-DD harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- g. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT DD yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan BLT DD di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang terdapat diatas sehingga secara pembentukan tim tidak didapatkan kendala yang berarti karena telah

disebutkan secara rinci mengenai teknis pelaksanaan dilapangan sehingga dapat memudahkan proses pendataan oleh pelaksana.

Unsur pelaksana dalam suatu program kebijakan adalah implementor kebijakan yang menurut Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:27-28) adalah pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Dalam pelaksanaan di lapangan, proses pendataan telah ditentukan tujuan, pengambilan keputusan calon penerima BLT DD yang kemudian divalidasi berdasarkan hasil musdesus yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, kepala desa menggerakkan tim pendata untuk melaksanakan tugasnya, pelaksanaan pendataan dilapangan dengan melibatkan ketua RT setempat sebagai pendamping dan dilaksanakan pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh BPD pada tingkat masing-masing desa, kecamatan, Dinas PMD, dan juga inspektorat dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2020 pada masa pendemi Covid-19.

. Hal ini terlihat dari pernyataan diatas yang menyebutkan proses pendataan yang dilakukan dan disosialisasikan kepada pemerintah desa mengenai teknis tatacara proses pendataan. Jumlah Tim Pendata Calon Penerima BLT DD di Kabupaten Tuban sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa dan berjumlah ganjil untuk dapat mempermudah pengambilan keputusan. Honor Tim Pendata Calon Penerima BLT DD diperhitungkan orang perpaket (OP), dengan perincian sebagai berikut, paling banyak:

No.	Jabatan	Honor
1.	Ketua	Rp500.000,00
2.	Sekretaris	Rp450.000,00
3.	Anggota	Rp400.000,00
4.	Pendamping	Rp150.000,00

Setelah adanya pembentukan tim yang dilakukan oleh pemerintah desa, tim pendata juga haruslah diberikan arahan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing individu dalam melaksanakan proses pendataan KPM BLT DD dengan diberikan pembinaan. Hackman dan Wageman (2005) mendefinisikan pembinaan tim sebagai interaksi langsung dengan tim agar penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan tepat dan terkoordinasi. Grindle (Arnold, 2016:17) mengungkapkan apabila *capacity building* menjadi serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas, maka *capacity building* tersebut harus memusatkan perhatian kepada:

- a. Pengembangan sumber daya manusia (SDM); yang dalam kebijakan BLT DD ini berfokus pada kegiatan berupa pengadaan atau penyediaan personil tim pendata yang melaksanakan tipe kegiatan seperti pengarahan, praktek langsung, pengaturan kondisi lapangan pada saat proses pendataan.
- b. Penguatan organisasi; Dimensi penguatan organisasi berfokus pada tata manajemen untuk meningkatkan kinerja dari peran dan fungsi yang ada. Tipe kegiatan seperti menata sistem insentif yang telah diatur dalam

kebijakan, pemanfaatan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, dan struktur manajerial.

- c. Reformasi kelembagaan. Berfokus pada perubahan sistem dan kelembagaan yang ada sebelumnya untuk dapat meningkatkan tingkat kualitas data penerima bantuan.

Grindle (1997) menjelaskan bahwa dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan sebuah organisasi akan tercapai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi dalam organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan tugasnya secara berkualitas kepada setiap *stakeholders*. Pembinaan dan *capacity building* telah dilakukan dengan Pengembangan kapasitas Aparat Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis mengenai petunjuk teknis pendataan program BLT Dana Desa kepada setiap anggota tim pendata di masing-masing desa di 310 desa di Kabupaten Tuban yang melaksanakan kebijakan BLT Dana Desa. Selain itu juga dilakukan pelatihan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tuban kepada 311 desa dalam proses pendataan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui sistem SIKS-NG sebagai salah satu sumber rujukan data penerima BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban.

Pemerintah desa terutama operator desa untuk dapat mengelola dan memutakhirkan data kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Data sebagai strategi dalam efektivitas Bantuan sosial seringkali terdapat *human error* ataupun permasalahan teknis yang terjadi sehingga bantuan sosial seringkali dianggap kurang tepat guna dan tepat sasaran. Dalam hal ini, perlu adanya kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan tugasnya yang dalam hal ini

mengupdate data masyarakat miskin dengan pendekatan sosial baik ditingkat RT maupun dusun untuk mendata secara berkala dengan melihat asset dan perkembangan ekonomi dari masyarakatnya.

Secara teoritis, *capacity building* terdapat 3 tingkatan dalam prosesnya secara kelembagaan yaitu pengembangan individu, lembaga, dan sistem.

1. Tingkatan individu (sumberdaya manusia/aparatur pemerintah) yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan ketrampilan melalui pendidikan dan latihan. Dalam rangka pembinaan tim pendata dilakukan dengan memberikan arahan dan pelatihan terhadap tim pendata dan operator pemerintah desa dalam melakukan pendataan dan mengolah data desa ke dalam sistem yang telah disediakan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas dengan melakukan pendataan dengan pendekatan langsung yang terdiri dari berbagai *stakeholders* yang ada di desa.
2. Tingkatan lembaga, tingkatan ini diusahakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui struktur dan proses kelembagaan. Pengembangan kapasitas secara kelembagaan dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan arahan untuk dapat menguatkan kelembagaan pemerintah desa sebagai penopang utama permasalahan yang ada ditingkat desa, terutama masalah kesejahteraan sosial.
3. Tingkatan sistem, dilakukan dengan melakukan perbaikan di bidang ketatalaksanaan yang meliputi pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam sistem

tersebut. Pengembangan sistem dilakukan guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pendataan.

5.2.1.2 Penetapan sasaran penerima BLT Dana Desa

Grindle dalam Subarsono (2008: 93-94) merumuskan kepentingan kelompok sasaran dalam penerapannya haruslah termuat didalam suatu kebijakan tertulis dan besaran manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran sesuai. Jika kepentingan kelompok sasaran bisa di akomodir maka suatu kebijakan akan dapat diimplementasikan relatif lebih baik. Kebijakan pemerintah akan memberikan dampak berupa adanya perubahan dalam masyarakat. Untuk itu setiap perubahan yang terjadi sebagai akibat implementasi kebijakan akan menimbulkan reaksi yang berbeda pada kelompok sasaran.

Kelompok sasaran adalah sekumpulan objek yang menjadi sasaran yang dalam hal ini menjadi kelompok yang memenuhi kriteria untuk dapat mendapatkan bantuan BLT Dana Desa. *Target group* atau kelompok sasaran kebijakan ini adalah masyarakat miskin dan rentan dan terdampak secara sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, dalam konteks penelitian adalah masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Tuban yang belum tercover bantuan sosial lainnya. Grindle (1980:116) menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat *policy maker* hendaknya dapat memuat kepentingan-kepentingan dan manfaat yang akan dirasakan kelompok sasaran. Kepentingan Kelompok sasaran dapat dilihat pada muatan kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 pasal 8A ayat (3) menjelaskan keluarga miskin KPM BLT Dana Desa yang dimaksud adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan atau sakit menahun/kronis.

Target grup dalam Implementasi BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban diproyeksikan mencapai 29.272 KPM, namun setelah dilaksanakan pendataan secara menyeluruh di Kabupaten Tuban terdapat 33.238 KPM BLT Dana Desa. Persebaran KPM berada di 20 kecamatan dan berada pada 310 Desa dari total 311 desa yang ada di Kabupaten Tuban. Artinya terdapat 1 desa yang tidak menganggarkan BLT Dana Desa yaitu Desa Bunut Kecamatan Widang.

No.	Jenis	Data Proyeksi	Data riil	Selisih
3.	Jumlah KPM	29.272 KK	33.238 KK	3.966 KK
4.	Anggaran	Rp.52.689.013.200	Rp.61.029.643.700	Rp.8.340.630.500

Sumber: olahan Peneliti (2021)

Berdasarkan data diatas, jumlah penerima BLT dan anggarannya melebihi proyeksi data yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pemerintah desa yang ada di kabupaten Tuban kebijakan BLT Dana Desa dengan adanya kelebihan proyeksi data yang dilakukan memberatkan keuangan desa untuk dapat melaksanakan program pembangunan di desa. Resistensi ini menjadikan penundaan program pembangunan desa baik secara fisik maupun nonfisik. Belum lagi dengan adanya penambahan perpanjangan penerimaan BLT DD ini yang semula diberikan hanya 3 bulan kepada masyarakat yang kemudian menjadi 6 bulan dan akhirnya ditambah 9 bulan diberikan kepada KPM hal ini tentu memberatkan keuangan desa ditengah pendapatan Asli Desa (PADes) yang menurun akibat dari adanya dampak pandemi ini.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa penetapan sasaran penerima BLT DD dilakukan dengan melihat dan menganalisis data yang telah tervalidasi oleh masing-masing desa melalui kecamatan yang nantinya akan dikonfirmasi oleh pihak Dinas PMD Kabupaten Tuban untuk dapat ditetapkan sebagai kelompok sasaran BLT Dana Desa. Meskipun melebihi proyeksi dan memberatkan keuangan masing-masing desa, pelaksanaan program ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibahas sebelumnya.

5.2.1.3 Mekanisme Pendataan Penerima BLT Dana Desa

Data sebagai kunci utama efektivitas pelaksanaan kebijakan bantuan sosial haruslah berkualitas untuk dapat menjaring KPM yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tapung (2020:15) menyatakan proses pendataan BLT Dana Desa adalah melakukan kegiatan identifikasi pendataan dengan mendapatkan data nama lengkap dan alamat tempat tinggal (*by name, by adress*). Data ini kemudian diverifikasi oleh tim pendata secara bersama dengan pihak pemerintah desa dan BPD demi mendapatkan data yang valid dan akurat. Dalam pendataan ini, tim melakukan kerjasama dan koordinasi. Kerjasama dan koordinasi ini sangat dibutuhkan dalam rangka mendapatkan data yang valid dan akurat mengenai kelompok yang akan mendapat bantuan sosial.

Penetapan kriteria dalam menjaring keluarga kelompok sasaran dalam suatu program kebijakan bantuan sosial yaitu diberikan kepada kelompok masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial melalui Surat Edaran Menteri Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 yaitu masyarakat miskin yang memenuhi 14 kriteria sebagai berikut:

TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN

NO	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1	Luas lantai <8m2/orang
2	Lantai tanah/bambu/kayu murah
3	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4	Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5	Penerangan tanpa listrik
6	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9	Satu stel pakaian setahun
10	Makan 1-2 kali/hari
11	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12	Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan
13	Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu

Dalam implementasi BLT Dana Desa, Pemerintah Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berdasarkan Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa (2020:12) mekanisme pendataan BLT Dana Desa dilakukan dengan:

- 1) Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Data Desa adalah data yang dimiliki oleh desa baik berupa hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan.

- 2) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
- 3) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- 4) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam suatu kebijakan, Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Pelaksanaan pendataan di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan dengan mengikuti instruksi diatas. Korten dan Syahrir (1980) menyatakan bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Pendataan yang tepat akan menghasilkan data yang berkualitas dan data yang berkualitas akan meningkatkan efektivitas dari implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban. Untuk itu implementasi BLT Dana Desa melaksanakan pendataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan mekanisme

pendataan BLT Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan membentuk tim pendata.

Berbeda dengan program bantuan sosial lainnya, kegiatan pendataan yang dilakukan oleh tim pendata adalah dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang dinilai membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang kemudian dilaksanakan proses penyaringan melalui musyawarah desa dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa. Kegiatan ini merupakan langkah yang efektif ditengah menuruunya kepercayaan masyarakat akan pengelolaan bantuan sosial karena maraknya kasus yang terjadi akhir-akhir ini dengan melakukan musyawarah desa untuk dapat menentukan calon KPM BLT DD yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut.

5.2.1.4 Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa

1. Metode Penyaluran BLT DD

Program BLT Dana Desa adalah salah satu program perlindungan sosial masyarakat miskin yang mempunyai tujuan untuk dapat mengatasi permasalahan sosial masyarakat miskin desa yang terdampak Covid-19 secara ekonomi karena hilangnya pekerjaan, berkurangnya pendapatan, atau masyarakat miskin yang belum terjangkau bantuan sosial lainnya yang memang sangat membutuhkan. Program ini dikeluarkan dengan menggunakan metode pembayaran G2P (*Government to people*), yaitu dengan pembayaran/penyaluran bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada orang yang bersangkutan yaitu kelompok sasaran dalam pemberian bantuan ini.

G2P (*Government to People*) yaitu suatu metode penyaluran bantuan sosial dengan pembayaran yang dilakukan pemerintah yang langsung ditransfer kepada orang yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Menurut Pickens dkk, (2009) pencairan/transfer /pembayaran G2P didefinisikan sebagai skema pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah kepada individu atau kelompok masyarakat di negaranya. Menurut Pickens dkk (2009), pembayaran G2P adalah pembayaran tunai untuk program sosial, gaji, pensiun, dan pembayaran lainnya. Dalam penyaluran BLT DD di Kabupaten Tuban dilaksanakan dengan metode penyaluran langsung dari pemerintah desa kepada masyarakat KPM BLT Dana Desa yang telah disahkan sebagai penerima BLT Dana Desa berdasarkan pada surat keputusan masing-masing desa.

Sementara itu, Bank Dunia (2012) mencatat pembayaran G2P sebagai dana yang disalurkan pemerintah terkait dengan manfaat sosial, antara lain insentif/subsidi, manfaat jaminan sosial, komponen gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri, termasuk pensiun dan pengembalian pajak. Menurut definisi ini, pencairan G2P umumnya memiliki karakteristik berupa jumlah transaksi yang besar namun dengan nilai yang relatif kecil. Definisi lain mengenai G2P juga dikembangkan oleh *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), sebagai pembayaran yang di dalamnya termasuk manfaat bantuan pemerintah (*government benefits*) dan gaji. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa program-program yang menggunakan mekanisme pembayaran G2P meliputi program yang memiliki fungsi “bantuan sosial” untuk meningkatkan kesejahteraan dan program pembayaran yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah. Dalam laporannya berjudul “*Banking the Poor via G2P Payments*”, Pickens dkk (2009) mencatat bahwa pembayaran G2P dapat menjangkau masyarakat

miskin melalui dua cara, yaitu (1) transfer sosial; dan (2) pembayaran kepada pekerja aktif dan para pensiunan.

Secara umum, transfer sosial yang dilakukan di banyak negara di dunia meliputi:

- a. *Conditional cash transfer (CCT)*, yaitu pembayaran yang diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dengan syarat penerima bantuan harus melakukan investasi kesehatan dan pendidikan, seperti mengirim anak bersekolah dan memberi imunisasi atau vaksin kepada anak.
- b. *Unconditional cash transfer*, yaitu pembayaran yang diberikan kepada penerima manfaat yang ditargetkan tanpa syarat khusus.
- c. *Workfare transfer*, yaitu pembayaran untuk program-program penciptaan lapangan kerja yang bertujuan mengurangi pengangguran dan membantu masyarakat agar memiliki pendapatan yang lebih stabil.

BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban diklasifikasikan sebagai bentuk bantuan sosial *Unconditional Cash Transfer* dengan metode pembayaran *Government to People (G2P)*. *Unconditional Cash Transfer* merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kelompok sasaran tanpa melihat dan/atau mempunyai kriteria persyaratan khusus bagi penerimanya. Metode pembayaran dilakukan dengan metode langsung diberikan kepada masyarakat kelompok sasaran sebagai bentuk tanggungjawab sosial negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya yang membutuhkan melalui pemerintah desa.

2. Mekanisme Penyaluran BLT DD

Untuk menjalankan proses penyaluran BLT Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik.

Kementerian Keuangan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk mendorong dan membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mempercepat penyaluran BLT Desa.

besaran BLT Dana Desa yang diterima masyarakat miskin adalah sebesar Rp. 600.000 tiga bulan pertama dan Rp. 300.000 pada bulan berikutnya. Akumulasi perindividu KPM BLT Dana Desa adalah Rp. 3.000.000. untuk rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Akumulasi BLT Dana Desa per-KPM di Kab. Tuban

No.	Bulan	Banyaknya (Rp)
9.	Mei	600.000
10.	Juni	600.000
11.	Juli	600.000
12.	Agustus	300.000
13.	September	300.000
14.	Oktober	300.000
15.	November	300.000
16.	Desember	300.000
Jumlah		3.000.000

Sumber: Dinas PMD dan Pemdes dan KB Kab. Tuban (2020)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan di lapangan mengenai implementasi program BLT Dana Desa disalurkan kepada masing-masing KPM sebesar 3.000.000 dari bulan Mei 2020 sampai dengan Desember 2020. Pemberian BLT Dana Desa ini berdasarkan Peraturan Menteri keuangan No. 40 Tahun 2020 dilakukan dengan metode *cashless* atau transfer dengan menggunakan bank HIMBARA (Himpunan Bank Negara) dalam mekanisme penyalurannya. Namun, pada prakteknya dilakukan secara cash karena terjadi permasalahan baru karena kebijakan ini dituntut untuk dapat dilaksanakan secepat

mungkin mengingat pentingnya bantuan ini untuk masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 maka penyaluran BLT Dana Desa yang dilakukan dengan metode *cash* yang diberikan oleh pemerintah desa dan/atau relawan desa lawan Covid-19 kepada KPM dengan bukti penyerahan berupa kwitansi dan dokumentasi/ foto penyerahan bantuan tersebut sebagai syarat pertanggungjawaban melalui pemerintah desa dan dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Penerimaan dan penyerahan dilakukan di masing-masing kantor pemerintah desa setempat secara bertahap.

Penyaluran dilakukan pada 310 Desa yang ada di Kabupaten Tuban dengan metode *cash* yang disalurkan melalui masing-masing desa dengan penanggungjawab adalah kepala desa setempat. Dalam pelaksanaannya, BLT Dana Desa oleh pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola jarring pengaman sosial yang bertanggungjawab kepada pemerintah daerah Kabupaten Tuban.

5.2.1.5 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa

Monitoring dan evaluasi (Monev) pada kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban dilakukan oleh Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban dan Inspektorat Kabupaten Tuban. Pengawasan yang dilakukan bersifat rutin dan hanya administratif pelaksanaan Dana Desa secara keseluruhan. Belum dapat menyentuh pelaksanaan BLT Dana Desa secara spesifik. Pengawasan menjadi penting dimana

baru-baru ini terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Menteri Sosial terkait adanya dugaan kasus korupsi Anggaran bantuan sosial.

Monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya (*outcomes*) (Hogwood and Gunn, 1989). William N. Dunn (1994), menjelaskan bahwa monitoring mempunyai beberapa tujuan, sebagai berikut:

a) *Compliance* (kesesuaian/kepatuhan)

Menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan. Kepatuhan Pemerintah Daerah kabupaten Tuban untuk dapat melaksanakan kebijakan ini adalah dengan diadakannya rapat koordinasi lintas OPD dan Pihak terkait, dengan memperhatikan seluruh regulasi kementerian dan lembaga terkait diatas, maka Pemerintah Kabupaten Tuban mengeluarkan Surat Edaran Bupati Tuban Nomor: 140/2112 /414.106/2020 tertanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Dr. Budi Wiyana. Dalam kebijakan tersebut mengatur tentang pembentukan tim pendata, mekanisme pendataan, mekanisme penyaluran, dan mekanisme penganggaran. Dan dalam pelaksanaanya di setiap desa dilakukan dengan mekanisme tersebut.

Masyarakat desa di Kabupaten Tuban sebagai target kebijakan sepenuhnya mendukung kebijakan ini, hal ini terlihat dalam proses musyawarah desa khusus (musdesus) rencana implementasi kebijakan BLT dana desa. Musdesus adalah forum tertinggi di tingkat desa yang menentukan KPM yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan BLT Dana Desa yang dilaksanakan dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan guna memutuskan jumlah KPM yang emmang layak untuk mendapatkan BLT Dana Desa. Responivitas masyarakat terhadap kebijakan ini sangat tinggi,

karena berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah dipaparkan terdahulu, bahwa warga masyarakat mengharapkan bantuan BLT dana desa ini dapat dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

b. *Auditing* (pemeriksaan)

Menentukan apakah sumber-sumber/pelayanan kepada kelompok sasaran (*target groups*) memang benar-benar sampai kepada mereka. Program ini menjangkau 310 desa di Kabupaten Tuban dan menjadi jaring pengaman sosial terakhir yang dapat diberikan kepada masyarakat kabupaten Tuban. Hal ini memberi dampak positif ditengah cepatnya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat menajaring warga yang belum mendapatkan bantuan sosial apapun dan dinilai dengan objektif melalui forum musyawarah desa. Dengan demikian program yang ideal harus dapat memenuhi kebutuhan kelompok sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Target grup dalam Implementasi BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban diproyeksikan mencapai 29.272 KPM, namun setelah dilaksanakan pendataan secara menyeluruh di Kabupaten Tuban terdapat 33.238 KPM BLT Dana Desa. Persebaran KPM berada di 20 kecamatan dan berada pada 310 Desa dari total 311 desa yang ada di Kabupaten Tuban.

c. *Accounting* (Akuntansi)

Menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Sasaran penerima BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 29.272 KPM yang tersebar di 20

Kecamatan. Sedangkan pada pelaksanaannya jumlah KPM yang telah terdata di Kabupaten Tuban adalah sebanyak 33.238 KPM. Berikut adalah rincian data KPM BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban berdasarkan masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel 12. Jumlah KPM BLT Dana Desa Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah KPM BLT DD (KK)	Anggaran (Rp)
17.	Kenduruan	766	Rp1.378.800.000
18.	Jatirogo	1562	Rp2.811.600.000
19.	Bangilan	1708	Rp3.072.600.000
20.	Bancar	1667	Rp3.324.600.000
21.	Senori	1365	Rp2.457.000.000
22.	Tambakboyo	1724	Rp3.103.200.000
23.	Singgahan	1951	Rp3.511.800.000
24.	Kerek	1535	Rp3.060.000.000
25.	Parengan	2347	Rp4.224.600.000
26.	Montong	1324	Rp2.383.200.000
27.	Soko	2676	Rp4.884.000.000
28.	Jenu	2068	Rp3.703.400.000
29.	Merakurak	1841	Rp3.565.800.000
30.	Rengel	1768	Rp3.182.400.000
31.	Semanding	1676	Rp3.045.250.000
32.	Tuban	415	Rp747.000.000
33.	Plumpang	2211	Rp4.233.193.700
34.	Palang	2225	Rp4.005.000.000
35.	Widang	1618	Rp2.912.400.000
36.	Grabagan	791	Rp1.423.800.000
Jumlah		33.238	Rp61.029.643.700

Sumber: Dinas PMD dan Pemdes dan KB Kab. Tuban (2020)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa KPM BLT Dana Desa telah mencapai sasaran. Dari data diatas terlihat bahwa masing-masing kecamatan mempunyai jumlah KPM yang beragam. Kecamatan yang paling banyak menerima BLT Dana Desa adalah Kecamatan Soko dengan jumlah KPM sebanyak 2676 dengan total anggaran sebanyak Rp4.884.000.000. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penerima manfaat berada di kecamatan Tuban dengan jumlah KPM 415 dan total

anggarana sebanyak Rp747.000.000. Secara spesifik, penetapan KPM diputuskan oleh pemerintah desa setelah dilaksanakan pendataan oleh tim pendata yang berasal dari Relawan Desa Lawan Covid-19. Baru kemudian dilakukan musyawarah desa khusus (musdesus) atau musyawarah insidentil untuk membahas bersama mengenai jumlah calon KPM BLT Dana Desa.

d. *Explanation* (Penjelasan)

Menjelaskan mengenai hasil-hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan kebijakan public. Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu untuk dapat membuat perubahan seperti yang dikehendaki.

Dampak kebijakan berupa perubahan yang diinginkan, yaitu sejauhmana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas. Kebijakan BLT Dana Desa dimaksudkan untuk memperkuat sendi-sendi perekonomian masyarakat miskin desa. Dengan bantuan ini akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan yang diberikan secara berkala pada masa pandemi ini. Untuk itu diharapkan adanya perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya bantuan ini dan adanya kesadaran

masyarakat KPM BLT Dana Desa untu lebih bijak dan bertanggungjawab menggunakan dana bantuan ini.

Peneliti menganalisis implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban dengan menggunakan pendekatan Model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980) atau yang lebih dikenal dengan pendekatan *top-down*. Kerangka pemikiran Merilee S. Grindle (1980: 5) mengenai implementasi kebijakan khususnya di negara berkembang keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu *Content of Policy* (isi kebijakan) and *Context of Implementation* (konteks implementasi). Variabel isi dari kebijakan (*Content of Policy*) ini mencakup:

- 1) Kepentingan kelompok sasaran. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Indikator ini memiliki argumen bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasinya.
- 2) Tipe manfaat, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh *target group*. Dalam konten kebijakan, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakanyang akan dilaksanakan.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan, yaitu sejauhmana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang ingin

dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.

- 4) Letak pengambilan keputusan. Apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum. Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- 5) Pelaksanaan program. Maksudnya apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci. Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi demi keberhasilan suatu kebijakan.
- 6) Sumber daya yang dilibatkan, apakah sebuah program didukung dengan sumber daya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumber daya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan meliputi:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa, bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada

bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- 3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas) kelompok sasaran. Kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh manakah kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

5.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban

Dalam bagian ini akan diuraikan keterkaitan fakta-fakta empirik berupa data hasil penelitian dengan indikator-indikator faktor pendukung dan penghambat kebijakan dari turunan variabel teori yang dikemukakan oleh Grindle. Hal ini tidak terlepas dari metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif yang berangkat dari fenomena-fenomena untuk mencari kesesuaian atau relevansi teoritik. Berikut adalah hasil analisis hasil penelitian dengan teori yang akan dibahas mendalam mengenai fenomena yang terjadi.

5.2.2.1 Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1. Kepentingan kelompok sasaran (*target group*)

Grindle (1980:7) menyatakan bahwa proses implementasi baru akan dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kerja telah tersusun dan dana telah siap untuk disalurkan untuk dapat mencapai sasaran. Setiap program kebijakan pemerintah akan berdampak pada kondisi masyarakat. Dalam hal ini implementasi diharapkan akan membawa perubahan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Setiap perubahan yang terjadi akan menimbulkan reaksi yang berbeda pada kelompok sasaran. Program kebijakan yang ideal menurut Smith (1983: 203) meliputi tiga aspek, yang meliputi:

a) Program tersebut mendapat dukungan dari pemerintah;

Pemerintah memberikan dukungan terhadap program BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban dengan dilaksanakannya kebijakan ini sesuai dengan arahan mulai dari bulan Mei sampai dengan Desember 2020 dengan melaksanakan kebijakan dari pusat, daerah provinsi dan kebijakan pada level Kabupaten/Kota.

e. Program tersebut dapat memenuhi kebutuhan warga,

Kebutuhan warga masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya ditengah situasi pandemic Covid-19 menjadi priorittas pemerintah untuk dapat membantu keluarga miskin dan rentan ditengah bencana yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat miskin kabupaten Tuban masih sangat besar ditambah dengan situasi dan kondisi yang terdampak pandemic Covid-19 sehingga bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan hidup masyaakat yang terdampak pandemic secara sosial ekonomi untuk dapat bertahan.

f. Luasnya cakupan program.

Program ini menjangkau 310 desa di Kabupaten Tuban dan menjadi jarring pengaman sosial terakhir yang dapat diberikan kepada masyarakat kabupaten Tuban. Hal ini memberi dampak positif ditengah cepatnya perubahan sosial yang terjadi di amsyarakat dapat menajaring warga yang belum mendapatkan bantuan sosial apapun dan dinilai dengan objektif melalui forum musyawarah desa. Dengan demikian

program yang ideal harus dapat memenuhi kebutuhan kelompok sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Grindle dalam Subarsono (2008: 93-94) merumuskan sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan dan besarnya manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran. Jika kepentingan kelompok sasaran bisa diakomodir maka suatu kebijakan akan dapat diimplementasikan relatif lebih baik. Kebijakan pemerintah akan berdampak pada adanya perubahan dalam masyarakat. Untuk itu setiap perubahan yang terjadi sebagai akibat implementasi kebijakan akan menimbulkan reaksi yang berbeda pada kelompok sasaran.

Kelompok sasaran adalah sekumpulan objek yang menjadi sasaran yang dalam hal ini menjadi kelompok yang memenuhi kriteria untuk dapat mendapatkan bantuan BLT Dana Desa. *Target group* atau kelompok sasaran kebijakan ini adalah masyarakat miskin dan rentan dan terdampak secara sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, dalam konteks penelitian adalah masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Tuban yang belum tercover bantuan sosial lainnya. Grindle (1980:116) menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat *policy maker* hendaknya dapat memuat kepentingan-kepentingan dan manfaat yang akan dirasakan kelompok sasaran. Kepentingan Kelompok sasaran dapat dilihat pada muatan kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 pasal 8A ayat (3) menjelaskan keluarga miskin KPM BLT Dana Desa yang dimaksud adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan atau sakit menahun/kronis.

Target grup dalam Implementasi BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban diproyeksikan mencapai 29.272 KPM, namun setelah dilaksanakan pendataan secara menyeluruh di Kabupaten Tuban terdapat 33.238 KPM BLT Dana Desa. Persebaran KPM berada di 20 kecamatan dan berada pada 310 Desa dari total 311 desa yang ada di Kabupaten Tuban. Artinya terdapat 1 desa yang tidak menganggarkan BLT Dana Desa yaitu Desa Bunut Kecamatan Widang. Jumlah ini melebihi proyeksi data yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur.

Penentuan target group merupakan hal penting dimana kita dapat melihat kelompok masyarakat seperti apa yang menerima BLT Dana Desa untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penentuan ini sebagai titik awal indikator efektivitas bantuan sosial yang diberikan dan memastikan bantuan sosial yang diberikan lebih tepat sasaran. Akurasi data menjadi tolak ukur utama dalam pemilihan target group dalam pemberian BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban. Kelompok sasaran KPM BLT Dana Desa termuat dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 pasal 8A ayat (3) menjelaskan kelompok sasaran dalam implementasi BKT Dana Desa adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan atau sakit menahun/kronis.

5. Jenis Manfaat yang diterima *Target Group*

Dalam perspektif New Public Service, menurut Prof. Dr. Budiman Rusli, MS (2013:3) menyatakan sebuah kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah haruslah memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam konten kebijakan, manfaat

kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan. Adanya bantuan sosial memang seyogyanya memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat penerima bantuan. Manfaat yang dirasakan masyarakat inilah yang akan membuahkan dukungan kepada kebijakan pemerintah di masa pandemi apabila diimplementasikan dengan benar ditengah viralnya kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum terhadap adanya bantuan sosial yang memicu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jenis manfaat yang diterima oleh *target group* adalah sesuai dengan tujuan diterapkannya kebijakan ini yaitu untuk dapat menjaga daya beli masyarakat ditengah kondisi perekonomian negara yang tidak menentu dan terjadinya penurunan daya beli masyarakat secara nasional. Berbagai bantuan sosial lainnya yang telah diberikan pemerintah baik pusat maupun daerah di Kabupaten Tuban nyatanya memang kurang dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin dan akhirnya kebijakan BLT Dana Desa hadir untuk menjaring masyarakat yang membutuhkan karena dampak dari adanya pandemi. Berdasarkan penelitian di Kabupaten Tuban, BLT Dana Desa telah disalurkan kepada 33.238 KPM yang tersebar di 310 desa dan 20 kecamatan yang diberikan secara berkala selama 9 bulan nyatanya memang memberikan manfaat untuk masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan berkurangnya pendapatan secara drastis ditengah pandemi yang melanda ditambah dengan angka kemiskinan di kabupaten tuban memang sudah tinggi menjadikan kebijakan BLT Dana Desa memang diperlukan untuk menjaring masyarakat miskin klaster baru. Dengan demikian

manfaat yang diterima oleh target groups melalui kebijakan ini sangat besar sekali, sehingga respon masyarakat desa terhadap bantuan dana desa sangat positif. Kemudian dengan adanya sistem musyawarah dalam proses pendataan memberikan peningkatan kualitas data kesejahteraan masyarakat sehingga kebijakan ini akan meningkatkan ketepatan sasaran dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya.

Disisi lain, *output* pemberian bantuan sosial selama ini hanya berfokus pada ketepatan sasaran dan kurang memperhatikan aspek lain yang tidak kalah penting yaitu ketepatan guna. Ketepatan penggunaan dana bantuan sosial merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas implementasi BLT Dana Desa, karena selama ini pemerintah mengucurkan dana yang tidak sedikit yang dianggarkan untuk program jarring pengaman sosial untuk kesejahteraan masyarakat miskin bahkan sampai membebani hutang negara yang seyogyanya memang harus benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan terutama yang terdampak Covid-19 untuk dapat melangsungkan hidup. Perlunya penyadaran terhadap masyarakat terhadap bantuan sosial yang diberikan untuk dapat benar-benar menggunakan dana bantuan secara bertanggungjawab.

Dalam proses penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban tidak ada himbauan kepada KPM untuk dapat lebih bertanggungjawab terhadap bantuan yang diberikan pemerintah melalui program tersebut, hal ini menjadi penting karena dengan adanya himbauan atau arahan dari pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah untuk menyadarkan masyarakat untuk menggunakan bantuan tersebut secara bertanggungjawab dan sesuai dengan tujuan dari diberikannya BLT Dana Desa tersebut. Akibatnya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, masih banyak warga masyarakat KPM BLT Dana Desa yang menggunakan dana tersebut bukan

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini tentu menjadi masalah dimana pemanfaatan dana bantuan tersebut kurang tepat dalam pemakaian atau kurang tepat guna.

Manfaat yang dirasakan dari implementasi kebijakan akan membuahkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan, sehingga implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik tanpa adanya resistensi dari masyarakat selaku kelompok sasaran. Wahab (2004) menyatakan penolakan terhadap sebuah perubahan sebagai akibat implementasi kebijakan.

6. Perubahan yang Diinginkan dari Adanya Kebijakan

Kinerja implementasi dapat diukur melalui variabel-variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Kebijakan yang sesuai dengan kehendak masyarakat akan mendorong mereka untuk dapat berpartisipasi untuk memberikan kontribusi yang optimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Grindle, 1980 :110) Implementasi kebijakan diharapkan dapat membuat perubahan terhadap kelompok sasaran agar berdampak seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (*policy maker*).

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu untuk dapat membuat perubahan seperti yang dikehendaki.

Dampak kebijakan berupa perubahan yang diinginkan, yaitu sejauhmana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang

ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas. Kebijakan BLT Dana Desa dimaksudkan untuk memperkuat sendi-sendi perekonomian masyarakat miskin desa. Dengan bantuan ini akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan yang diberikan secara berkala pada masa pandemi ini. Untuk itu diharapkan adanya perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya bantuan ini dan adanya kesadaran masyarakat KPM BLT Dana Desa untuk lebih bijak dan bertanggung jawab menggunakan dana bantuan ini.

Perubahan signifikan yang diharapkan oleh *target groups* dari kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban adalah terjadinya tatanan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena kehilangan mata pencaharian ataupun memang kemiskinan struktural sehingga masyarakat kabupaten Tuban dapat hidup dengan layak dan dapat memenuhi kebutuhan primer dan diharapkan dari dana bantuan tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, Dengan adanya kebijakan ini, maka pemerintah desa ditantang untuk mempercepat proses penyakuran BLT Dana Desa sehingga akan dapat dirasakan dengan cepat manfaat dari adanya kebijakan ini.

7. Apakah letak suatu program sudah tepat

Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Menurut Riant Nugroho (2012:707) menyatakan ketepatan kebijakan dinilai dari beberapa aspek diantaranya adalah (1) sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan; (2) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan; (3) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

a) sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

BLT Dana Desa sebagai respon adanya dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19 untuk menjaring masyarakat yang belum menerima bantuan sosial apapun dirasa sudah tepat, walaupun terdapat beberapa permasalahan teknis dalam implementasinya nyatanaya program ini memang sangat diperlukan masyarakat ditengah permasalahan krisis global yang terjadi. Sebagai amanat dari Undang-Undang No.2 Tahun 2020, BLT Dana Desa haruslah dilaksanakan secara efektif, tepat guna dan tepat sasaran. Untuk itu diperlukan dukungan berbagai pihak untuk dapat bersama-sama meningkatkan sistem dalam pelaksanaan BLT Dana Desa.

BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan di 310 Desa dari 311 Desa yang ada di Kabupaten Tuban. Mengingat data kemiskinan di Kabupaten Tuban yang sangat tinggi kebijakan ini tentu akan membantu masyarakat miskin dan rentan untuk dapat bertahan hidup selama masa pandemi. Namun disisi lain, apabila program ini berlanjut, maka akan ada permasalahan baru yang akan terjadi diantaranya ketergantungan masyarakat akan bantuan sosial meningkat dan akan membebani APBDes masing-masing desa, mengingat seharusnya Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan desa belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk itu diperlukan adanya penyaliran terhadap masyarakat miskin yang memang rentan dan tidak berdaya untuk dapat dialihkan sebagai penerima bantuan sosial lainnya seperti PKH yang memang seharusnya tercover dalam program tersebut. Bagi KPM BLT Dana Desa yang masih muda dan sehat dapat dialihkan kepada program Kartu Prakerja agar mendapatkan skill kerja yang dibutuhkan.

g. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan

Ketepatan kebijakan merupakan aspek yang penting dalam implementasi kebijakan, karena akan menentukan bagaimana implementasinya. Implementasi kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan berhasil ketika kebijakan dibuat berdasarkan pada kondisi permasalahan riil di masyarakat dan dimulai dengan *believe in goodness*, didasarkan pada nilai kebaikan untuk mengatasi dan mencegah adanya permasalahan yang ada. Untuk menjaga kemampuan daya beli penduduk miskin di desa akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh merebaknya wabah COVID-19 dan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin, pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT Dana Desa untuk dapat memecahkan permasalahan ini. Solusi kebijakan ini diberikan sementara untuk masyarakat miskin sebagai perlindungan sosial dimasa-masa sulit dengan melihat kemampuan keuangan negara.

h. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan

Data menunjukan bahwa semenjak Maret tahun 2020, pemerintah di berbagai level (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga Desa) benar-benar dibawah dan dihadapkan pada situasi “perjuangan” dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dalam dimensi perjuangan, pemerintah berusaha sekuat tenaga menghadapi bahaya pandemi Covid-19 melalui berbagai kebijakan dan strategi. Sebagian besar energi bangsa telah dikerahkan pemerintah dalam kerangka menyelamatkan warga negara.

Policy Maker dan *leading sector* dari kebijakan ini adalah Kementerian Desa PDTT. Kementerian Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa salah satunya membuat, mengendalikan kebijakan BLT Dana Desa ini. Hal ini sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi ini untuk dapat menyelenggarakan tugasnya.

8. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

Pelaksana Program mempunyai peran penting dalam proses implementasi kebijakan. Untuk itu Badan Pelaksana sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam proses implementasi harus diberikan kewenangan yang jelas dan tegas. Untuk itu dalam pandangan Grindle (1980), dalam Tachjan (2008; 19), organisasi hendaknya disusun atas prinsip kontrol hirarkis, dimana tanggung jawab atas pengambilan keputusan dan kinerja sistem secara keseluruhan, diserahkan pada pimpinan atas, yang nantinya akan mengalokasikan tugas-tugas dan tujuan-tujuan kinerja secara spesifik kepada unit-unit bawahan dan memantau kerja mereka. Dalam prinsip perintah dan kontrol, akses komunikasi harus lancar agar perintah dan kontrol mudah untuk dilakukan.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan kapasitas demi

keberhasilan suatu kebijakan. Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 melalui beberapa pasalnya menyebutkan bahwa implementor dari kebijakan ini adalah dari berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempunyai wewenang dan pelaksana dari program. Secara garis besar Implementor dari adanya kebijakan ini dapat dilihat dari table dibawah ini:

Berkaitan dengan penelitian ini, implementor kebijakan di tingkat Kabupaten adalah Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban sampai dengan pemerintah desa itu sendiri. Hal ini sangat jelas tugas dan kewenangan OPD bersama dengan pemerintah desa mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan dan pertanggung jawaban. Meskipun demikian perlu dijelaskan bahwa implementor kebijakan BLT Dana Desa bukanlah hanya kepala desa dan perangkat desa, melainkan juga Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 yang ikut serta dalam proses pendataan dan validasi calon KPM BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban.

Dalam pandangan Grindle jarak antara implementor dengan kelompok sasaran mempunyai pengaruh dalam implementasi kebijakan. Semakin dekat jarak antara implementor dengan kelompok sasaran, maka akan memudahkan komunikasi diantara kedua belah pihak. Kelancaran arus komunikasi memudahkan koordinasi dan kontrol, dimana perkembangan pekerjaan serta persoalan yang dihadapi dalam implementasi akan dapat segera diketahui dan dicarikan solusinya. Berkenaan dengan hal tersebut. Menurut Sabatier dan Mazmanian (1980) bahwa kontrol hirarkis yang sempurna atas proses pelaksanaan sulit untuk dicapai, dalam praktek dan kondisi yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan kegagalan implementasi.

9. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumberdaya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya financial.

a. Sumber daya Manusia Aparatur Desa

Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukung penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan ditengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya.

Berkaitan dengan kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban, faktor yang masih perlu mendapat perhatian adalah sumber daya manusia yang juga menjadi implementor kebijakan, yaitu pemerintah desa. Keterbatasan sumber daya manusia ini dalam kenyataannya menjadi penghambat implementasi kebijakan ini. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, rata-rata kemampuan aparat pemerintah desa, termasuk kepala desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat minim dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial.

Selain itu, adanya kebijakan pemerintah pusat untuk dilaksanakan kementerian, daerah maupun pemerintahan desa untuk dapat

merelokasi/refocusing keuangan baik dari APBN, APBD dan juga APBDes untuk penanganan Covid-19 menuntut untuk semua jenjang pemerintahan melakukan perubahan anggaran tersebut, termasuk pemerintah desa di Kabupaten Tuban. Hal ini tentu memberatkan melihat kondisi sumber daya aparat desa yang masih rendah dan dituntut untuk mempunyai kapasitas mengelolanya tentu akan sulit.

b. Sumber Daya Financial

Disisi lain, sumber daya financial yang ada dapat dikatakan memadai untuk dapat menjalankan program. Total anggaran untuk mendanai kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban adalah sebesar Rp61.029.643.700. jumlah anggaran tersebut akan diberikan kepada 33.238 KPM dengan pemberian secara berkala selama bulan Mei 2020 sampai dengan Desember 2020 sebagai jaring pengaman sosial masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban. Selain itu, adanya kenaikan Anggaran Dana Desa di kabupaten Tuban dari tahun 2019 sebesar Rp.256.256.120.000 dan pada tahun 2020 menjadi Rp 263.445.066.000. adanya kenaikan ini diberikan untuk pemerintah desa agar menganggarkan keuangannya untuk dapat mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 di tingkat desa berupa pembentukan tim relawan desa lawan Covid-19, penyediaan sarana prasarana kesehatan dan pengalokasian untuk program jaring pengaman sosial di tingkat desa yaitu BLT Dana Desa.

5.2.2.2 Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

Suatu kebijakan yang dibuat perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

a. Kekuasaan

Di negara modern dan demokratis, hubungan yang polanya *top-down* bukan hanya dianggap usang dan tidak kompatibel dengan sistem yang ada, tetapi juga tidak sehat, setidaknya dalam jangka panjang karena berdampak buruk dan mengacaukan hakekat tujuan publik, sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi. Pola-pola hubungan pemerintahan model lama yang cenderung *top-down* dan otoritarian sudah bukan zamannya lagi diberlakukan untuk Indonesia yang sistemnya semakin demokratis. Misalnya ketika alat-alat kekuasaan, dengan menggunakan pola lama dianggap mampu secara efektif mengancam masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dan menerima kualitas pelayanan yang diberikannya tanpa reserve, sekarang ini tidak bisa diberlakukan. Apalagi alat-alat kekuasaan itu kini tidak sekuat dulu oleh sistem yang ada, sehingga hubungan pemerintahan model lama jika digunakan akan kontraproduktif.

Dalam hal ini para aktor kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang beraneka ragam. Sehingga masing-masing

memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda. Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka punya. Sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka duduki.

b. Kepentingan

Kepentingan dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa bahwa tugas dari pemerintah Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Istilah “kesejahteraan umum” yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai arti yang sama dengan istilah “kesejahteraan sosial” yang tercantum dalam Bab XIV UUD 1945 (Fahrudin, 2012). Dengan demikian Kebijakan BLT Dana Desa pada hakekatnya bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat agar masyarakat tetap memiliki kemampuan secara ekonomi dalam membeli kebutuhan pokok khususnya yang berhubungan dengan ketersediaan pangan yang bernilai gizi.

c. Strategi

Strategi merupakan cara yang dipilih dan terkonsep untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan untuk menjalankan berbagai program sesuai tugas dan fungsi satuan unit kerja.

Pada tingkat pemerintah daerah kabupaten Tuban, aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan BLT dana desa selain Dinas PMD dan KB adalah Inspektorat Kabupaten Tuban. Dinas PMD dan KB Kabupataen Tuban bersama pemerintah desa

selaku leading sector pelaksana kebijakan ditingkat daerah mendapat pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Tuban.

Tabel 13. Peran berbagai aktor dalam BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban

Aktor	Peranan
Dinas PMD dan KB Kab. Tuban	Implementor dan Leading sector di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota
Dinas Sosial Kab. Tuban	Penyediaan data awal melalui sistem DTKS
Inspektorat Kab. Tuban	Melaksanakan fungsi monitoring dan pengawasan BLT Dana Desa
Pemerintah Desa	Implementor di tingkat desa yang berhubungan langsung dengan KPM BLT Dana Desa
Badan Permusyawaratan Desa	Melaksanakan fungsi pengawasan di tingkat desa
Masyarakat KPM BLT Dana Desa	Objek kelompok sasaran penerima BLT Dana Desa
Masyarakat umum	Mengawasi dan memonitoring dalam proses pelaksanaan BLT Dana Desa
Media Massa	Mengawasi dan menyebar luaskan kebijakn BLT Dana Desa.

Sumber: Penulis (2020)

Hubungan antar aktor dalam suatu implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini sinergitas antara Dinas, PMD dan KB, Dinas Sosial, Inspektorat dan aktor yang ada di desa diperlukan untuk dapat menjalankan tugasnya mengawal BLT Dana Desa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan peratursn perundang-undangan. Selain itu, sinergitas aktor utama dalam implementasi ditingkat desa yaitu Kepala Desa dan BPD dalam implementasi program sangat dibutuhkan, sehingga program-program pembangunan yang telah disusun dari bawah melalui musrembang akan terealisasi.

2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa

Dalam implementasi kebijakan haruslah memahami bagaimanakah keberadaan institusi dan rejim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Sebagai suatu organisasi pemerintah yang memiliki fungsi pembangunan dan pemberdayaan desa, maka birokrasi pemerintahan di Kabupaten Tuban mendukung kebijakan ini, khususnya Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Karakteristik dari OPD ini akan memengaruhi pelaksanaan kebijakan karena program ini dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dalam kenyataannya program BLT Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa juga selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Pendekatan kepatuhan dalam literatur Administrasi Publik memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan individu bawahan terhadap individu atasan. Perspektif kepatuhan ini merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Berdasarkan pendekatan kepatuhan, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh

tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu Kepatuhan Implementor dalam mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan.

Implementor dalam tingkat pemerintah Kabupaten Tuban adalah Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban. Dalam menjalankan tugasnya dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa OPD ini menjalankan tugasnya dengan melihat peraturan perundang-undangan di atasnya diantaranya adalah:

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.
9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran–1 dan Lampiran–2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
10. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan

Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
15. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
16. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
17. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
18. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

19. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
20. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
21. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.
22. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 411.2/3300/112.2/2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid 19 di Desa, tanggal 20 April 2020.

Kepatuhan Pemerintah Daerah kabupaten Tuban untuk dapat melaksanakan kebijakan ini adalah dengan diadakannya rapat koordinasi lintas OPD dan Pihak terkait, dengan memperhatikan seluruh regulasi kementerian dan lembaga terkait diatas, maka Pemerintah Kabupaten Tuban mengeluarkan Surat Edaran Bupati Tuban Nomor: 140/2112 /414.106/2020 tertanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Dr. Budi Wiyana. Dalam kebijakan tersebut mengatur tentang pembentukan tim pendata, mekanisme pendataan, mekanisme penyaluran, dan mekanisme penganggaran. Dan dalam pelaksanaanya di setiap desa dilakukan dengan mekanisme tersebut.

Menurut Reply (1986:11) Kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan,

maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh manakah kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Masyarakat desa di Kabupaten Tuban sebagai target kebijakan sepenuhnya mendukung kebijakan ini, hal ini terlihat dalam proses musyawarah desa khusus (musdesus) rencana implementasi kebijakan BLT dana desa. Musdesus adalah forum tertinggi di tingkat desa yang menentukan KPM yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan BLT Dana Desa yang dilaksanakan dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan guna memutuskan jumlah KPM yang layak untuk mendapatkan BLT Dana Desa. Responivitas masyarakat terhadap kebijakan ini sangat tinggi, karena berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah dipaparkan terdahulu, bahwa warga masyarakat mengharapkan bantuan BLT dana desa ini dapat dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan faktor pendukung dan penghambat kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban adalah

1. komitmen pemerintah pusat

Komitmen dalam berorganisasi menurut Meyer dan Ellen dalam Khaerul Umam (2010:258) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaanya dalam berorganisasi. untuk itu setiap keputusan yang ambil dalam organisasi haruslah tepat dalam mengambil tindakan, khususnya dalam pembahasan ini adalah salah bantuan sosial yang merupakan bagian dari permasalahan publik.

Program bantuan sosial berupa BLT Dana Desa merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 di desa. Dengan adanya Instruksi Presiden Joko Widodo agar penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan dengan segera dan dipercepat karena memang sangat diperlukan. Hal ini dirasa perlu untuk dapat menyalurkan BLT Dana Desa secara segera mengingat kondisi masyarakat yang berubah akibat pandemi sehingga perlu untuk adanya percepatan mengenai BLT Dana Desa ini tersalurkan. Dengan adanya instruksi presiden tersebut, Menteri Desa PDTT mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Menteri Desa PDTT No.1 Tahun 2020 agar BLT-DD segera disalurkan tanpa menunggu pengesahan di tingkat kabupaten/kota. Sehingga hal ini dapat memudahkan OPD terkait dan pemerintah desa untuk segera mengimplementasikan BLT Dana Desa kepada KPM. Pemerintah daerah perlu untuk dapat segera merespon adanya perubahan tersebut dengan menginstruksikan kedalam kebijakan untuk dapat dilaksanakan ditingkat desa untuk dapat berkomitmen bersama melaksanakan kebijakan ini.

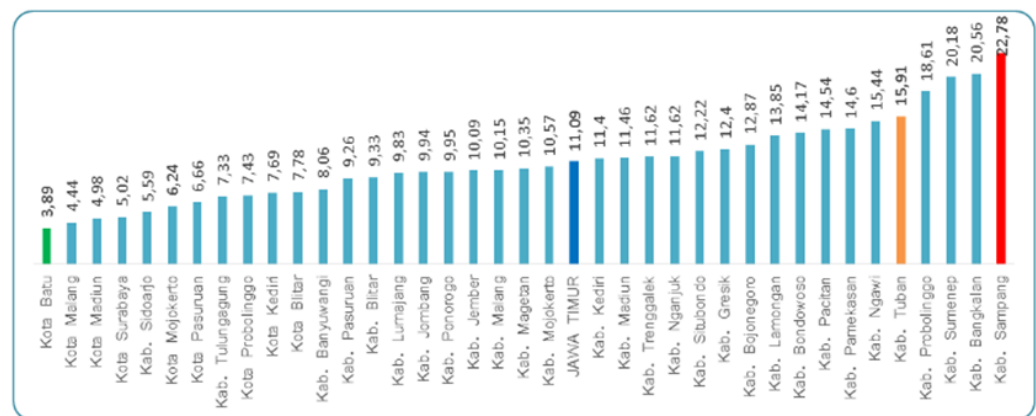
Dalam rangak menganalisis komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ini, peneliti menggunakan konsep dari Meyer dan Allen dalam Khaerul Umam (2010:262) yang mengemukakan beberapa indikator untuk dapat mengukurnya, diantara adalah *Affective Commitment*, *Ontinuanance Commitment*, dan *Normative Commitment*.

a. *Affective Commitment*

Individu dengan *affective commitment* yang tinggi memiliki kedekatan emosional yang erat terhadap organisasi. *Affective commitment* berhubungan dengan tingkat kehadiran individu dalam organisasi dan

memiliki hubungan positif dengan keinginan untuk menyarankan suatu hal demi kemajuan organisasi serta loyalitas individu terhadap organisasi. Dalam konteks ini, komitmen pemerintah terutama pemerintah pusat hadir dalam melaksanakan tugasnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakatnya yang memerlukan bantuan ditengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terguncang akibat pandemic Covid-19 dengan memberikan pelayanan dibidang sosial berupa bantuan sosial BLT Dana Desa, khususnya di kabupaten Tuban.

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020



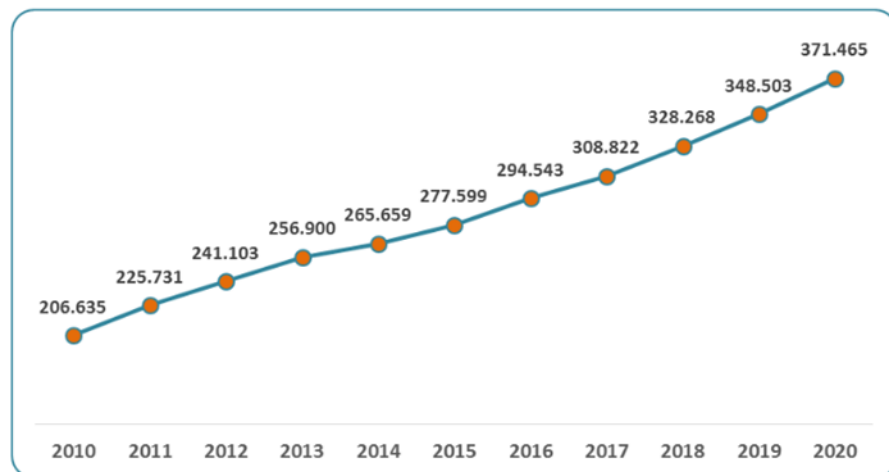
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas 2010-2020

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah termiskin di Jawa Timur pada 10 tahun terakhir dan selalu masuk ke dalam 10 lingkaran setan daerah termiskin di Jawa Timur sehingga komitmen afektif ini diperlukan lebih baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan ini, terutama akhir-akhir ini karena pandemi.

b. Continuanse Commitment

continuance commitment akan bertahan dalam organisasi, bukan karena alasan emosional, tapi karena adanya rasa kerugian besar jika meninggalkan organisasi. Komitmen pada bagian ini memiliki makna adanya kontinuitas organisasi untuk menyelesaikan sesuatu isu/permasalahan. Komitmen pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan menyelesaikan permasalahan kemiskinan melalui bantuan sosial telah dilakukan dari zaman dahulu melalui berbagai program kebijakan baik BLT, BST, PKH dan program bantuan sosial lainnya, belum banyak mengubah keadaan, terutama di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tuban, garis kemiskinan di Kabupaten Tuban selalu mengalami kenaikan dari 10 Tahun terakhir.

Gambar 3. Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban Maret 2010 – 2020



Sumber: BPS, diolah dari data Susenas 2010 - 2020

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa grafik kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban selalu mengalami kenaikan, sehingga diperlukan adanya komitmen yang bersifat kontinyu, terus menerus untuk dapat mengontrol permasalahan kemiskinan ini. Dengan adanya komitmen

pemerintah pusat dan daerah dan lembaga terkait untuk dapat serius mengelola program kebijakan ini perlu diapresiasi.

c. *Normative Commitment*

Individu dengan *Normative Commitment* yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa adanya suatu kewajiban atau tugas. *Normative Commitment* berhubungan positif dengan pengukuran hasil kerja. Dalam konteks ini, *normative commitment* terletak pada adanya penilaian kinerja melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memperbaiki proses yang implementasi penyaluran BLT Dana Desa secara menyeluruh kepada setiap KPM BLT Dana Desa.

Dengan adanya komitmen dan percepatan ini, implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan yang telah dilakukan diantaranya adalah: (1) penetapan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan yang ada, sehingga dalam penganggaran dapat diatur dan tidak terlalu membebani APBDes; (2) mekanisme pendataan telah dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan mengikutsertakan ketua RT/RW/ Kepala Dusun untuk dapat ikut serta memberikan masukan warganya yang memang membutuhkan dan belum tersentuh bantuan sosial lainnya yang kemudian dibawa kedalam forum musyawarah desa; (3) mekanisme penyaluran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri desa PDTT No.6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2020 dilakukan dengan metode *cash* melalui pemerintah desa dan tetap memperhatikan protocol kesehatan;

dan yang terakhir (4) monitoring dan evaluasi dilakukan oleh semua lini pemerintahan baik pusat maupun daerah dan desa. Lembaga ditingkat daerah yang berperan dalam fungsi ini adalah Inspektorat Kabupaten Tuban dan Dinas terkait yaitu Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban dalam melaksanakan pengawasan dan juga BPD pada tingkat desa yang mengawasi jalannya kebijakan ini di level desa.

2. Persyaratan Calon KPM BLT Dana Desa yang Mudah

Kemudahan akses diperlukan sebagai kunci dalam percepatan implementasi penyaluran BLT Dana Desa sehingga dapat melancarkan prosesnya. Adanya kebijakan kelonggaran yang diberikan pemerintah baik persyaratan administratif maupun substantif akan dapat memberikan kemudahan dalam proses penyalurannya. Kemudahan ini didapatkan dikarenakan adanya reformasi birokrasi dalam membenahi sistem yang ada dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Walaupun demikian, kelonggaran ini dihapkan untuk dapat dijalankan dengan penuh tanggungjawab. Persyaratan penerima BLT Dana Desa adalah masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya atau pekerjaannya akibat pandemi, masyarakat miskin yang belum tercover bantuan sosial apapun dan masyarakat yang rentan karena sakit menahun. Persyaratan ini dirasa mudah untuk diimplementasikan dalam proses pendataan calon KPM dimana akan sangat mudah menganalisis calon KPM karena masyarakat sekitar yang lebih tahu bagaimana kondisi riil calon penerima BLT Dana Desa.

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion

error) yang memenuhi kriteria sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja;
- b) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Lampiran 2: Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT-Dana Desa

[illegible]

* Lansia, penyandang disabilitas, atau perempuan kepala keluarga.

Mengetahui,
Kepala Desa
32

(Nama Lengkap)

....., (tgl/bln/thn)
Pencatat

Pencatat

(Nama Lengkap)

Sumber: Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa (2020)

Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yg dipenuhi, maka semakin diprioritaskan untuk menjadi penerima BLT Dana Desa. Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa. Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih

target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong-royong.

3. Pendekatan Modal Sosial (*Social Capital*) dalam Proses Pendataan

James Coleman yang dikutip dalam Fukuyama (2007:12) mendefinisikan *social capital* yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Dalam penelitian ini modal sosial tercipta dalam proses pendataan dimana terdapat proses musyawarah mufakat pada tingkat desa dilakukan. Michael Wollcock (dalam Dwi Rajibianto, 2010) membedakan tiga tipe modal sosial yaitu sebagai berikut:

1. *Sosial Bounding*: berupa kultur nilai, kultur persepsi dan tradisi atau adat istiadat. Modal sosial dengan karakteristik ikatan yang kuat dalam suatu sistem kemasyarakatan di mana masih berlakunya sistem kekerabatan dengan sistem klen yang mewujudkan rasa simpati, berkewajiban, percaya resiprositas dan pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang dipercaya. Tradisi merupakan tata kelakuan yang kekal serta memiliki integrasi kuat dalam pola perilaku masyarakat mempunyai kekuatan mengikat dengan beban sanksi bagi pelanggarnya. Dalam proses pendataan BLT Dana Desa ini, *social bounding* terlihat didalam proses penentuan calon BLT DD yang dilakukan dengan keputusan bersama dan masyarakat dilibatkan untuk dapat menentukan calon KPM yang secara sukarela memberikan keterangan kepada petugas pendata untuk memvalidasi apakah calon KPM benar-benar memenuhi kriteria penerima manfaat BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban.

2. *Social Bridging*: berupa institusi maupun mekanisme yang merupakan ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Dapat dilihat pula adanya keterlibatan umum sebagai warga negara, asosiasi, dan jaringan. Adanya ikatan/jaringan sosial yang melekat pada masyarakat pedesaan pada umumnya berempati satu sama lain yang akan membantu untuk dapat meningkatkan kualitas data.
3. *Social Linking*: berupa hubungan/jaringan sosial dengan adanya hubungan diantara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Jaringan sosial yang ada di masyarakat yang erat sehingga hubungan yang ada sehingga masyarakat setempatlah yang paling mengetahui kondisi riil calon penerima bantuan sosial yang ada.

Untuk menjamin bantuan ini disalurkan secara adil dan merata maka keterlibatan seluruh pihak termasuk organisasi masyarakat sipil sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip gotong-royong dan kemanusiaan sebagai modal sosial kekuatan bangsa Indonesia. Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Pemberian BLT Dana Desa ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria serta belum menerima PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja. Penetapan

data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT Dana Desa ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong-royong. Proses validasi dan penetapan sasaran BLT Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa dimana Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.

Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama. Kemudian Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.

Sebagai bentuk komunikasi, Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati Tuban, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

4. Diskresi Administrasi bagi Pemerintah Desa

Dalam undang-undang pengertian diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Selain itu menurut Prof. Muchsan dalam Yuniar (2016:59) menyatakan terdapat beberapa alasan terjadinya diskresi yaitu: (1) Mendesak dan alasannya mendasar serta dibenarkan motif perbuatannya; (2) Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar dalam menetapkan kebijaksanaan diskresi, khusus untuk kepentingan umum, bencana alam dan keadaan darurat, yang penetapannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan (3) Untuk lebih cepat, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang, penyelenggaraan pemerintahan negara, dan untuk keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan BLT Dana Desa secara umum telah memenuhi kriteria kondisi perlu dilakukannya diskresi administrasi yaitu: (1) mendesak, karena kebijakan ini dibuat dengan waktu yang singkat sehingga apabila dilakukan perumusan yang rinci dan mendetail mengenai kebijakan BLT Dana Desa ini akan lambat dan berdampak pada keparahan kondisi kemiskinan masyarakat pada umumnya sehingga perlu dilakukan diskresi yang bertanggungjawab kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengelola teknisnya; (2) kebijakan ini adalah untuk kepentingan umum dalam kondisi darurat karena adanya bencana wabah pandemic Covid-19 yang sangat

berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Tuban; (3) untuk dapat mempecepat penyaluran kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan keefektivitasan dan keefisienan waktu dan sumber daya sehingga diperlukan aksi secepatnya untuk dapat melaksanakan program ini dengan segera.

Diskresi administrasi dalam kebijakan implementasi BLT Dana Desa diberikan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa dengan diberikan kewenangan untuk mengelolanya secara mandiri. Dalam pelaksanaan dilapangan, implementasi kebijakan BLT Dana Desa melalui tahap pendataan, penetapan dan penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh pemerintah desa secara mandiri dan bertanggungjawab dalam mengelola BLT Dana Desa dengan diawasi oleh *stakeholders* yang ada di desa seperti BPD dan masyarakat serta dari kecamatan dan Dinas PMD Kabupaten Tuban dan Inspektorat Kabupaten Tuban dengan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap adanya kebijakan ini.

5.2.2.2 Faktor Penghambat

Menurut Bambang Sunggono (1994:149), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, diantaranya:

1. Isi Kebijakan

Bambang Sunggono, (1994:149) menjelaskan terdapat 4 hal, dimana hambatan implementasi kebijakan yang dikarenakan isi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci,

sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

- b. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
- d. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dantenaga manusia.

Berdasarkan temuan peneliti, kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban menemui berbagai permasalahan dikarenakan isi dari kebijakan ini, diantaranya adalah banyaknya regulasi yang mengatur, inkonsistensi kebijakan, dan terjadinya ketidakpaduan kebijakan pusat dan daerah. Pertama, banyaknya regulasi kebijakan yang mengatur BLT Dana Desa. Dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa, berikut adalah regulasi yang mengatur tentang BLT Dana Desa mulai dari kebijakan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah kabupaten sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.

- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran–1 dan Lampiran–2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.
- o. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 411.2/3300/112.2/2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid 19 di Desa, tanggal 20 April 2020.
- p. Surat Edaran Bupati Tuban Nomor: 140/2112 /414.106/2020 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa.

Banyaknya regulasi yang mengatur mengenai BLT DD bisa menjadikan masalah obesitas regulasi ketika pembentukan regulasi tersebut tidak terkendali, baik pada level undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (Permen), hingga peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Setiadi (2018:324) menyatakan bahwa kuantitas atau jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak proporsional, bahkan cenderung *over-regulated*. Sebagaimana diketahui, pembentuk peraturan perundang-undangan di negara kita juga banyak sekali yang tersebar pada berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketersebaran para pembentuk peraturan perundang-undangan ini tambah disulitkan dengan tidak adanya institusi/lembaga yang mempunyai kewenangan tunggal untuk melakukan *quality control*.

Hal tersebut terjadi karena tiadanya pengawasan dan evaluasi terhadap regulasi, proses penyusunannya tanpa perencanaan yang matang sehingga tidak akuntabel dan tidak transparan, serta adanya inkonsistensi dalam pengaturan. Masalah obesitas regulasi ini pada akhirnya menimbulkan birokratisasi, menghambat laju pembangunan dan menjadi beban negara dalam meningkatkan pelayanan publik. Belum lagi ditambah dengan kondisi SDM aparatur Desa yang rendah dalam memahami banyaknya regulasi.

Kedua, dari banyaknya regulasi tersebut terdapat regulasi yang tidak selaras. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah sehingga menyulitkan implementasi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan juga pemerintah desa dalam melaksanakannya. Inkonsistensi kebijakan ini dapat dilihat

dari adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah perubahan kebijakan sebagai berikut:

a. Kebijakan BLT Dana Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2020 yang sebelumnya adalah menggunakan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 ada beberapa hal yang diubah diantara adalah sebagai berikut:

- 1) Perpanjangan penyaluran BLT Dana Desa dari 3 bulan (April, Mei, Juni 2020) Menjadi 6 bulan (April-September 2020) dan sekarang menjadi 9 Bulan (April-Desember 2020). Hal ini tentu menyulitkan pemerintah desa karena harus merubah APBDDes beberapa kali dengan adanya perpanjangan ini.
- 2) Adanya sanksi yang diberikan kepada desa yang tidak menganggarkan BLT Dana Desa yang tertuang dalam Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 yang kemudian diubah dalam Permenkeu nomor 50 tahun 2020 yang berisi Pemerintah Desa yang tidak dapat melaksanakan BLT Desa karena berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria, maka Pemerintah Desa tersebut tidak dikenakan sanksi.
- 3) Kebijakan Fiskal BLT Dana Desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 yang sebelumnya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020;
- 4) Adanya perubahan metode penyaluran BLT Dana Desa dari cashless melalui transfer bank langsung kepada KPM diubah menjadi

cash, mengingat BLT Dana Desa ini harus cepat terealisasi dan tersalurkan kepada masyarakat luas.

Dengan adanya permasalahan tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkannya diantaranya adalah deadline waktu formulasi kebijakan BLT Dana Desa ini yang sangat singkat. Adanya instruksi presiden mengenai pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat untuk dapat disalurkan secepat mungkin sehingga hal ini memengaruhi kualitas dari kebijakan yang dibuat dan pada akhirnya terdapat beberapa kali perubahan kebijakan yang dilakukan. Selain itu, tidak adanya simulasi kebijakan untuk dapat memprediksi permasalahan yang akan terjadi kedepan menyebabkan beberapa permasalahan yang pada saat diimplementasikan menjadi kendala bagi implemmentor pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Informasi

Bambang Sunggono, (1994:150) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan, seharusnya implemmentor yang terlibat memiliki informasi yang berkaitan dengan kebijakan dalam rangka berperan dalam implementasi kebijakan dengan baik, namun pada kenyataannya informasi tersebut tidak ada. Dalam Implementasi BLT Dana Desa, implemmentor pada tingkat bawah yaitu tim pendata BLT Dana Desa mendapatkan informasi mengenai Kebijakan BLT Dana Desa dari pengarahannya dari Kepala Desa dalam melaksanakan pendataan.

Data sebagai kunci utama dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan bantuan sosial haruslah berkualitas untuk dapat menjaring penerima/KPM yang sesuai dengan kriteria. Untuk itu perlu adanya perbaikan data secara rutin mengingat kondisi sosial

masyarakat yang berubah, terutama pada masa pandemi ini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mendapat mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai bantuan sosial dan subsidi pemerintah.

Selain itu dengan adanya sistem pendataan dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dalam proses pendataan dan verifikasi data yang terintegrasi dalam DTKS menjadikan kemudahan dalam proses teknis pendataan. Sehingga sistem ini dapat digunakan sebagai data awal masyarakat miskin yang tersimpan dalam DTKS dan dapat digunakan sebagai acuan penentuan sasaran KPM BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban.

Dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa menggunakan sistem DTKS dalam proses verifikasi untuk mencegah adanya tumpang-tindih dalam proses pendataan calon KPM. Dalam sistem DTKS sendiri masih ada kendala dalam kualitas data yang ada dalam sistemnya. Untuk itu masih perlu adanya perbaikan. Dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, pemerintah perlu menjadikan momentum pandemi untuk memperbaiki kebijakan pemberian bantuan sosial secara menyeluruh, termasuk kebijakan tentang pendataan dan penyalurannya.

3. Dukungan

Bambang Sunggono, (1994:151) menyatakan bahwa pengimplementasian kebijakan yang tidak cukup memiliki dukungan akan menyebabkan kebijakan sulit untuk terimplementasikan. Komitmen dalam berorganisasi menurut Meyer dan Ellen dalam Khaerul Umam (2010:258) merumuskan suatu definisi mengenai

komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaanya dalam berorganisasi. untuk itu setiap keputusan yang ambil dalam organisasi haruslah tepat dalam mengambil tindakan, khususnya dalam pembahasan ini adalah salah bantuan sosial yang merupakan bagian dari permasalahan publik.

Program bantuan sosial berupa BLT Dana Desa merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung dan mempercepat penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 di desa. Dengan adanya Instruksi Presiden Joko Widodo agar penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan dengan segera dan dipercepat karena memang sangat diperlukan. Hal ini dirasa perlu untuk dapat menyalurkan BLT Dana Desa secara segera mengingat kondisi masyarakat yang berubah akibat pandemi sehingga perlu untuk adanya percepatan mengenai BLT Dana Desa ini tersalurkan. Dengan adanya instruksi presiden tersebut, Menteri Desa PDTT mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Menteri Desa PDTT No.1 Tahun 2020 agar BLT-DD segera disalurkan tanpa menunggu pengesahan di tingkat kabupaten/kota. Sehingga hal ini dapat memudahkan OPD terkait dan pemerintah desa untuk segera mengimplementasikan BLT Dana Desa kepada KPM. Pemerintah daerah perlu untuk dapat segera merespon adanya perubahan tersebut dengan menginstruksikan kedalam kebijakan untuk dapat dilaksanakan ditingkat desa untuk dapat berkomitmen bersama melaksanakan kebijakan ini.

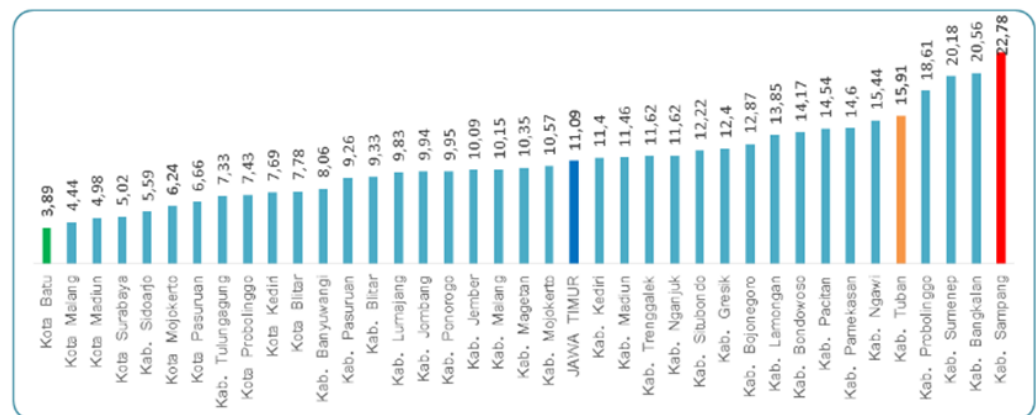
Dalam rangka menganalisis komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ini, peneliti menggunakan konsep dari Meyer dan Allen dalam Khaerul Umam (2010:262) yang mengemukakan beberapa indikator untuk dapat

mengukurnya, diantara adalah *Affective Commitment*, *Ontinuanance Commitment*, dan *Normative Commitment*.

d. *Affective Commitment*

Individu dengan *affective commitment* yang tinggi memiliki kedekatan emosional yang erat terhadap organisasi. *Affective commitment* berhubungan dengan tingkat kehadiran individu dalam organisasi dan memiliki hubungan positif dengan keinginan untuk menyarankan suatu hal demi kemajuan organisasi serta loyalitas individu terhadap organisasi. Dalam kontreks ini, komitmen pemerintah terutama pemerintah pusat hadir dalam melaksanakan tugasnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakatnya yang memerlukan bantuan ditengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terguncang akibat pandemic Covid-19 dengan memberikan pelayanan dibidang sosial berupa bantuan sosial BLT Dana Desa, khususnya di kabupaten Tuban.

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur, 2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas 2010-2020

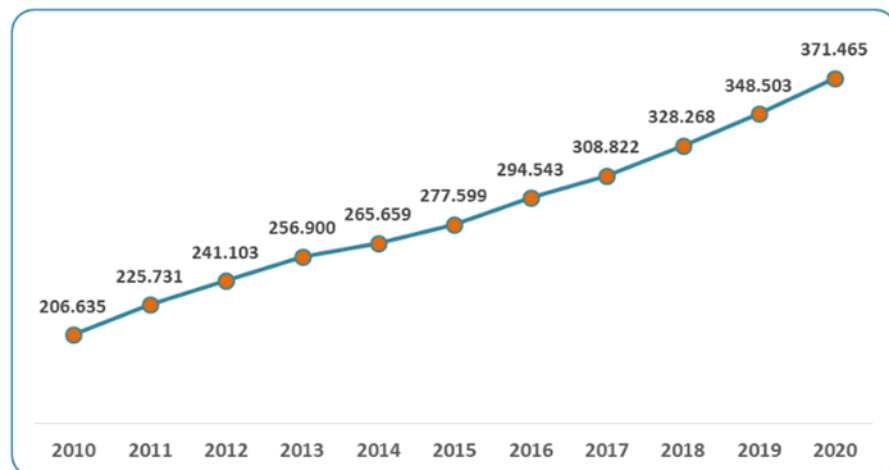
Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah termiskin di jawa timur pada 10 tahun

terakhir dan selalu masuk ke dalam 10 lingkaran setan daerah termiskin di Jawa Timur sehingga komitmen afektif ini diperlukan lebih baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan ini, terutama akhir-akhir ini karena pandemi.

e. *Continuance Commitment*

continuance commitment akan bertahan dalam organisasi, bukan karena alasan emosional, tapi karena adanya rasa kerugian besar jika meninggalkan organisasi. Komitmen pada bagian ini memiliki makna adanya kontinuitas organisasi untuk menyelesaikan sesuatu isu/permasalahan. Komitmen pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan menyelesaikan permasalahan kemiskinan melalui bantuan sosial telah dilakukan dari zaman dahulu melalui berbagai program kebijakan baik BLT, BST, PKH dan program bantuan sosial lainnya, belum banyak mengubah keadaan, terutama di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tuban, garis kemiskinan di Kabupaten Tuban selalu mengalami kenaikan dari 10 Tahun terakhir.

Gambar 3. Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban Maret 2010 – 2020



Sumber: BPS, diolah dari data Susenas 2010 - 2020

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa grafik kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban selalu mengalami kenaikan, sehingga diperlukan adanya komitmen yang bersifat kontinyu, terus menerus untuk dapat mengontrol permasalahan kemiskinan ini. Dengan adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dan lembaga terkait untuk dapat serius mengelola program kebijakan ini perlu diapresiasi.

f. Normative Commitment

Individu dengan *Normative Commitment* yang tinggi akan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa adanya suatu kewajiban atau tugas. *Normative Commitment* berhubungan positif dengan pengukuran hasil kerja. Dalam konteks ini, *normative commitment* terletak pada adanya penilaian kinerja melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memperbaiki proses yang implementasi penyaluran BLT Dana Desa secara menyeluruh kepada setiap KPM BLT Dana Desa.

Dengan adanya komitmen dan percepatan ini, implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan yang telah dilakukan diantaranya adalah: (1) penetapan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan yang ada, sehingga dalam penganggaran dapat diatur dan tidak terlalu membebani APBDes; (2) mekanisme pendataan telah dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan mengikutsertakan ketua RT/RW/ Kepala Dusun untuk dapat ikut serta memberikan masukan warganya yang memang membutuhkan dan belum tersentuh bantuan sosial

lainnya yang kemudian dibawa kedalam forum musyawarah desa; (3) mekanisme penyaluran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri desa PDTT No.6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2020 dilakukan dengan metode *cash* melalui pemerintah desa dan tetap memperhatikan protocol kesehatan; dan yang terakhir (4) monitoring dan evaluasi dilakukan oleh semua lini pemerintahan baik pusat maupun daerah dan desa. Lembaga ditingkat daerah yang berperan dalam fungsi ini adalah Inspektorat Kabupaten Tuban dan Dinas terkait yaitu Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban dalam melaksanakan pengawasan dan juga BPD pada tingkat desa yang mengawasi jalannya kebijakan ini di level desa.

4. Pembagian Potensi

Bambang Sunggono, (1994:151) penyebab yang berkenaan pada tidak tercapainya suatu implementasi kebijakan ditentukan juga oleh unsur pembagian potensi di antara implementor kebijakan. Pada keadaan ini, berkenaan dengan diferensiasi wewenang dan tanggungjawab implementor. Struktur organisasi implementor bisa menyebabkan timbulnya masalah jika dalam pembagian tanggungjawab dan wewenangnya tidak terlalu disesuaikan pada pembagian tugas, juga kurang jelasnya pembatasan. Pembagian tugas yang kurang jelas dapat menghambat implementasi kebijakan. Karena pembatasan-pembatasan yang kurang jelas dapat mempengaruhi pemahaman implementor kebijakan terhadap wewenang dan tanggung jawab yang harus di emban.

Berhasilnya pembangunan di desa di pengaruhi salah satunya adalah oleh potensi kualitas sumber daya manusia baik aparatur desa maupun kualitas sumber daya masyarakatnya, sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai aturan hukum,

mekanisme dan prosedurnya. Program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas aparatur desa belum menjadi fokus penting dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan mengenai perbaikan data dalam DTKS untuk dapat mendata tingkat kesejahteraan warganya secara berkala. Dalam sistem DTKS harusnya dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun sebagai update data masyarakat miskin pada tingkat desa.

Kualitas SDM Aparatur Desa di Kabupaten Tuban masih dapat digolongkan belum adanya sistem manajemen yang baik. Hal ini terlihat dari belum semua desa melaksanakan pemutakhiran data dan hanya sebagian kecil yang sudah mengupdate data mengenai kesejahteraan masyarakat melalui sistem SIKS-NG dan DTKS. Pengembangan kapasitas telah dilakukan dengan diadakannya bimbingan teknis mengenai pemutakhiran data yang diadakan setahun sekali.

Disisi lain, dukungan sumber daya financial yang ada dapat dikatakan memadai untuk dapat menjalankan program. Total anggaran untuk mendanai kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban adalah sebesar Rp61.029.643.700. jumlah anggaran tersebut akan diberikan kepada 33.238 KPM dengan pemberian secara berkala selama bulan Mei 2020 sampai dengan Desember 2020 sebagai jaring pengaman sosial masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban. Selain itu, adanya kenaikan Anggaran Dana Desa di kabupaten Tuban dari tahun 2019 sebesar Rp.256.256.120.000 dan pada tahun 2020 menjadi Rp 263.445.066.000. adanya kenaikan ini diberikan untuk pemerintah desa agar mengalokasikan keuangannya untuk dapat mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 di tingkat desa berupa pembentukan tim relawan desa lawan Covid-19, penyediaan sarana prasarana kesehatan dan

pengalokasian untuk program jarring pengaman sosial di tingkat desa yaitu BLT Dana Desa.

Dalam suatu penelitian ilmiah, diperlukan adanya suatu unsur kebaharuan (*novelty*) sebagai unsur pembeda atau penemuan baru dalam kegiatan riset dengan menganalisis informasi dan fenomena yang terjadi. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan baru yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban”** yaitu sebagai berikut:

Pertama, Kebijakan BLT Dana Desa ini baru dimulai pada pertengahan tahun 2020 tepatnya pada bulan April 2020 sehingga belum banyak kajian dan penelitian mengenai adanya kebijakan ini. Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh peneliti melalui berbagai situs jurnal, penelitian mengenai BLT Dana Desa baru ada 2 (dua) penelitian yang membahas mengenai BLT Dana Desa ini yaitu yang pertama dari Carly Erfly Fernando Maun (2020) yang berjudul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Kabupaten Minahasa Selatan. Kedua, Ashilly Achidsti (2020) Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT DD melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan kebijakan jaring pengaman sosial yang baru dimana dilaksanakan oleh pemerintah desa secara otonom dengan tepat memperhatikan petunjuk teknis pelaksana dari pemerintah daerah dan kebijakan dari pemerintah pusat sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai fenomena ini.

Kedua, Pembahasan mengenai implementasi kebijakan BLT Dana Desa bukan hanya dari adanya ketepatan sasaran dalam proses pelaksanaannya, tetapi juga melibatkan faktor lain yang tidak kalah penting yaitu ketepatan Guna oleh KPM sebagai pertanggungjawaban moral sosial untuk dapat benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan primer. Hal ini menjadi penting dikarenakan faktor ini yang sering lupa untuk dibahas dalam penyaluran bantuan sosial ditengah krisis yang terjadi di negara ini sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan hutang luar negeri untuk membiayai berbagai program bantuan sosial, termasuk BLT Dana Desa. Perlu adanya kesadaran masyarakat akan perlunya menggunakan dana bantuan ini dengan bijak sebagai pertanggungjawaban moral masyarakat penerima bantuan BLT Dana Desa ini. Upaya penyadaranpun diperlukan dengan adanya sosialisasi, himbauan dan penjelasan mengenai asal usul dana yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa dan arahan mengenai penggunaan dana bantuan yang diberikan agar amanah dan bijak dalam menggunakannya.

Ketiga, hasil penelitian Dianalisis dengan kebijakan dan pendekatan teori Mariee S. Grindle yang melihat kebijakan dari dua sudut pandang yaitu Content of Policy dan Context of Policy untuk menganalisis implementasi kebijakan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu terdapat beberapa teori lain yang peneliti gunakan untuk dapat mendukung analisis untuk dapat mengembangkan pemikiran sebagai bagian dari triangulasi teori. dalam penelitian ini selain menganalisis teori dari Grindle, peneliti mengembangkan pemikiran ilmiahnya untuk dapat memperoleh kesimpulan dari berbagai perspektif dengan menganalisis dari beberapa teori diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. dalam aspek ketepatan kebijakan, menganalisis data dengan teori dari Grindle dan Smith yang melihat idealitas kebijakan dalam tiga aspek penting, diantaranya adalah (1) apakah program tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah; (2) apakah program kebijakan memenuhi kebutuhan warga masyarakat; dan (3) luasnya cakupan program.
- b. Dalam aspek dampak kebijakan, menganalisis data dengan teori dari Grindle dan Dye mengenai dampak langsung dan tidak langsung terhadap kebijakan yang diimplementasikan yang dalam hal ini mengenai BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban.
- c. Dalam aspek manfaat kebijakan, selain menganalisis menggunakan teori Grindle, dalam aspek ini juga menggunakan teori dari Anderson mengenai manfaat yang dirasakan terhadap kebijakan baik positif maupun negative terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
- d. Dalam aspek ketepatan kebijakan, selain menganalisis dari teori Grindle, peneliti juga menggunakan teori dari Riant Nugroho tentang aspek ketepatan kebijakan diantaranya adalah; (1) sejauh mana kebijakan yang telah ada memuat hal-hal yang dapat memecahkan masalah; (2) apakah kebijakan tersebut dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan; (3) apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang berenang dan memiliki karakter yang sesuai dengan masalah kebijakan.
- e. Dalam aspek kepatuhan kebijakan, selain menganalisis dari teori Grindle, peneliti juga menggunakan teori dari Reply mengenai kepatuhan kebijakan mulai dari pusat sampai daerah yang dilakukan oleh implementor.

Keempat, dari beberapa penelitian mengenai bantuan sosial yang ada pada Bab II, hanya menemukan fenomena tentang ketidakefektifan dan ketidaktepatan sasaran penerima BLT Dana Desa. Lebih dari itu penelitian ini juga membahas adanya penyimpangan Bantuan sosial yang berkaitan dengan kebijakan BLT Dana Desa ini dan telah mengungkap adanya maladministrasi yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa karena adanya proses validasi yang dilakukan oleh tim pendata sebagai bagian dari proses pendataan masyarakat calon penerima bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima BLT Dana Desa.

Kelima, Riset mengenai bantuan sosial di kabupaten Tuban belum banyak dilakukan khususnya pada masa pandemi ini, mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Tuban merupakan salah satu yang tertinggi di Jawa Timur yaitu sebesar 15,31 dan selalu masuk dalam 10 besar daerah termiskin di Jawa Timur, sehingga penelitian ini mengambil Kabupaten Tuban sebagai lokasi penelitian untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pemerintah setempat agar menangani permasalahan kemiskinan ini dengan berkolaborasi bersama-sama memecahkan masalah sosial yang ada.

Selain adanya kebaruan yang ditemukan dan dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, suatu penelitian ilmiah dikatakan baik apabila memberikan kontribusi yang nyata untuk dapat memecahkan permasalahan melalui serangkaian proses penelitian. Kontribusi Penelitian ilmiah dapat dikategorikan kedalam 2 macam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teotiris

Kontribusi teoritis adalah hasil dari riset diharapkan dapat memperbaiki teori yang sudah ada, menjelaskan fenomena dengan teori yang sudah ada atau menjelaskan fenomena dengan teori yang baru yang ditemukan. Menurut Corley dan Gioia (2011) menawarkan *framework* berupa dimensi dalam melihat kontribusi secara teoritis, yaitu: (1) orisinalitas (*originality*) dan (2) kemanfaatan (*utility*). Orisinalitas bisa bersifat *revelatory* (alias menghadirkan pengetahuan yang sebelumnya menjadi misteri) atau inkremental (bertahap; tambahan tilikan baru). Kemanfaatan bisa bersifat ilmiah (scientific) dan praktis (practical).

Orisinalitas dalam kontribusi teoritis dalam penelitian ini terlihat pada analisis pendekatan secara teoritis Kebijakan BLT Dana Desa bila dibandingkan dengan teori pendekatan implementasi dari Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dengan teori implementasi Top-Down yang dikembangkannya, maka penelitian ini menggabungkan beberapa pendekatan teoritis implementasi kebijakan tersebut dari teori diatas dan pendekatan dari Grindle yang menganalisis pendekatan implementasi kebijakan pada konten/isi kebijakan dan lingkungan kebijakan yang memengaruhinya, namun pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada kedua hal diatas, dikarenakan kebijakan bantuan sosial BLT Dana Desa ini lebih luas cakupannya, tetapi juga proses kebijakan yang terjadi secara berulang-ulang dan adanya perbaikan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus baik peraturan teknisnya samapai dengan landasan utamanya dan adanya peran *Policy Elite* yang didalamnya yang memengaruhi adanya perubahan kebijakan. Yang tidak kalah penting dalam pembahasan ini adalah

pembahasan mengenai diskresi administrasi dalam implementasi kebijakan sangat dibutuhkan dimana dalam proses implementasi suatu kebijakan peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak selalu menjelaskan sampai dengan teknis pelaksanaan di lapangan dan terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian secara cepat, ditambah lagi dalam kondisi krisis seperti sekarang ini.

Permasalahan dalam bantuan sosial terjadi yang merupakan salah satu permasalahan klasik dalam memberikan pelayanan publik yang memang sudah seharusnya dilakukan riset dengan mengkolaborasikan beberapa konsep teori ataupun pendekatan untuk dapat memperoleh alternatif penyelesaian dan pembahasan dari sisi yang berbeda. Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan teori kebijakan sosial dari Bassant, Watts, Dalton dan Smit, yang menyatakan bahwa dalam penyelesaian permasalahan sosial, khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), upaya yang dilakukan adalah melalui upaya preventif (pencegahan), dan kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental). Dimana dalam menyelesaikan suatu permasalahan kesejahteraan ini, perlu adanya upaya pencegahan penurunan daya beli masyarakat miskin desa akibat pandemi sehingga dikeluarkan kebijakan BLT Dana Desa ini sebagai upaya preventif terjadinya permasalahan lain, baik dari kesehatan, pendidikan dan yang lainnya. Kebijakan ini juga bersifat kuratif, dimana dalam pemberian bantuan BLT Dana Desa ini untuk dapat memberikan sumber pendapatan sementara bagi masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang pelan-pelan mulai bangkit dari adanya dampak pandemic ini. Kebijakan sosial adalah

ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah dan mengurangi terjadinya masalah sosial (fungsi preventif) mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2006).

maka penelitian ini pendekatan yang belum pernah digunakan dalam penelitian menggunakan bantuan sosial sehingga dapat menjadi salah satu rujukan dalam penelitian selanjutnya. Sedangkan dalam perspektif praktis dengan melihat hasil penelitian yang telah dianalisis dengan teori dapat menjadi rujukan perbaikan dari program yang diteliti. Dalam penelitian ini kontribusi yang diberikan adalah mengenai sistem pengawasan dan evaluasi yang perlu ditambahkan dalam proses implementasi program BLT Dana Desa yang diteliti. Secara umum kontribusi teoritis dalam penelitian ini yaitu memperkaya penelitian Bantuan sosial khususnya BLT Dana Desa di masa pandemi melalui pendekatan deskriptif pada masyarakat pedesaan.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi praktek menunjukkan bahwa hasil dari riset dapat digunakan untuk diterapkan di praktek nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktek yang ada dengan lebih baik. Dalam penelitian ini kontribusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

a. Policy Maker

Menjadi rujukan dan bahan perbaikan sebagai evaluasi implementasi kebijakan untuk dapat memperbaiki kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

pusat agar dapat terintegrasi antara Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat berintegrasi dalam membuat kebijakan, sehingga terjadi kesinambungan antar kebijakan mengenai BLT Dana Desa. Selain itu adanya inkonsistensi kebijakan karena adanya perubahan beberapa kali membuat pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan pemerintah desa kebingungan karena pada awalnya kebijakan yang dibuat memang sangat banyak ditemui kekurangan.

Kontribusi penelitian ini secara empiris dapat dilihat dari pembahasan mengenai faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa ini yaitu memberikan saran kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk dapat duduk bersama-sama membahas kebijakan ini dimana pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam perumusan kebijakan, dimana kebijakan ini sangat penting dan meliputi kelangsungan hidup masyarakat. Kolaborasi ini perlu dilakukan mengingat kebijakan yang sudah-sudah terjadi ketidaksinambungan beberapa hal yang ada dalam isi kebijakan sehingga masih perlu banyak perbaikan yang mendasar.

b. Implementor

Implementor pada tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban agar dapat melaksanakan kebijakan BLT Dana Desa sesuai dengan kebijakan yang ada untuk dapat mengkoordinir dan memonitoring pemerintah desa yang melaksanakan dan menganggarkan BLT Dana Desa ini secara akuntabel, tepat guna dan tepat sasaran. Implementor dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMD) Kabupaten Tuban yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan BLT Dana

Desa di Kabupaten Tuban. Selain itu, diperlukan adanya sikap adaptif terhadap adanya perubahan yang sering terjadi terutama mengenai kebijakan yang berubah-ubah menjadikan implementor memang harus *update* mengenai adanya perubahan kebijakan yang terjadi sehingga program kebijakan BLT Dana Desa ini dapat dilakukan dengan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian diatas mengenai implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai perlindungan sosial masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban serta untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban

- a. Pembentukan tim pendata BLT Dana Desa

Pembentukan tim pendata calon KPM BLT DD dilakukan oleh masing-masing desa di Kabupaten Tuban sesuai dengan Surat Edaran Bupati Tuban dengan melibatkan berbagai *stakeholders* yang ada di desa setempat. Sebelum melaksanakan pendataan, tim memperoleh arahan dan bimbingan untuk melakukan pendataan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pendataan BLT Dana Desa.

- b. Mekanisme Pendataan Penerima BLT Dana Desa

Pendataan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing desa melalui tim pendata yang telah dibentuk dan disahkan oleh kepala desa yang melakukan pendataan langsung maupun verifikasi data kesejahteraan yang ada di desa yang kemudian dibawa kedalam forum musyawarah desa khusus untuk penetapan KPM BLT Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pemerintah desa tidak mengupdate data kesejahteraan masyarakat

didalam sistem DTKS, sehingga hal ini menyulitkan tim pendata dalam melaksanakan verifikasi data kesejahteraan masyarakat desa.

c. Penetapan sasaran penerima BLT Dana Desa

Penetapan sasaran penerima BLT Dana Desa adalah masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi, masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan sosial lainnya yang dilakukan dengan sistem musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil dengan Jumlah KPM BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban adalah sebesar 33.238 KPM.

d. Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa

Pendataan telah dilakukan di semua desa di Kabupaten Tuban setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Tuban Nomor: 140/2112 /414.106/2020 tentang penyaluran BLT Dana Desa dengan Jumlah KPM BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban dengan metode cash dan mekanisme penyaluran dilakukan dengan menyerahkan secara langsung dana BLT DD kepada Kelompok Penerima Sasaran (KPM).

e. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian sampai dengan pemerintah desa dalam proses pelaksanaanya. selain itu terdapat Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) Seperti Inspektorat Kabupaten Tuban, kecamatan dan juga BPD pada level implementasi di desa.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban ini adalah adanya komitmen pemerintah pusat untuk dapat menyegerakan kebijakan ini mengingat program ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang kedua adalah adanya sistem DTKS yang membantu proses penetapan sasaran penerima BLT Dana Desa sebagai basis data tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketiga adalah adanya kriteria penerima BLT Dana Desa yang sangat mudah dipahami dan dijabarkan sesuai dengan aturan yaitu dimana calon penerima BLT Dana Desa adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian/pekerjaan akibat pandemi, kemudian masyarakat miskin dan rentan terhadap adanya perubahan. Selain itu, dengan adanya musyawarah desa sebagai konsep modal sosial yang dapat dilakukn untuk membahas calon KPM BLT Dana Desa merupakan metode pendataan dan verifikasi yang lebih baik disbanding sebelumnya yang hanya menggunakan data BPS yang hanya diperbaharui setahun sekali.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa adalah masih adanya data yang tidak diupdate pemerintah desa melalui operator desa yang mengakibatkan dalam sistem DTKS masih ada data yang belum mutakhir/terkini. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh dalam prose implementasi karena data merupakan kunci dari efektivitas kebijakab bantuan sosial, terutama disini adalah BLT Dana Desa. Yang kedua adalah adanya inkonsistensi kebijakan yang menghambat implementor untuk dapat merealisasikan program baik ditingkat daerah melalui OPD terkait maupun di tingkat desa. Ketiga adalah adanya sumber daya aparat pemerintah desa khususnya operator desa yang

terus berganti setiap tahun mengakibatkan proses pengembangan kapasitas melalui bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala kurang maksimal. Belum lagi permasalahan teknis seperti masih adanya desa yang belum punya computer yang memadai untuk digunakan sebagai transfer data dan pemutakhiran data dalam sistem DTKS sehingga hal ini menghambat proses verifikasi data dalam BLT Dana Desa.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Peneliti memiliki saran yang diharapkan mampu membantu dalam proses perbaikan dalam Implementasi kebijakan BLT Dana Desa sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan dan pembenahan mekanisme pemutakhiran data warga desa yang berhak menerima manfaat. Akurasi data menjadi pangkal terjadinya silang sengkabut pendistribusian bantuan sosial. Pemutakhiran data dapat dilakukan minimal setahun dua kali bagi pemerintah desa untuk dapat mengupdate data kesehateraan sosial masyarakatnya.
2. Penambahah jumlah dan waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari tiga bulan menjadi enam bulan kemudian menjadi sembilan bulan dan tanpa pembatasan prosentasi tertentu dari Dana Desa juga makin membuka kemungkinan kesenjangan penerima manfaat dari sumber pendanaan yang berbeda sehingga memberatkan APBDes masing-masing desa dan menghambat program pembanguna desa yang telah direncanakan sebelumnya dikarenakan banyaknya teralokasikan untuk BLT Dana Desa. Hal ini perlu disikapi oleh K/L terkait yang menyalurkan bantuan sosial dari sumber APBN agar frekuensi penerimaan bantuan setidaknya sama dengan frekuensi

bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bagi Kepala Daerah untuk meninjau kembali kebijakannya terkait pemberian bantuan sosial yang dianggarkan dari APBD agar dapat selaras dengan kebijakan PMK 50/2020.

3. Penyederhanaan kebijakan yang mengatur mengenai BLT Dana Desa perlu untuk dilakukan mengingat terdapat 15 regulasi yang ada ditambah dengan kebijakan yang sifatnya tidak tertulis akan menjadikan pemerintah daerah terutama pemerintah desa kurang dapat menyerap informasi yang didapatkan dalam kebijakan yang ada. Hal ini perlu dilakukan dengan adanya koordinasi antarsektor kementerian yaitu kementerian desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri untuk dapat berkoordinasi membentuk kebijakan yang berkolaborasi untuk dapat memformulasikan kebijakan bersama-sama agar kebijakan yang dihasilkan lebih ringkas, mudah dipahami dan terintegrasi, sehingga hal ini akan meminimalisir terjadinya inkonsistensi kebijakan yang mengaturnya.
4. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dalam mengelola BLT Dana Desa terutama dalam pemutakhiran data pada kesejahteraan sosial perlu untuk ditingkatkan dengan adanya regulasi yang mengatur pemerintah desa untuk melakukan pemutakhiran data dan setiap operator desa untuk dapat dibekali dengan sarana prasarana yang mendukung dalam melaksanakan tugasnya serta melakukan bimbingan teknis mengenai pengelolaan sistem data dalam kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdul Wahhab, Solichin. 2015. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- AG, Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Al Muchtar, Suwarma. 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.*
- Baedhowi, 2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam bidang pendidikan. Jakarta: Disertasi Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bank Dunia. 2012. General Guidelines for The Development of Government Payment Programs. Washington DC: World Bank.*
- Bryson, John M. 2004. *What Do When Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs.
- Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia.*
- Craswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publication,
- Creswell, J.W. 2013. Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed) Edisi Revisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*

- Daft, Richard L. 2003. *Manajemen. Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. 2003. *The New Public Service: Serving, not Steering*. New York: M.E. Sharpe. Inc
- Dye, Thomas R. 2011. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall
- Freeman, R. Edward. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Grindle. 1997. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Boston: MA, Harvard Institute for International Development.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Guhan, S. 1994. *Social Security Options for Developing Countries*. *International Labor Review*, 133, hal. 35-53. Dalam Brunori, P. & O'Reilly, M. (2010). *Social Protection for Development: A Review of Definitions*. *European Report on Development*.
- Tachan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.
- International Labour Organization. 1984. *Introduction to Social Security* (3 ed.). Geneva: International Labour Office.
- International Labour Organization. 2012. *Penilaian Landasan Perlindungan Sosial Berdasarkan Dialog Nasional di Indonesia: Menuju Landasan Perlindungan Sosial Indonesia*. Laporan: Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Kementerian Sosial Republik Indonesia .2011. Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan tahun 2011. Kementerian Sosial RI. Jakarta.

Lattimore, dkk. 2010. *Public Relations: Profesi dan Praktik*. Jakarta: Salemba Humanika

M. Irfan. Islamy. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebiaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Mukhtar. 2000. Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Ayyrrouz, Yogyakarta:

Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.

Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.

Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia

Nugroho, Riant. 2015. *Policy Making: Mengubah Negara Biasa menjadi Negara Berprestasi*. Kompas Gramedia: Jakarta

Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.

Pickens, Mark, David Porteous, and Sarah Rotman. (2009). "Banking the Poor via G2P Payments." Focus Note 58. Washington, D.C.: Consultative Group to Assist the Poor (CGAP).

Poerwandari, E. K. (1998). Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Universitas Indonesia

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban 2020

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban

Rewansyah, Asnawi. 2012. Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance. Yusaitanas. Jakarta.

Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Royat, Sujana. 2015. Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Menko Kesra Bidang Koordinasi Pengangulan Kemiskinan. Jakarta

Sabates-Wheeler, R. & Devereux, S. (2007). Social Protection for Transformation. IDS Bulletin, 38(3), hal. 23-28. Dalam Brunori, P. & O'Reilly, M. (2010). Social Protection for Development: A Review of Definitions. European Report on Development.

Scott, Z. (2012). Topic Guide on Social Protection. Birmingham: Governance and Social Development Resource Center.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama

Suharto Edi, Ph.D. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika ADITAMA.

Thoha, Miftah. 1997, Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

United Nations Children's Fund. (2012). UNICEF Social Protection Strategic Framework: Integrated Social Protection Systems. New York: United Nations Children's Fund.

Widodo, Joko, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006.

Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal:

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.

Antonio De Vito , Juan-Pedro Gómez. 2020. *Estimating the COVID-19 cash crunch: Global evidence and policy*. *J. Account. Public Policy*.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106741>

Asian Development Bank. 2020. *ADB Approves \$3 Million Grant to Support Indonesia's Fight Against COVID-19*.

Budastra, I Ketut. 2020. *Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 dan Program Potensial untuk Penangannya: studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat*. Vol. 20 No. 1: April 2020

Hirawan, F. B. (2020). *Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID-19 Pandemic*.(June), 1–7.

Iping, Baso. 2020. *Perlindungan sosial melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi COVID-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial*. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Volume 1, Issue 2, Juli 2020

Junaidi, Kariono. 2013. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur*. Vol 3, No. 1, Juni 2013

Kwon, Huck-ju, Woo-rim Kim. 2020. *The Evolution of Cash Transfers in Indonesia: Policy Transfer and National Adaptation*. *Journal of Asia & the Pacific Policy Studies*. vol. 2, no. 2, pp. 425–440

- Mckibbin Warwick dan Roshen Wernando, 2020. *The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios*. Centre for Applied Macroeconomic Analysis.
- Mowafi, M. (2015). *Poverty*. *Journal of Epidemiology and Community Health*.
<https://doi.org/10.1136/jech.2004.022822>
- Mufida, A. (2020). *Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19*. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.
- Muhtar. 2015. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin*. *Jurnal PKS Vol 14 No 4 Desember 2015*; 397 – 410
- Pamungkas, Binar Dwiyanto. *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa*. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No. 2, 2020: 96-108
- Rahmansyah, Wildan, dkk. 2020. *Pemetaan Permasalahan Pelnyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia*. *Jurnal pajak dan Keuangan Negara Vol.II No. 1*
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48
- Suharto, Edi. 2015. *Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: studi Program Keluarga Harapan*. *Sosiohumaniora*, Volume 17 No. 1 Maret 2015: 22 – 28
- Venkatesh, Viswanath (2020). *Impacts of COVID-19: A research agenda to support people in their fight*. *International Journal of Information Management*.
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102197>
- Yacoub, Y. 2010. *Pengaruh Tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Eksos vol.8 no.3*
- Yumarni, Tri. 2005. *Pro Poor Government dalam Pelayanan Publik*. *Jurnal Administrasi Publik vol.4 no.2*

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dokumen lainnya:

Asian Development Bank. 2020. ADB Approves \$3 Million Grant to Support Indonesia's Fight Against COVID-19

Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021

*UN DESA.2020. A Full Blow Employment Cricis in Emerging Economics. New York:
World Economics Situation and Prospects June 2020 Briefing No. 138*

United Nations. 2020. Lounch of Global Humanitarian Respons Plan for COVID-19

Internet:

Covid19.go.id, 22 February 2021. Government of Indonesia

Ubaidi Saleh. 2020. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Indonesia di Tengah

Merebaknya Pandemi COVID-19. BKF. Online

(<https://youtu.be/rmPSW8Y8IA8>) diakses tanggal 7 November 2020.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(INTERVIEW GUIDE)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLT DANA DESA SEBAGAI PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN

- A. Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban

No	Pertanyaan
	Penetapan sasaran penerima BLT Dana Desa
1	Jelaskan tugas dan kewajiban dari Sekretariat Pemda mengenai adanya BLT Dana Desa?
2	Dinas/OPD mana saja yang mempunyai tugas dalam proses implementasi kebijakan ini?
3	Bagaimana peran Sekda dalam mengarahkan koordinasi antar OPD terkait?
4	Bagaimana penetapan sasaran penerima BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban?
5	Bagaimana koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran BLT Dana Desa?
	Mekanisme Pendataan penerima BLT Dana Desa
6	Bagaimana mekanisme pendataan penerima BLT Dana Desa?
	Bagaimana Instansi Anda dalam mengarahkan koordinasi antar OPD dalam proses penutakhiran NIK pada DTKS?
	Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa
7	Apakah instansi Anda menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa?
8	Bagaimana mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban?
	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa
9	Bagaimana bentuk pengawasan pendataan calon penerima BLT Dana Desa?
10	Apakah pemerintah Kabupaten melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/ atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa?
11	Bagaimana pengawasan horizontal terhadap OPD terkait dalam proses implementasi BLT Dana Desa?
12	Bagaimana pengawasan vertikal yang dilakukan pemda dengan pemerintahan dibawahnya mulai dari kecamatan sampai desa dalam proses implementasi BLT Dana Desa?
	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa
13	Apa faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Tuban?
14	Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses impelentasi kebijakan BLT Dana Desa di Tuban?

B. Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban (Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial)

No	Pertanyaan
	Penetapan sasaran penerima BLT Dana Desa
1	Jelaskan tugas dan kewajiban dari Dinas Sosial mengenai adanya BLT Dana Desa?
2	Bagaimana penetapan sasaran penerima BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban?
3	Bagaimana koordinasi dengan OPD lain terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran BLT Dana Desa?
	Mekanisme Pendataan penerima BLT Dana Desa
4	Bagaimana mekanisme pendataan penerima BLT Dana Desa?
5	Apakah ada pelatihan khusus/memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa?
6	Bagaimana Instansi Anda memastikan tidak adanya tumpang tindih data penerima BLT Dana Desa dengan bantuan sosial lainnya?
7	Bagaimana Instansi Anda dalam proses penutakhiran NIK pada DTKS?
8	Bagaimana koordinasi dengan dispendukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS?
	Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa
9	Apakah instansi Anda menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa?
10	Bagaimana mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban?
	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa
11	Bagaimana bentuk pengawasan pendataan calon penerima BLT Dana Desa?
12	Apakah pemerintah Kabupaten melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/ atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa?
13	Apakah dinas sosial melibatkan desa untuk verifikasi dan validasi dengan melibatkan pusat kesejahteraan sosial/sumber kesejahteraan sosial di kecamatan?
	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa
14	Apa faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Tuban?
15	Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Tuban?

C. Inspektorat Kabupaten Tuban

No	Pertanyaan
	Penetapan sasaran penerima BLT Dana Desa
	-
	Mekanisme Pendataan penerima BLT Dana Desa
	-

No	Pertanyaan
	Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa
	-
	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa
9	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terkait implementasi kebijakan BLT Dana Desa?
10	Apakah pemerintah Kabupaten Tuban telah menjalankan tugasnya dengan baik terkait penyaluran BLT Dana Desa?
11	Apakah ada pengaduan yang dilakuakn oleh masyarakat terkait dengan implementasi BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban?
	Sejauh ini apakah ada pelanggaran yang terjadi dalam praktek implementasi BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban?
	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa
	Apa yang menjadi hambatan dalam BLT Dana Desa ini?

D. Masyarakat Penerima BLT Dana Desa

No	Pertanyaan
	Penetapan sasaran penerima BLT Dana Desa
	Apakah Bapak/Ibu diwawancarai dalam pendataan BLT Dana Desa?
	Mekanisme Pendataan penerima BLT Dana Desa
	Bagaimana proses pendataan yang dilakukan pemerintah desa sehingga Anda mendapatkan BLT Dana Desa?
	Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa
	Bagaimana proses penyaluran BLT Dana Desa?
	Berapa yang Anda dapatkan bantuan tersebut?
	Berapa lama Anda mendapatkan Bantuan tersebut?
	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BLT Dana Desa
	Apakah Bapak/Ibu mengikuti perkembangan terkini mengenai BLT Dana Desa?
	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa
	Apakah ada masalah selama proses penyaluran bantuan?
	Selama mendapatkan bantuan, untuk apa uang bantuan tersebut digunakan?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp : +62-341-553737, 568914, 558225 Fax +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

FORMULIR PERSETUJUAN SEBAGAI INFORMAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
SEBAGAI PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19
(Studi di Kabupaten Tuban)

Anh Wahyu d, SSTP

[Nama]

[Alamat]

Kabid Pendes

[Posisi pekerjaan / Jabatan]

- Bebas memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan memanami bahwa saya dapat menarik diri kapan saja
- Setuju untuk mengizinkan pewawancara menggunakan perekam suara digital untuk membantu dalam penyediaan rekaman wawancara yang benar dan akurat
- Penelitian ini sudah mendapatkan persetujuan, penelitian ini adalah bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis semata serta dapat dipertanggungjawabkan
- Dengan ini informan setuju untuk berpartisipasi dalam studi penelitian ini

Tanda Tangan :

Tanggal : 7 Desember 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

FORMULIR PERSETUJUAN SEBAGAI INFORMAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
SEBAGAI PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19
(Studi di Kabupaten Tuban)

SANTOSO, SH

(Nama)

Perum Monsan Jl Jawa Blok Y-17 Tuban

(Alamat)

Kagri Lingungs Dingus P3A Kakh. Tuban

(Posisi pekerjaan / Jabatan)

- Bebas memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan memahami bahwa saya dapat menarik diri kapan saja
- Setuju untuk mengizinkan pewawancara menggunakan perekam suara digital untuk membantu dalam penyediaan rekaman wawancara yang benar dan akurat
- Penelitian ini sudah mendapatkan persetujuan, penelitian ini adalah bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis semata serta dapat dipertanggungjawabkan
- Dengan ini informan setuju untuk berpartisipasi dalam studi penelitian ini

Tanda Tangan : 

Tanggal

: 15 Desember 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

FORMULIR PERSETUJUAN SEBAGAI INFORMAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
SEBAGAI PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19
(Studi di Kabupaten Tuban)

Dra. SUKAR-TIWI

[Nama]

PERUM SIWALAN PERMAI PRAJA 18

[Alamat]

IRBAN INVESTIGASI

[Posisi pekerjaan / Jabatan]

- Bebas memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan memahami bahwa saya dapat menarik diri kapan saja.
- Setuju untuk mengizinkan pewawancara menggunakan perekam suara digital untuk membantu dalam penyediaan rekaman wawancara yang benar dan akurat.
- Penelitian ini sudah mendapatkan persetujuan, penelitian ini adalah bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis semata serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Dengan ini informan setuju untuk berpartisipasi dalam studi penelitian ini.

Tanda Tangan :

Tanggal :

7 Desember 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

FORMULIR PERSETUJUAN SEBAGAI INFORMAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
SEBAGAI PERLINDUNGAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19
* (Studi di Kabupaten Tuban)

Drs. BAMBANG SUHATI, M.A.P.
[Nama]

PERUM UHANG INDAH BLOK AE-09 TUBAN
[Alamat]

PENGAWAS PEMERINTAHAN MASYA
[Posisi pekerjaan / Jabatan]

- Bebas memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan memahami bahwa saya dapat menarik diri kapan saja.
- Setuju untuk mengizinkan pewawancara menggunakan perekam suara digital untuk membantu dalam penyediaan rekaman wawancara yang benar dan akurat.
- Penelitian ini sudah mendapatkan persetujuan; penelitian ini adalah bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis semata serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Dengan ini informan setuju untuk berpartisipasi dalam studi penelitian ini.

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Desember 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 32 Telp. (0356) 320455
TUBAN

IZIN SURVEI/RISET/PKL/KKN

Nomor : 070 / 391 / 414.107 / 2020

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2014.
 2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018.
 3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban
- Menimbang** :
1. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Universitas Brawijaya Nomor 10050/UN10.F.03.01/PN/2020 tanggal 05 November 2020 Perihal Izin Penelitian atas nama Denny Iswanto.
 2. Formulir Permohonan Izin Survei/Riset/PKL/KKN Nomor 070/391/414.107/2020 tanggal 01 Desember 2020 atas nama Denny Iswanto.

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama / NIM : **DENNY ISWANTO / 196030100111018**
Alamat : RT.003 RW.004 Ds. Mentoro Kec. Soko - Tuban
Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
Fakultas / Program Studi : Ilmu Administrasi / Magister Administrasi Publik
Instansi / Organisasi : Universitas Brawijaya
No.Telepon / Hp : 089515888277

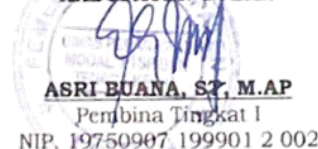
Untuk Melakukan Penelitian Dengan :

Judul : Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak COVID-19 di Kabupaten Tuban
Tujuan : Penyusunan Tugas Akhir (Tesis)
Anggota / Peserta : 1 (satu) Orang
Waktu : 30 November s/d 30 Desember 2020
Lokasi : Kabupaten Tuban

- Dengan Ketentuan**
1. Dalam jangka waktu 1 x 24 Jam setelah tiba ditempat kegiatan, diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat setempat;
 2. Menjaga Tata Tertib keamanan, ketertiban, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan - perbuatan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk;
 3. Pelaksanaan Izin Survei/Riset/PKL/KKN kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Survei/Riset/PKL/KKN kepada Bupati Tuban Cq. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban;
 5. Dalam pelaksanaan Penelitian yang mengikutsertakan Warga Negara Asing (WNA) sebagai Tenaga Ahli / Petugas Lapangan supaya melaporkan kepada Kepala Kepolisian Resort Tuban;
 6. Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang izin ini tidak memenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tuban, 3 Desember 2020
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TUBAN


ASRI BUANA, ST, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19750907 199901 2 002

TEMBUSAN Kepada :

1. Yth. Kepala Kepolisian Resort Tuban
2. Yth. Komandan KODIM 0811 Tuban
3. Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban
4. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Tuban
5. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan KB Kab. Tuban
6. Yth. Inspektur Inspektorat kab. Tuban

SERTIFIKAT PLAGIASI

plagiarism-detector Cutting-edge class tool for plagiarism detection and prevention		KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21 0074 T
		UNIVERSITAS BRAWIJAYA	
		PROGRAM PASCASARJANA	
	Nomor: 244/UN10.F40/PN/2021		
	Sertifikat ini diberikan kepada:		
	Nama	: Denny Iswanto	
	NIM	: 196030100111018	
	Program Studi	: Program Magister Ilmu Administrasi Publik	
	Fakultas	: Fakultas Ilmu Administrasi	
	Universitas	: Universitas Brawijaya	
	Dengan Judul Tesis		
	Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Studi di Kabupaten Tuban)		
	Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara online pada tanggal 9 Februari 2021 dan dinyatakan bebas plagiasi dengan kriteria toleransi $\leq 5\%$.		
		Malang, 17 Februari 2021	
		Ketua Badan Penerbitan Jurnal	
			
	Prof. Dr. Marjono, M.Phil NIP. 196211161988031004	Indah Yanti, S.Si., M.Si. NIP. 19791129 200501 2 002	